

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pembangunan Berorientasi Manusia

Aset utama koperasi Indonesia adalah sumberdaya manusia, yakni para anggotanya, menurut Hidayat (dalam Choirul Djahhari, ed., 1984, h. 74). Sejalan dengan pernyataan tersebut, Muslimin Nasution (1984) mengemukakan bahwa unsur manusia adalah bangunan bawah (building blocks) koperasi Indonesia.

Pengembangan gerakan koperasi di pedesaan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan bangsa. Pengembangan gerakan koperasi tersebut bertujuan meningkatkan taraf hidup warga pedesaan, yang merupakan bagian terbesar dari warga bangsa Indonesia.

Analisis mengenai orientasi pembangunan yang dilakukan oleh para pakar, membedakan secara garis besar adanya dua jenis orientasi. Pertama, pembangunan berorientasi produksi, dan kedua, pembangunan berorientasi manusia,

David C. Korten (1983) menjelaskan bahwa perbedaan utama di antara kedua orientasi pembangunan tersebut ialah pada dimensi mana yang disubordinasikan. Pada pembangunan yang berorientasi produksi, kebutuhan manusia senantiasa disubordinasikan di bawah sistem produksi.

Sedangkan pada pembangunan yang berorientasi manusia, senantiasa berusaha mensubordinasikan kebutuhan-kebutuhan sistem produksi di bawah kepentingan manusia.

Korten menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut :

Pemahaman akan perbedaan antara pembangunan yang berpusat pada rakyat dan yang berpusat pada produksi sangat penting bagi pemilihan teknik sosial yang cocok bagi pencapaian tujuan pembangunan menurut paradigma yang pertama, karena dalam hal tujuan atau nilai, metodologi-metodologi perencanaan dan bentuk-bentuk organisasi tidaklah netral. Teknik-teknik sosial dari pembangunan yang berpusat pada produksi, misalnya, mencakup bentuk-bentuk organisasi yang menggunakan sistem komando, ... metode-metode analisis keputusan yang dianggap bebas nilai, metodologi-metodologi riset sosial yang didasarkan pada asas-asas ilmu-ilmu fisika klasik, sistem produksi yang didefinisikan secara fungsional, dan perangkat analisis yang tidak mempertimbangkan manusia dan lingkungan.

Teknik-teknik sosial dari pembangunan yang berpusat pada rakyat .-. mengutamakan bentuk-bentuk organisasi swadaya yang menonjolkan peranan individu dalam proses pengambilan keputusan dan menyerukan dipakainya nilai-nilai manusiawi dalam pembuatan keputusan... proses-proses pembangunan ... didasarkan pada konsep-konsep dan metode-metode belajar sosial, perspektif teritorial, bukannya fungsional, yang mendominasi perencanaan dan pengelolaan sistem-sistem produksi-konsumsinya (David C. Korten, 1988, h. 375)-

Harbison <1973) menyatakan bahwa pembangunan yang berorientasi manusia menekankan kebermaknaan pendayagunaan semua sumberdaya insani di dalam kegiatan produktif dan pengembangan keterampilan, pengetahuan, serta kecakapan mereka. Asumsi yang mendasari pendekatan ini ada tiga, yaitu: (1) sumberdaya manusia di negara-negara sedang berkembang melimpah dan belum didayagunakan secara maksimal, {2} pengetahuan, kecakapan, dan keterampilan sumberdaya manusia memiliki daya tumbuh yang hampir-hampir

tidak terbatas, yang pada saat ini aktualisasinya belum sebanding dengan potensi sebenarnya, dan (3) keyakinan bahwa bangsa yang sedang membangun dapat memakmurkan diri dengan memaksimalkan pendayagunaan dan pengembangan secara efektif dan produktif sumber daya manusia yang dimilikinya

Pembangunan manusia Indonesia dalam gagasan idealnya adalah pembangunan yang berorientasi manusia. Mubyarto (1983) menjabarkan pembangunan nasional Indonesia sebagai *pembangunan* yang berorientasi manusia dengan beberapa indikator, yakni (1) ada keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pembangunan lahiriah dan batiniah, (2) pembangunan merata di seluruh tanah air, dan (3) pembangunan untuk semua golongan, seluruh anggota masyarakat, dan seluruh *rakyat*. Hal ini sesuai dengan kesepakatan nasional yang menyatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Apabila aset utama koperasi Indonesia adalah sumber daya manusia, seperti dikemukakan oleh Hidayat, maka upaya pengembangan gerakan koperasi yang menjadi tema pokok studi ini berada dalam kerangka acuan strategi pembangunan yang berorientasi manusia.

B. Pembangunan Masyarakat Desa Sebagai Proses Perubahan Sosial

Ada banyak cara mendefinisikan konsep pembangunan masyarakat desa itu. Pembangunan masyarakat desa dapat

diartikan sebagai suatu proses, di mana anggota-anggota masyarakat desa mula-mula mendiskusikan dan menentukan keinginan dan aspirasi mereka, menyusun rencana dan bekerja sama mewujudkan keinginan dan aspirasi mereka tersebut.

Rumusan pengertian yang lainnya menyatakan bahwa pembangunan masyarakat desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat desa dengan partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat desa, yang apabila mungkin didasarkan atas prakarsa atau inisiatif dari masyarakat itu sendiri, akan tetapi apabila prakarsa atau inisiatif tidak muncul dari masyarakat, maka dapat digunakan teknik-teknik untuk menumbuhkan dan mendorong munculnya prakarsa mereka dan mendorong aktivitas atau gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik tersebut.

Istilah pembangunan muncul dan menjadi sangat banyak dipakai setelah negara-negara jajahan memerdekakan dirinya pasca perang dunia kedua.

Pembangunan pada dasarnya adalah merupakan suatu bentuk perubahan sosial. Karena itu dalam berbagai kepustakaan, pembangunan masyarakat atau community development, perubahan sosial atau social change, dan juga modernisasi seringkali dibicarakan bersama-sama.

Perubahan sosial merupakan gejala yang selalu menyertai upaya pembangunan masyarakat dan/atau pembangunan masyarakat desa.

Perubahan sosial menurut Everett M. Rogers (1971)

adalah proses yang di dalamnya terjadi perubahan pada struktur dan fungsi dari suatu sistem sosial. Rumusan pengertian tentang perubahan sosial yang demikian itu, mengandung tiga unsur utama pada setiap perubahan sosial itu, yakni: (1) sumber yang menjadi kekuatan pendorong perubahan; (2) cara-cara yang dapat dilakukan untuk menciptakan terjadinya perubahan; (3) akibat atau konsekuensi daripada perubahan yang terjadi. Dalam pengertian perubahan sosial tersebut pada dasarnya secara implisit telah terkandung pula keterlibatan proses komunikasi di dalam perubahan sosial yang terjadi.

Sumber yang menjadi kekuatan pendorong sesuatu perubahan sosial dapat muncul atau berjual dari dalam sistem sosial yang bersangkutan, dan dapat pula berasal dari luar sistem sosial tersebut. Apabila perubahan sosial terjadi karena adanya kekuatan pendorong yang berasal dari dalam sistem sosial itu sendiri, maka perubahan sosial itu disebut perubahan sosial immanent. Sebaliknya apabila sumber kekuatan pendorong perubahan sosial itu berasal dari luar sistem sosial yang bersangkutan, maka perubahan sosial itu disebut perubahan sosial contract (Rogers, 1971, h. 8).

Perubahan sosial immanent terjadi apabila anggota-anggota pada suatu sistem sosial menciptakan dan mengembangkan gagasan atau ide baru, dengan atau tanpa pengaruh dari luar, kemudian menyebarkan atau mendifusikannya dalam sistem sosial itu. "Perubahan sosial

immanent merupakan gejala intrasistem. Pengembangan gerakan koperasi pedesaan pada kasus penelitian ini dapat dipandang sebagai gejala perubahan sosial imanen, dalam arti gagasan dan konsep koperasi pedesaan telah diadopsi oleh pemimpin puncak lokal kemudian mendifusikannya di dalam lingkup komunitas desanya.

Perubahan sosial kontak terjadi apabila sumber kekuatan pendorongnya berasal dari luar sistem sosial yang bersangkutan. Dapat juga terjadi apabila sumber-sumber luar memperkenalkan gagasan atau ide baru kepada anggota-anggota sistem sosial itu. Perubahan sosial kontak merupakan gejala di antara sistem, yang dapat merupakan perubahan sosial kontak-selektif atau dapat pula merupakan perubahan sosial kontak-terarah. Hal ini tergantung pada pengenalan kebutuhan atau perubahan itu, apakah bersifat eksternal ataukah bersifat internal.

Perubahan sosial kontak-selektif terjadi apabila anggota-anggota suatu sistem sosial diekspos terhadap inovasi dari luar dan mengadopsi atau menolak inovasi tersebut sesuai dengan kebutuhan perubahan yang mereka inginkan. Pengembangan gerakan koperasi pedesaan yang dibahas dalam studi ini pun dapat dikategorikan sebagai perubahan kontak-selektif. Pemimpin puncak lokal diperkenalkan pertama kali terhadap suatu inovasi dari luar berupa gagasan dan konsep koperasi pedesaan. Pemimpin tersebut kemudian mengadopsi gagasan dan konsep tersebut

kemudian mendi fusi kannya di dalam lingkungan komunitasnya.

Perubahan sosial kontak-terarah lazim juga disebut perubahan sosial berencana (Rogers, 1971, h. 9). Dalam hal ini pihak luar secara berencana dan menggunakan teknik-teknik tertentu memperkenalkan inovasi dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu yang diharapkannya. Dalam studi kasus mengenai pengembangan gerakan koperasi pedesaan ini, pihak-atas desa, secara berencana dan menggunakan teknik tertentu, memperkenalkan gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola KUD- Perangkat birokrasi-atas desa dan petugas penyuluh pertama kali memperkenalkan gagasan tersebut, kemudian para pemimpin lokal mengadopsi gagasan itu, selanjutnya mendi fusi kannya di dalam lingkungan komunitasnya.

Perubahan sosial yang terjadi pada suatu sistem dapat terjadi, baik pada tingkat mikro maupun di tingkat makro. Analisis perubahan pada tingkat mikro menggunakan pendekatan mikro analitik yang difokuskan pada perubahan perilaku individu. Perubahan pada tingkat individu tersebut mengacu pada istilah-istilah adopsi, difusi, belajar, sosialisasi, dan akulturasi. Pengembangan gerakan koperasi dalam studi ini menekankan pendekatan analitik mikro yang dikonsentrasikan pada pengembangan wawasan, pengetahuan, aspirasi, nilai-nilai, dan keterampilan individu warga komunitas pedesaan. Mulai dari

diperkenalkannya gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola BUUD/KUD, proses difusi sampai kepada pengembangannya sebagai suatu institusi koperasi, diamati, dipahami, dan diungkapkan maknanya dalam perspektif pendidikan luar sekolah. Prinsip-prinsip mengenai adopsi, difusi, sosialisasi, dan akulturasi yang berasal dari bidang studi komunikasi dan sosiologi merupakan prinsip-prinsip yang diadopsi dan diaplikasikan juga dalam bidang studi PLS. Dalam perspektif PLS, istilah-istilah adopsi, difusi, sosialisasi, dan akulturasi dikaitkan dengan upaya pengembangan wawasan, pengetahuan, dan aspirasi individu agar dapat memahami dan mengendalikan secara lebih baik lingkungan sosial dan okupasinya.

C. Pendidikan Untuk Pembangunan Masyarakat Desa dan Pengembangan Gerakan Koperasi Pedesaan

Pembangunan senantiasa membutuhkan orang-orang yang terdidik dalam arti orang yang berwawasan, berpengetahuan, memiliki keterampilan serta aspirasi untuk maju. Lebih dari satu abad yang lalu pendidikan luar sekolah menjalankan fungsi mengembangkan wawasan, mengalihkan pengetahuan dan keterampilan serta mengembangkan aspirasi warga masyarakat di luar sistem sekolah formal (Coombs, 1978).

Seberapa dasawarsa yang lalu pendidikan luar sekolah kurang mendapat penghargaan berkenaan dengan

potensi yang dimilikinya bagi pembangunan masyarakat- Akan tetapi, dewasa ini disadari tentang peranan yang tidak dapat diberikan oleh sistem sekolah formal dan dapat dipenuhi oleh pendidikan luar sekolah. Peranan yang diberikan pendidikan luar sekolah itu berkaitan, antara lain, dengan pembangunan masyarakat dan/atau pembangunan masyarakat desa, sebagaimana yang dilakukan di Kenya, Mali, Thailand, Korea Selatan, Meksiko, Philipina, dan negara-negara lain.

Berkenaan dengan peranan yang dimainkan oleh pendidikan luar sekolah dalam pembangunan masyarakat, The International Conference on Adult Education and Development yang diselenggarakan di Dar'es Salam, Tanzania, menelorkan Deklarasi Dar'es Salam. Beberapa butir dari deklarasi itu menyatakan, antara lain, sebagai berikut :

(1) Disadari tentang pentingnya pendidikan sebagai sarana dan bagian dari pembangunan.

(2) Jika pendidikan orang dewasa harus memberikan sumbangan pada pembangunan, maka harus merupakan bagian integral dari kehidupan.

(3) Pendidikan orang dewasa harus mendorong perubahan, mulai dengan menumbuhkan kesadaran tentang kebutuhan mereka, dilanjutkan dengan membantu agar mereka mampu memecahkan masalah mereka sendiri. (Hall s Kidd, 1978, h. 27 - 36; Noeng Muhadjir, 1983, h. 25).

Pembangunan masyarakat seringkali sifatnya lebih merupakan pemindahan produk budaya, nilai-nilai, teknologi dari suatu masyarakat atau dari suatu sistem sosial ke masyarakat atau sistem sosial lainnya. Tokoh pendidikan luar sekolah Paulo Freire menggambarkan transfer tersebut sebagai invasi kebudayaan; pihak superior membantu pihak inferior, masyarakat kaya membantu masyarakat miskin, kelompok yang kuat membantu yang lemah, yang berpengetahuan membantu yang tidak berpengetahuan (Freire, 1973, h. vii - xiv; 21 - 29)- Bantuan itu sendiri diperlukan namun sifatnya tidak mendidik karena tidak atau kurang memberikan peluang untuk mempertimbangkan, memahami, dan memilih,

Pendidikan adalah upaya pengembangan sumber daya manusia melalui sistem sekolah formal maupun di luar sistem sekolah- Pada tingkat atau lapisan masyarakat bawah, pendidikan luar sekolah berperan memberikan peluang pengembangan wawasan, aspirasi, pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai agar warga masyarakat mampu memahami masalahnya dan memecahkannya.

Pengembangan gerakan koperasi pedesaan bukanlah terutama upaya memberikan bantuan dana atau modal kepada koperasi. Bukan pula menjadikan koperasi sebagai badan atau lembaga yang secara instrumentalistik terkait dengan perangkat birokrasi. Keadaan yang demikian sebagaimana terjadi pada kebanyakan koperasi pedesaan KUD adalah

bersifat tidak mendidik melainkan menciptakan ketergantungan koperasi terhadap pemerintah.

Pengembangan gerakan koperasi pedesaan pola KUD mengkonsepsikan serangkaian upaya yang bertujuan mengangkat derajat kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Dalam pengertian ini gerakan koperasi pedesaan adalah juga pembangunan masyarakat desa pada sektor kehidupan sosial-ekonomi. Dengan pengembangan gerakan koperasi pedesaan itu diharapkan masyarakat desa akan mengalami perubahan dalam tata kehidupan sosial-ekonominya, dari kecenderungan yang liberalistik kepada suatu tata kehidupan sosial-ekonomi berdasarkan asas kebersamaan, kerja sama, dan solidaritas. Proses yang ditempuh dalam pengembangan gerakan koperasi tersebut menekankan pada upaya pengembangan wawasan, aspirasi, pengetahuan, dan kecakapan warga masyarakat agar mampu bekerja sama dalam kebersamaan dan solidaritas mengelola kehidupan sosial-ekonomi mereka.

Penekanan pada pendekatan pengembangan wawasan, aspirasi, pengetahuan, dan kecakapan warga masyarakat telah dideskripsikan pada hasil penelitian ini. Penggunaan cara pendekatan tersebut berlangsung dan berproses dari saat pemimpin puncak lokal diperkenalkan dengan gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola BUUD/KUD, adopsi dan difusi gagasan dan konsep tersebut, sampai kepada perintisan dan pengembangan institusinya. Pendekatan ini

menempatkan sumber daya manusia pada titik pusat perhatiannya sehingga tampak jelas perspektif pendidikan luar sekolah yang mendasarinya. Dengan demikian, studi ini pada dasarnya hendak menggambarkan kedudukan dan peranan pendidikan luar sekolah dalam pembangunan masyarakat desa yang diinstrumentasikan dengan pengembangan gerakan koperasi pedesaan.

D. Koperasi dan Gerakan Koperasi Indonesia

1. Latar Belakang Sejarah

Sejarah perjalanan koperasi dan gerakan koperasi di Indonesia sudah cukup panjang, jika diperhitungkan saat mulainya ketika H- Aria Wiriaatmadja merintis usaha pertolongan kepada para priyayi yang terjerat utang dari para pelepas uang atau "lintah darat". Usaha pertolongan tersebut dilaksanakannya dengan mendirikan suatu lembaga keuangan, yakni Bank Pertolongan dan Tabungan (Hulp eji Spaar Bank) pada tahun 1906 di Purwokerto. Perjalanan sejarah yang cukup panjang itu ternyata belum menjamin bahwa gagasan dan konsep koperⁱⁱⁱ Indonesia yang sebenarnya, sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 33 UUD 1945, telah cukup membudaya di semua lapisan masyarakat.

Sri-Edi Swasono (1990) menyatakan bahwa masih cukup banyak orang Indonesia yang belum memahami benar tentang arti koperasi dalam kaitannya dengan Demokrasi

Indonesia, baik secara makro maupun secara mikro. Presiden International Cooperative Alliances (ICA) juga menyatakan di depan Kongres ICA di New Dehli pada tanggal 5 Oktober 1939, bahwa salah satu hambatan utama perkembangan koperasi di negara-negara anggotanya yang berjumlah 120 negara ialah karena adanya kekeliruan dalam memahami koperasi (Sri-Edi Swasono, 1990, h.2).

Usaha yang dilakukan oleh R- Aria Wiriaatmadja itu kiranya dapat dipandang sebagai embrio gerakan koperasi di Indonesia. Akan tetapi, proses perkembangannya sebagai suatu pemikiran yang konseptual ke arah perwujudannya menjadi suatu gagasan atau ide dan konsep yang mendasar dan esensial, berlangsung kemudian sejalan dengan perkembangan gerakan kemerdekaan. Dengan perkataan lain, apabila gagasan atau ide serta konsep mengenai koperasi dan gerakan koperasi ditelusuri akarnya, maka akan ditemukan dalam ide dan konsep mengenai negara yang berkedaulatan rakyat, yang merupakan isi serta arah perjuangan Perhimpunan Indonesia semenjak tahun 1920-an. Ide dan konsep mengenai negara yang berkedaulatan rakyat sebagai isi serta arah perjuangan Perhimpunan Indonesia, semakin dipertegas di bawah kepemimpinan Bung Hatta pada tahun 1926-1930. Selanjutnya, dalam rangka persiapan kemerdekaan, ide dan konsep kedaulatan rakyat itu diintroduksikan ke dalam UUD 1945 oleh Bung Hatta bersama para pendiri republik ini.

Dalam konteks UUD 1945, maka negara yang kita dirikan adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan atas paham kedaulatan rakyat itu, maka pemerintahan yang akan dibentuk di dalam Indonesia Merdeka adalah pemerintahan rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat atau demokrasi.

Dari uraian di atas kiranya jelas bahwa koperasi di Indonesia mempunyai latar belakang sejarah perjuangan nasional. Semenjak masa penjajahan para pemimpin Indonesia telah menyakini pentingnya koperasi sebagai organisasi ekonomi untuk memperbaiki kedudukan dan martabat kehidupan sosial-ekonomi rakyat. Dalam rangka perjuangan nasional, koperasi di Indonesia mempunyai peranan menegakkan kedaulatan ekonomi sejalan dengan upaya menegakkan kedaulatan politik untuk mencapai kemerdekaan. Dengan bertitiktolak dari kedaulatan ekonomi itulah lahirnya paham demokrasi ekonomi, yang pada hakekatnya bertentangan dengan paham individualisme, liberalisme, kapitalisme, maupun demokrasi rakyat yang marxistis.

2. Paham Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Salah satu tujuan kemerdekaan nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan rakyat, sebagaimana disebutkan pada alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Paham kedaulatan rakyat Indonesia pada prinsipnya

tidak sama dengan paham kedaulatan rakyat yang dianut di Barat. Bahkan dapat dikatakan bahwa prinsip dasarnya bertentangan satu sama lain. Kedaulatan rakyat Indonesia didasarkan atas paham integralisme, sedangkan kedaulatan rakyat di Barat didasari paham individualisme.

Dalam proses penyusunan UUD 1945 mengiringi usaha persiapan kemerdekaan, isu integralisme^r itu muncul pertama kali dari Prof. Soepomo. Ia mengajukan teori integralistik yang berasal dari pandangan para pemikir Barat, seperti Spinoza, Adam Muller, Hegel, dan lain-lain, pada tanggal 31 Mei 1945. Dikaitkan dengan semangat ke-Indonesiaan yang asli, maka menurut teori itu, negara adalah masyarakat seluruhnya atau rakyat Indonesia seluruhnya sebagai satu kesatuan dan persatuan yang tersusun serta teratur. Pada tanggal 15 Juli 1945 Bung Hatta menyampaikan saran yang bersifat mengoreksi dan melengkapi terhadap pandangan yang dikemukakan Soepomo tersebut. Menurut Bung Hatta, di dalam kolektivisme tetap ada hak bagi individu-individu anggota, seperti hak untuk menyatakan pendapat sehingga kekuasaan lembaga kolektif itu tidak menjadi cenderung mutlak atau tidak tak terbatas. Demikianlah, dalam rumusan UUD 1945, sebagaimana dapat kita lihat sekarang, hak-hak asasi warga negara itu dicantumkan pada pasal-pasal 27, 28, 29 dan 31 (Sri-Edi Swasono, 1990, h. 14-15).

Hak-hak asasi individu warga negara dalam UUD 194[^]

tersebut meliputi hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak untuk berkumpul dan menyatakan pendapat, hak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta hak untuk mendapatkan pengajaran.

Masalah perimbangan hubungan antara individu dengan masyarakat dan/atau negara, sesungguhnya merupakan masalah klasik, yang sudah menjadi pemikiran dan perdebatan para filosof, pemikir dan ilmuwan berpuluh-puluh abad lamanya. Pada umumnya orang-orang pandai tersebut mula-mula lebih banyak berfikir secara filosofis, dan memusatkan perhatiannya terutama pada sifat negara dan pada hubungan manusia perseorangan terhadap pemerintahan negara. Dalam garis besarnya para pemikir tersebut dapat digolongkan ke dalam dua aliran, yakni beraliran individualistik dan kolektivistik. Kelompok yang pertama diwakili oleh, antara lain, Callicles, Plato, Aristoteles di zaman Yunani, Nietzsche di abad kesembilan belas dan kemudian tokoh yang terkenal yang masih digolongkan ke dalam aliran ini adalah Rousseau. Pemikir aliran individualitis yang dipandang ekstrim ialah Epicurus dan pengikut-pengikutnya. (341-270 s.M.). Mereka bersikap dingin terhadap negara, mereka tidak peduli bagaimana bentuk dan susunan pemerintahan suatu negara, asal saja negara mampu menjamin ketertiban dan kesejahteraan warga negara. Dengan pembahasannya

mengenai peristiwa-peristiwa masyarakat yang terjadi sebagai dampak hubungan antarsesama manusia, kaum Epicurus ini kelak banyak mempengaruhi paham rasionalistis dari ajaran perjanjian masyarakat atau kontrak sosial dengan tokohnya yang sangat terkenal, yaitu J.J. Rousseau. Paham individualisme dari Rousseau berpendapat bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan bebas merdeka dan selayaknya hidup secara bebas merdeka melaksanakan kehendaknya sepanjang tidak mengganggu keamanan dan ketentraman orang lain.

Ajaran mengenai perjanjian masyarakat ini tidak dapat dipisahkan dengan nama Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Paham ini sebenarnya bersandar pada kepercayaan mengenai hukum alam yang dalam keadaan ideal dipandang menjamin kemerdekaan dan persamaan di antara manusia. Dalam tulisannya, *Kontrak Sosial* (1762), ia menganjurkan kedaulatan rakyat berdasarkan suatu perjanjian di antara manusia-manusia yang diperintah dengan yang memerintah. Berdasarkan pokok pemikiran ini ia mengambil kesimpulan bahwa penerimaan atau penolakan peraturan dan undang-undang bergantung pada kemauan bebas warga negara sendiri. Apabila terjadi pertentangan kepentingan antara rakyat dengan pemerintah, Rousseau menganjurkan penggunaan kehendak umum sebagai mekanisme untuk mendorong warga negara mematuhi peraturan atau undang-undang atas dasar keinsyafan, bahwa dengan mengabdikan kepada kepentingan umum

itu, maka berarti seseorang warga negara itu telah bekerja ke arah kepentingannya sendiri.

Meskipun ajaran Rousseau tetap menganjurkan kepatuhan individu kepada kehendak umum, namun karena secara konsekuen mengutamakan individu/perseorangan sebagai sumber segala kekuasaan pemerintahan, maka ajaran tersebut tetaplah digolongkan ke dalam teori-teori yang individualistis (Lysen, 1981, h. 48-56).

Kaum Stoa dalam abad ketiga sebelum Masehi sudah mengajarkan paham yang pada dasarnya dapat digolongkan sebagai kolektivistik. Dalam ajaran kaum Stoa itu diakui bahwa manusia individu tunduk kepada masyarakat, tetapi juga mengakui persamaan derajat individu sebagai anggota masyarakat. Namun demikian, keanggotaan individu itu bukan lagi sebatas sebagai anggota negara-kota, melainkan sebagai anggota negara-dunia (cosmopolis}.

Pada awal abad kesembilan belas muncul suatu aliran filsafat yang ajarannya bersifat idealistis. Dalam ajaran idealistis yang dikemukakan oleh J.G. Fichte (1762-1814) terjadi peralihan dari filsafat individualistis sebagaimana diajarkan oleh Immanuel Kant, ke filsafat universalistis seperti yang diajarkan Hegel. J.G. Fichte mencoba membuat suatu sintesis antara etika individualistis dengan etika yang anti-individualistis, antara individualisme dengan universalisme, atau dalam arti

sosial politik, antara liberalisme dengan sosialisme, yakni liberalisme yang tidak individualistis.

Pandangan kemasyarakatan yang juga bersifat idealistis ialah dari G.W.F. Hegel. (1770-1831). Dalam pandangan Hegel ini tidak terdapat unsur individualisme. Menurut Hegel masyarakat dalam arti yang sederhana berakar dalam keluarga dan memuncak dalam negara. Etika Hegel pada hakikatnya bersifat etika sosial.

Tokoh pemikir lain dari kubu universalisme ialah Adam H. Muller (1779-1829). Ia menolak individualisme ekonomi dari Adam Smith dan menolak liberalisme dalam segala perwujudannya. Organisasi politik yang paling baik menurut Muller ialah suatu negara nasional yang korporatif yang terdiri dari golongan-golongan sekerja atau tingkatan-tingkatan dalam kehidupan sosial.

Auguste Comte (1798-1857) yang dipandang sebagai peletak -dasar positivisme, menggambarkan masyarakat sebagai organisme yang hidup, dalam mana manusia perseorangan hanya merupakan suatu bagian yang abstrak dan tidak merupakan suatu kenyataan yang berdiri sendiri. Bukan manusia perseorangan melainkan keluargalah yang merupakan unsur pembangunan organisme sosial. Pandangan ini merupakan pandangan universalistis murni.

Di Perancis kemudian berkembang mazhab antropo-sosiologis. Pelopornya ialah A de Gobineau (1816-1882). Bagi de Gobineau dan pengikutnya, bangsa atau ras itulah

yang merupakan faktor yang menguasai keseluruhan mekanisme pergaulan dan peristiwa dalam masyarakat. Karena ia mengutamakan bangsa sebagai kesatuan sosial, maka pandangan ini digolongkan sebagai kolektivistik.

Sebenarnya aliran atau pandangan-pandangan yang digolongkan ke dalam aliran kolektivistik sangat beraneka ragam. Karl Marx (1818-1883) misalnya, berbeda dengan de Gobineau, karena ia cenderung rasional-obyektif.

Karl Marx bermaksud melaksanakan suatu bentuk kolektivisme yang ekonomis-politis dan yang rasional-obyektif. Pandangannya merupakan sintesis antara individualisme yang liberal-ekonomis dengan kolektivisme perburuhan yang kapitalis. (Lysen, 1981, h. 59-63). Dasar pemikiran Marxisme dibangun di atas dasar materialisme-dialektik-historis. Sejak mula yang ada ialah materi, sehingga ajarannya berkembang menjadi nir-religi. Dinamika perkembangan masyarakat berlangsung melalui proses dari tesis, antitesis, dan sintesis, sedangkan secara substansial sejarah perkembangan masyarakat adalah konflik dan perjuangan kelas. Dalam konflik dan perjuangan kelas itu berhadap-hadapan antara kelas atas dan kelas bawah, atau antara kaum kapitalis yang menguasai seluruh aset produksi dan kelas pekerja (proletar) yang hanya memiliki tenaga dan menjadi tereksplorasi dalam proses produksi.

Tampaknya para pernikir-pejuang kita telah

mempelajari dan mengambil makna dari pergolakan pemikiran mengenai perihal kemasyarakatan dan sistem pemerintahan, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan. Bung Hatta, salah satu di antara para pemikir-pejuang kita itu, secara arif kemudian mengembangkan paham kedaulatan rakyat dalam semangat keindonesiaan sebagai acuan bagi sistem kemasyarakatan dan kenegaraan. Paham kedaulatan rakyat sudah semenjak masa pergerakan kemerdekaan menjadi anutannya dan dijadikan arah perjuangannya.

Menurut paham kedaulatan rakyat tersebut, maka yang utama adalah rakyat dalam arti rakyatlah yang mempunyai kedaulatan atau kekuasaan atas dirinya dan negaranya dalam hubungannya dengan kehidupan ekonomi, politik maupun dalam pergaulan sosial. Paham ini mengajarkan demokrasi Indonesia, yakni demokrasi Pancasila, yang hendak diwujudkan dalam alam Indonesia merdeka.

Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi di negara-negara Barat yang juga berdasarkan kedaulatan rakyat. Perbedaan ini terutama adalah karena asas kedaulatan rakyat di Barat mengacu kepada paham individualisme, sedangkan asas kedaulatan rakyat yang kita anut mengacu kepada paham integralisme menurut istilah Prof. Soepomo atau paham kolektivitas.

Paham demokrasi Pancasila yang integralistik itu disamping bernafaskan asas kerakyatan, maka sesungguhnya juga tidak terlepas dari semangat keagamaan dan keber-

agamaan. Pembukaan UUD 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan yang dicapai melalui perjuangan itu, juga adalah karena berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa. Dengan asas kerakyatan yang berpaham integralistik itu, kita menolak individualisme oleh karena semangat individualisme akan memajukan sistem politik liberalisme yang pada gilirannya memperkuat semangat kapitalisme. Sedangkan kapitalisme yang bekerjasama dengan feodalisme terbukti dalam sejarah sebagai kekuatan yang mendalangi proses pemelaratn rakyat Indonesia.

Pengakuan bahwa kemerdekaan yang dicapai melalui perjuangan yang dipelopori oleh para pernikir-pejuang itu, juga adalah karena berkat rahmat Allah, bukanlah suatu pengakuan kosong belaka. Semangat keagamaan (khususnya Islam) dan keberagaman umumnya sudah merupakan bagian dari citra diri dan jati diri bangsa Indonesia. Bahkan asas kerakyatan dalam konteks keindonesiaan tidak terlepas dari semangat keagamaan-keislaman. Berbagai perang-perlawanan rakyat terhadap penjajah Belanda digerakkan dan dipimpin oleh ulama/kyai merupakan bukti sejarah kekentalan semangat keagamaan dan keberagaman bangsa Indonesia. Jiwa keagamaan yang mewarnai asas kedaulatan rakyat itu pula yang mendasari penolakan terhadap Marxisme sebagai paham kemasyarakatan dan kenegaraan di Indonesia.

Sebagaimana telah disinggung terdahulu bahwa

menurut paham kedaulatan rakyat yang memegang kekuasaan atau kedaulatan ialah rakyat. Atas dasar itu, maka pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintah oleh rakyat atau demokrasi. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, sehingga demokrasi Indonesia yang pancasilais itu adalah demokrasi rakyat.

Paham demokrasi Indonesia yang dikembangkan oleh Bung Hatta mencakup dimensi kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik. Dalam pengertian ini tidak mungkin terjadi atau dibiarkan terjadi rakyat yang banyak berdaulat secara politis tetapi tertindas secara ekonomis. Apabila hal yang demikian terjadi, maka berarti terdapat kekeliruan atau penyimpangan sistematis, strategi, dan/atau kebijaksanaan dalam perekonomian. Kenyataan yang demikian tidak sesuai dengan cita-cita perjuangan para pendiri republik kita. Kemerdekaan yang diproklamirkan adalah dimaksudkan mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Setiap keadaan ketertindasan, baik politik, ekonomi, maupun sosial adalah bertentangan dengan pesan konstitusi tersebut.

3. Paham Demokrasi Ekonomi Indonesia

Azas kerakyatan dan paham kedaulatan rakyat merupakan pangkal tolak bagi paham demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia berbeda dengan demokrasi yang dikenal

di negara-negara Barat, oleh karena paham kedaulatan rakyat yang merupakan pangkal tolaknya pun berbeda. Sebagaimana telah dikemukakan, paham kedaulatan rakyat di negara-negara Barat berdasarkan individualisme, sedangkan paham kedaulatan rakyat Indonesia berdasarkan integralisme, yang mengutamakan kepentingan rakyat keseluruhan dengan tidak mengabaikan hak asasi individu orang seorang.

Kedaulatan rakyat Indonesia mempunyai tujuan melekat, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Di dalam konsep keadilan sosial tersebut sebenarnya tercakup prinsip keadilan di dalam semua lapangan kehidupan. Keadilan yang dikehendaki adalah bagi seluruh rakyat, baik di bidang politik, di bidang hukum, ekonomi, pendidikan maupun di bidang kehidupan kemasyarakatan pada umumnya. Di bidang politik, rakyat harus mendapatkan perlakuan adil dalam kesempatan dan hak untuk memilih dan dipilih. Di bidang pendidikan, rakyat harus diperlakukan adil dalam kesempatan mendapatkan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya. Di bidang hukum, rakyat harus memperoleh persamaan kedudukan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Di bidang ekonomi, rakyat harus diperlakukan adil dalam kesempatan memiliki aset ekonomi dan dana pembangunan, diperlakukan adil dalam kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, dalam menikmati hasil pembangunan, dan lain sebagainya.

Dalam proses penyusunan UUD 1945 sebagai bagian dari pada usaha persiapan kemerdekaan, paham demokrasi ekonomi dimasukkan dalam perumusan, yakni pasal 33 yang bersama-sama dengan pasal 34 berada di bawah judul Kesejahteraan Sosial. Dengan demikian secara ideologis dan secara struktural demokrasi ekonomi Indonesia mendapatkan keabsahan konstitusional.

Di dalam penjelasan UUD 1945 antara lain dinyatakan bahwa ;

"Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.

Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang! Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasnya.

Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang.

Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."

Kesejahteraan Sosial yang menjadi judul bab bagi sistem perekonomian dalam UUD 1945 menegaskan secara tersurat bahwa semua kebijakan, upaya dan tindakan yang menyangkut kehidupan perekonomian, pada akhirnya harus menjadikan kesejahteraan sosial itu sebagai realitas kehidupan yang dialami dan dihayati rakyat banyak. Apabila

keadaan sejahtera itu hanya dialami dan dihayati oleh sebagian kecil dari warga negara, maka itu berarti terdapat kekeliruan atau penyimpangan, baik yang bersifat sistemik maupun yang bersifat strategi atau kebijakan.

Sistem ekonomi kesejahteraan sosial dalam konteks UUD 1945 itu menghendaki perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perkataan disusun mengisyaratkan penolakan terhadap prinsip dan praktek laissez faire. Sebagaimana diketahui prinsip ini menghendaki agar pemerintah suatu negara tidak terlalu mencampuri, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan atau aktivitas warga negaranya. Kesejahteraan individu dan kelompok sebaiknya dicapai dengan jalan persaingan demi kepentingan masing-masing.

Pandangan yang liberalistik demikian itu bertolak belakang sama sekali dengan Demokrasi Ekonomi Indonesia, sebagaimana dikehendaki pasal 33 UUD 1945. Perkataan disusun seperti diungkapkan dalam kalimat: perekonomian disusun, justeru mewajibkan pengambil keputusan, yakni dalam hal ini pemerintah untuk bertindak menata kehidupan perekonomian. Tindak penataan tersebut menyangkut sistem perekonomian itu sendiri serta strategi dan kebijakan yang diperlukan bagi terwujudnya kesejahteraan sosial, dan bukan bagi terwujudnya kesejahteraan segelintir orang.

Tindak penataan sistem, strategi, dan kebijakan perekonomian wajib dilakukan oleh pemerintah, dan bukannya

membiarkan kehidupan perekonomian itu berjalan semata-mata menurut kehendak mekanisme pasar. Tanpa tindak penataan secara nyata terutama yang sifatnya paling mendasar, yakni secara sistemik dan membiarkan saja kehidupan perekonomian tertata menurut kehendak mekanisme pasar akan menyebabkan kesenjangan dan ketidakmerataan, di mana yang kuat menyisihkan yang lemah.

Persaingan yang saling mematikan dan menyisihkan yang demikian bertentangan dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, sebagaimana diamanatkan ayat 1 pasal 33 UUD 1945. Selain menjadi amanat konstitusi, kebersamaan dan kekeluargaan adalah karakteristik kepribadian bangsa Indonesia. Membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, atau menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat bagi setiap bangsa sudah barang tentu tidak dimaksudkan untuk merusak ciri kepribadian bangsa yang bersangkutan. Kecuali apabila ciri kepribadian tersebut tidak dipersepsi sebagai suatu nilai yang luhur.

Nilai kebersamaan dan kekeluargaan bagi bangsa Indonesia merupakan warisan budaya (cultural heritage), yang tetap dipandang sebagai suatu nilai yang luhur- Hanya bagi orang yang menggunakan paradigma Barat yang mengatakan bahwa mempertahankan semangat dan kekeluargaan adalah suatu upaya yang bersifat nostalgia dan sia-sia. Kesimpulan yang demikian sesungguhnya dapat dimengerti, oleh karena paradigma Barat bersifat individualistik yang

merupakan lawan dari cara pandang integralistik demokrasi Indonesia.

Semangat kebersamaan, kerjasama, dan/atau solidaritas sebagai suatu warisan budaya leluhur, digambarkan keharusannya (kemestiannya) menjadi akhlak (moral conduct) secara sangat baik dalam ungkapan Bugis Makassar: malilu sipakainge, mali siparappe, telleng sipaoriang. Ungkapan itu dapat diterjemahkan secara harfiah, khilaf saling mengingatkan, hanyut saling mendamparkan, tenggelam saling mengapungkan. Kalimat itu menyiratkan betapa kritis pun situasi yang dihadapi (hanyut, tenggelam), kebersamaan, dan atau solidaritas tetap harus diupayakan aktualisasinya. Kalimat itu sekaligus menyiratkan akhlak untuk tidak bermaksud selamat (survive) sendiri dalam situasi yang paling kritis sekalipun, melainkan tetap berusaha saling menyelamatkan.

Akhlak seperti itu tampaknya bersifat universal, dianut dalam tradisi pelayaran Internasional. Salah satu kode etik profesi nahkoda, menyatakan bahwa ia wajib menyelamatkan seluruh penumpang, sehingga ia menjadi orang yang terakhir meninggalkan kapal manakala kapalnya mengalami musibah tenggelam.

Suatu ungkapan lain dalam bahasa Bugis yang senafas dengan semangat kebersamaan, ialah pada idi pada elo, sipatuo sipatokkong. Secara harfiah dapat diterjemahkan; sesama kita saling menghendaki, saling menghidupkan saling

menegakkan. Kalimat ini menyiratkan akhlak usaha bersama dan/atau kebersamaan, sekaligus menolak persaingan bebas yang saling menyisihkan dan mematikan yang menjadi ciri individualisme.

Demokrasi Indonesia yang bersendikan kebersamaan dan kekeluargaan itu, dengan demikian dapat ditelusuri pula akarnya pada nilai budaya daerah (lokal). Nilai budaya lokal itulah yang diaktualisasikan menjadi akhlak para perintis dan penyelenggara KUD di desanya.

Demokrasi ekonomi itu selanjutnya melahirkan koperasi sebagai bangun usaha yang sesuai, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945 yang telah dikutipkan di atas.

4. Pemantapan Pemahaman Koperasi Indonesia

Penjajahan yang dialami rakyat Indonesia selama berabad-abad menyebabkannya terbelakang, dan dengan keterbelakangannya itu mereka menjadi miskin. Pemerintah penjajahan tidak menyelenggarakan program yang secara sungguh-sungguh bermaksud mencerdaskan rakyat jajahannya.

Terhadap keadaan yang demikian, para pemimpin pergerakan yang padu umumnya pernikir-pemikir pejuang berkesimpulan bahwa arah dan isi perjuangan mereka haruslah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat sebagai lawan dari rakyat yang didaulat adalah kunci utama untuk mengatasi kemiskinan dan kesengsaraan

mereka. Hanya dengan kedaulatan yang berada di tangan rakyat, baik dalam kehidupan politik, ekonomi maupun dalam kehidupan sosial umumnya, martabat hidup mereka dapat diangkat dan ditinggikan.

Paham kedaulatan rakyat yang merupakan arah dan isi perjuangan pergerakan kemerdekaan itu, kelak kemudian menjadi paham kenegaraan kita.

Paham kedaulatan rakyat dalam bidang kehidupan politik melahirkan paham demokrasi politik. Dengan demokrasi politik itu tidak dibenarkan adanya pemusatan kekuatan di tangan segelintir orang (otokrasi politik). Demikian pula dengan paham kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi melahirkan paham demokrasi ekonomi. Dengan demokrasi ekonomi tidak dibenarkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada kalangan tertentu, (otokrasi ekonomi), karena keadaan demikian tidak mencerminkan keadilan sosial, dan selanjutnya dapat menjauhkan rakyat dari keadaan sejahtera.

Demokrasi ekonomi sesungguhnya hanya mungkin diwujudkan dengan melalui koperasi. Konsistensi alur pemikiran dari konsep kedaulatan rakyat, demokrasi ekonomi dan koperasi adalah tepat adanya. Penjabaran paham demokrasi ekonomi ke dalam konsep koperasi mencakup pengertian sistemik dan substantif. Dalam pengertian sistemik di sini adalah dimaksudkan bahwa sistem perekonomian kita disusun, ditata, serta diselenggarakan

sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan - Di dalamnya terdapat keterkaitan usaha di antara semua pelaku ekonomi, semua wadah kegiatan ekonomi, semua sektor ekonomi dan menjangkau seluruh tumpah darah Indonesia. Dengan demikian, tercermin keikutsertaan semua komponen, semua pihak, semua lapisan dan meliputi seluruh kawasan tanah air, di dalam upaya pembangunan menuju kesejahteraan yang berkeadilan.

Koperasi diidentifikasi sebagai usaha kerjasama yang terutama ditunjukan untuk menolong diri sendiri secara bersama-sama, terutama di antara golongan ekonomi lemah. Kegiatannya dititikberatkan pada pelayanan dan pemenuhan kebutuhan serta kesejahteraan bersama para anggotanya, dan bukannya terutama untuk mencari laba. Dalam hal yang terakhir inilah terletak perbedaan koperasi dengan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi yang lain, seperti firma, PT, CV, dan-lain-lain. Ciri lain yang khas pada koperasi dan yang membedakannya dengan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi lainnya ialah bahwa koperasi bukanlah terutama perkumpulan modal melainkan perkumpulan orang, sehingga aset utamanya adalah sumber daya manusia. Selain itu, koperasi mengutamakan manfaat {benefit} bagi anggota-anggotanya, dan bukannya mengutamakan laba (profit): karena itulah maka perolehan laba pada akhir tahun di koperasi dinamakan Sisa Hasil Usaha (SHU). Jika perolehan SHU itu dipandang sebagai hasil keuntungan bagi anggota

koperasi, maka pada dasarnya ia telah mendapatkan keuntungan dua kali, karena sebelumnya pun ia telah menikmati manfaat pelayanan dari koperasinya.

Sebagaimana telah dikemukakan aset utama koperasi adalah sumber daya manusia, tidaklah berarti modal uang tidak dianggap penting. Sebagai badan usaha ekonomi tentulah diperlukan modal. Akan tetapi penggunaan modalnya tidak boleh mengurangi makna dan pengertian tersebut, serta mengabdikan kepada perikemanusiaan, dan bukan kepada kebendaan.

Implikasi dari pengertian koperasi sebagai kumpulan orang ialah berlakunya prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan, yakni berdasarkan satu orang satu suara (one man one vote). Hal ini juga merupakan ciri pokok yang membedakan koperasi dengan badan usaha ekonomi lainnya yang bersifat kumpulan modal. Pada jenis badan usaha seperti yang disebutkan terakhir berlaku satu saham satu suara (one share one vote). sehingga yang terjadi ialah besar kecilnya penyertaan saham menentukan besar kecilnya suara di dalam pengambilan keputusan perusahaan. Selanjutnya, dengan demikian, maka yang menjadi pemegang saham yang paling besar akan mendapat keuntungan yang paling besar pula.

Besar kecilnya penyertaan modal pada badan usaha nonkoperasi itu juga menentukan besarnya keuntungan yang

dibagikan. Sedangkan pada koperasi, perolehan SHU diatur menurut atau sebanding dengan jasa yang diberikan oleh masing-masing anggota kepada koperasinya.

Dilihat dari perolehan keuntungan' pemegang saham pada badan usaha non-koperasi, mungkin jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan perolehan SHU bagi anggota koperasi. Namun demikian, para anggota koperasi sebelumnya telah menikmati pelayanan dari koperasinya.

Meskipun koperasi merupakan organisasi ekonomi, namun watak sosialnya juga menonjol karena ia mengutamakan kepentingan orang banyak, yakni keseluruhan anggotu. Bukannya mengutamakan kepentingan perorangan. Walaupun seseorang memiliki simpanan paling besar jumlahnya dalam koperasi, hak suaranya adalah tetap satu, sesuai dengan prinsip demokrasi satu orang satu suara.

Pengertian koperasi seperti digambarkan di atas, adalah berdasarkan tinjauan dari dimensi mikro, melihat koperasi sebagai institusi atau lembaga.

Koperasi dalam pengertian sistemik telah disinggung sebelumnya, yakni sebagai sistem perekonomian yang tersusun, tertata, dan terselenggara sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Di dalamnya terdapat keterkaitan usaha (kemitraan) di antara semua wadah dan pelaku ekonomi, semua sektor yang terkait dan menjangkau seluruh wilayah negara Indonesia. Pengertian koperasi demikian adalah berdasarkan tinjauan makro.

Koperasi juga dapat dipahami sebagai paham usaha kemandirian atau keswadayaan dan kesetiakawanan atau solidaritas. Dalam pengertian ini koperasi dipersepsi sebagai "gerakan untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, yakni demokrasi ekonomi.

Salah satu dari aspek koperasi yang juga banyak kali ditonjolkan Bung Hatta ialah aspek koperasi sebagai institusi kependidikan. Dengan koperasi, orang dididik mengutamakan kepentingan bersama dalam mengejar kepentingan sendiri. Dengan berkoperasi, orang dididik agar memiliki kesadaran sosial dan tanggung jawab sosial. Sikap dan perilaku demokratis juga dapat ditumbuhkan melalui aktivitas partisipatif di dalam koperasi. Sesungguhnya hanya orang-orang yang cukup memiliki kesadaran sosial, tanggung jawab sosial dan tanggung jawab moral, serta memiliki semangat demokratis dapat diharapkan menghidupkan koperasi. Koperasi juga diharapkan menjadi ajang pendidikan untuk menumbuhkan nilai individualitas di samping nilai solidaritas di kalangan anggota-anggotanya. Kesadaran akan martabat atau harga diri dari kepercayaan pada diri sendiri (self reliance) perlu dimiliki oleh seseorang agar ia mau berusaha memperbaiki nasib hidupnya dengan kemampuannya sendiri. Tanpa kesadaran akan harga diri dan kepercayaan pada diri sendiri (individualita), maka seseorang akan menjadi manusia apatis.

Berbagai nilai dan kualitas personal, seperti dikemukakan di atas, tidak menjadi persoalan bagi badan-badan usaha nonkoperasi. Sebaliknya, hal itu sangat diutamakan bagi koperasi, sesuai dengan hakekat koperasi sebagai organisasi yang aset utamanya adalah sumber daya manusia (human resource)•

Pendidikan bukan dalam arti schooling melainkan Pendidikan Luar Sekolah {PLS}, sesungguhnya terjalin erat dengan gerakan koperasi di Indonesia. Pendekatan pendidikan luar sekolah yang terutama dalam hal ini ialah upaya penyadaran (ccncientization) dan pendidikan luar sekolah sebagai empowering process.

Konsep concientization (Preire, 1972) dalam PLS menekankan pengembangan kesadaran subyek didik untuk menyadari realitas diri dan lingkungannya dengan menggunakan teknik pengajuan masalah (problem possing). Dengan teknik ini, subyek didik dihadapkan kepada atau diperlihatkan kepadanya masalah yang ada pada dirinya dan psda lingkungannya. Selanjutnya, dengan berdasarkan kepada kesadaran akan realitas dirinya dan lingkungannya itu, subyek didik diarahkan dan didorong untuk aktif berusaha memecahkan masalahnya atau memenuhi kebutuhannya. Dalam pada itu konsep empowering process (Kindervantter, 1979) dalam PLS diartikan sebagai upaya pemeroleha,n kemampuan bagi seseorang, kelompok masyarakat atau bangsa untuk memahami dan mengendalikan keadaan Eosial, ekonomi,

dan politik mempengaruhi kehidupannya, demi untuk meningkatkan martabat atau derajat kehidupannya.

Perjuangan gerakan koperasi di Indonesia sebagaimana terlihat dari sejarahnya, sangat sering menampilkan dimensi sebagai gerakan yang bersifat pendidikan. Para pemimpin pergerakan kemerdekaan semenjak masa penjajahan banyak melakukan pidato dan penyuluhan untuk menyadarkan rakyat mengenai realitas **diri** dan masyarakatnya sebagai rakyat jajahan. Sebagai rakyat yang terjajah itu, mereka menjadi miskin dan terkebelakang, sedangkan cara mengatasinya ialah dengan perjuangan nasional untuk menegakkan kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi. Dengan cara itu rakyat diajak mengidentifikasi masalahnya, yaitu status sebagai rakyat jajahan, serta mengidentifikasi kebutuhannya, yaitu menegakkan kedaulatan rakyat, atau mengganti daulat tuanku penjajah menjadi daulat rakyat, baik dalam kehidupan politik maupun dalam kehidupan ekonomi.

Selanjutnya, melalui koperasi yang dibentuk kemudian di beberapa tempat, rakyat dilibatkan dalam proses pembelajaran, yakni belajar bekerjasama untuk menolong diri mereka sendiri memperbaiki taraf hidup serta memperkuat kedudukan ekonomi mereka. Hakikat pembelajaran yang demikian mengacu kepada konsep **learning by doing** (Dewey).

Pengembangan gerakan koperasi pedesaan yang menjadi

pusat perhatian dalam penulisan Disertasi Ini, pada dasarnya diamati dalam perspektif pendidikan luar sekolah. Pembelajaran pada tingkat awal dimaksudkan untuk mengintroduksikan ide dan konsep koperasi pedesaan pola KUD kepada pemimpin panutan di desa. Melalui pemimpin panutan tersebut, ide dan konsep koperasi pedesaan didifusikan kepada kelompok elit pedesaan, dan baru kemudian didifusikan lebih lanjut kepada khalayak lebih luas, baik melalui kelembagaan koperasi maupun di luarnya. Bagi lingkungan pedesaan yang umumnya mengenal kepemimpinan panutan pola pengembangan yang demikian, tampaknya lebih sesuai.

Pola pengembangan yang lain ialah, misalnya, dengan merekrut tokoh elit di desa untuk membentuk koperasi dengan menyediakan fasilitas (kredit, saprodi, dll), dengan asumsi bahwa rakyat pedesaan dengan sendirinya akan bergabung menjadi anggota melalui kegiatan pelayanan yang diberikan oleh koperasi, dengan atau tidak dengan kegiatan penyuluhan.

5. Distorsi dan Involusi Pemahaman dan Persepsi tentang Koperasi

Di bagian terdahulu telah disinggung bahwa masih banyak orang yang belum atau tidak memahami secara benar konsep mengenai koperasi dan kedudukan sentralnya dalam kehidupan kenegaraan kita.

Persepsi yang menyimpang dan keliru mengenai konsep koperasi itu dan kedudukan sentral koperasi dalam kehidupan kenegaraan kita, menyangkut beberapa hal, yaitu,

- (1) Mengenai pengertian tentang watak sosial koperasi
- (2) Rasionalitas badan usaha koperasi
- (3) Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian
- (4) Kedudukan koperasi di antara wadah kegiatan ekonomi lainnya dalam sistem ekonomi Indonesia.

(1) Watak Sosial Koperasi

Dalam Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Perkoperasian disebutkan bahwa koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Istilah watak sosial ini seringkali disalahartikan, yakni dipadankan dengan pengertian kedermawanan (charity). Berdasarkan distorsi pengertian inilah sehingga koperasi lebih dipersepsi sebagai organisasi sosial ketimbang sebagai organisasi ekonomi.

Sesungguhnya yang dimaksud dengan organisasi ekonomi yang berwatak sosial ialah bahwa yang diutamakan didalamnya adalah kepentingan orang banyak atau anggota secara keseluruhan. Bukan individu orang-seorang yang diutamakan, meskipun ini tidak berarti bahwa hak-hak individu anggota diabaikan. Prinsip ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari paham Demokrasi Indonesia sebagaimana diisyaratkan oleh UUD 1945. Demokrasi

Indonesia bersendikan paham kedaulatan rakyat Indonesia yang integralistik. Paham integralisme ini adalah paham yang mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan kepentingan orang-seorang. Demikianlah, maka paham kedaulatan rakyat Indonesia itu mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan orang-seorang, tanpa harus mengabaikan kepentingan orang-seorang secara semena-mena sebagaimana telah dikemukakan di atas,

{2) Rasionalitas Badan Usaha Koperasi

Sesungguhnya koperasi sebagai badan usaha ekonomi, juga tunduk kepada hukum-hukum ekonomi dan prinsip-prinsip manajemen perusahaan serta kaidah-kaidah bisnis lainnya. Koperasi sama sekali tidak mengecualikan diri dalam hal hukum-hukum dan prinsip-prinsip tersebut. Koperasi juga tidak menghendaki usahanya merugi seperti halnya organisasi ekonomi lainnya. Karena itu koperasi tidak dapat disangkal merupakan badan usaha yang realistik dan rasional.

Namun demikian terdapat perbedaan dengan PT, CV, Firma, dan lain sebagainya. Jenis badan usaha ini bertitik tolak dari paham individualisme, yakni berdasarkan asas perorangan. Kepentingan yang diembannya adalah terutama kepentingan perorangan tertentu, yaitu pemilik modal umumnya, khususnya pemilik modal yang paling besar. Berkaitan dengan itu maka mekanisme pengambilan keputusan didasarkan atas besar-kecilnya penyertaan modal dalam

perusahaan yang bersangkutan. Besar-kecilnya penyertaan modal menentukan banyak-sedikitnya suara dalam proses pengambilan keputusan itu (one share one vote?). Dengan demikian, maka pemegang saham yang paling besar akan menguasai jalannya badan usaha tersebut, termasuk dalam hal kebijaksanaan pembagian keuntungan.

Berlainan dengan itu, koperasi justru bertitik tolak dari prinsip kebersamaan dan asas kekeluargaan yang bersifat integralistik. Kefentingan yang diembannya adalah kepentingan bersama, yaitu keseluruhan anggota, bukan kepentingan perorangan. Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah mufakat sesuai dengan prinsip demokrasi, berdasarkan satu orang satu suara (one man one vote).

Koperasi merupakan persekutuan orang, bukan persekutuan modal seperti halnya dengan PT dan perusahaan non-koperasi lainnya. Modal utama koperasi adalah sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang bersepakat untuk bekerjasama menolong diri sendiri secara bersama-sama, didukung oleh semangat solidarita dan individualita. Walaupun demikian, ini tidak berarti bahwa koperasi tidak memerlukan modal uang. Sebagaimana telah disebutkan di atas, koperasi adalah organisasi ekonomi sehingga hukum-hukum ekonomi juga berlaku atasnya, maka sudah tentu modal uang juga merupakan salah satu faktor penting bagi koperasi untuk menjalankan usahanya.

Dalam pada itu harus juga di ingat bahwa koperasi sebagai badan usaha ekonomi tidak menghendaki usaha yang dijalankannya merugi, karena koperasi bermaksud meraih manfaat sosial-ekonomi dari usahanya itu bagi kepentingan anggota-anggotanya secara keseluruhan, dan tentu saja juga bagi kelangsungan (continuity) usahanya, Dengan demikian, jelas bahwa koperasi dapat diidentifikasi sebagai organisasi yang memiliki rasionalitas secara ekonomis.

Koperasi tidak mengutamakan mengejar laba semata-mata, seperti halnya badan usaha yang lain. Dasar rasionalnya ialah bahwa motif ekonomi.koperasi bukanlah terutama laba (profit) melainkan kemanfaatan sosial-ekonomi. Hal ini tidak terlepas dari dasar moral ekonominya ialah kerjasama, nilai kegunaan (need), hajat hidup orang banyak, dan kepentingan negara. Sedangkan moral ekonomi PT adalah persaingan dan nilai transaksi. Dengan tidak mengejar laba semata-mata melainkan kemanfaatan sosial-ekonomi bagi keseluruhan anggota, bukanlah sesuatu hal yang tidak rasional,

{3) Peranan Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian

Istilah sokoguru dapat dipadankan dengan pengertian tiang utama dari suatu bangunan rumah, terutama pada bangunan rumah dengan arsitektur tradisional Jawa . Fungsinya adalah sebagai kekuatan penyangga utama untuk menopang tegaknya bangunan tersebut, di samping tiang

(soko) lainnya yang berfungsi sebagai pelengkap.

Secara normatif, konstitusi menghendaki perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dan koperasi adalah bangun perusahaan yang sesuai dengan itu. Pernyataan yang termuat dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu, sesungguhnya tidaklah berdiri sendiri melainkan merupakan jabaran dari paham kedaulatan rakyat. Paham kedaulatan rakyat merupakan paham kebangsaan Indonesia, yang sudah menjadi arah dan isi perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, yang selanjutnya hendak diaktualisasikan dalam alam Indonesia Merdeka sekarang dan di masa mendatang, dalam wujud demokrasi politik maupun demokrasi ekonomi.

Dengan koperasi dan dalam koperasi itulah demokrasi ekonomi dapat diaktualisasikan. Oleh karena itulah, maka secara ideologis, koperasi merupakan kekuatan penyangga utama (sokoguru) sistem perekonomian nasional Indonesia yang berdasarkan demokrasi ekonomi itu.

Dalam pada itu secara kultural, jati diri bangsa Indonesia adalah kebersamaan dan kekeluargaan. Hal ini misalnya terlihat pada semangat gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Di dalam koperasi semangat keguyuban dan kegotong-royongan semakin diperkuat dengan diberi muatan ekonomi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa koperasi itu berfungsi memperkuat identitas budaya bangsa Indonesia.

Selama berabad-abad penjajahan telah menyebabkan sebagian besar rakyat Indonesia hidup miskin. Hingga dewasa ini pun para petani, nelayan, pengrajin kecil, dan produsen kecil lainnya masih hidup dalam sistem atau pola ekonomi subordinasi. Bahkan terdapat gejala menguatnya pola ekonomi subordinasi akhir-akhir ini dengan berkembangnya konglomerasi. Untuk membina golongan ekonomi lemah, yakni sebagian besar rakyat itu, maka hanya koperasi yang merupakan wadah yang tepat. Jenis badan usaha lainnya tidak dapat diharapkan untuk maksud tersebut, karena asas dan mekanisme kerjanya tidak sejalan dengan maksud tersebut. Melalui koperasi kesadaran ekonomi dan solidaritas rakyat miskin itu dibina. Kemampuan produktif dan kecakapan keusahawanannya ditingkatkan. Dengan cara menghimpun dan membina kekuatan ekonomi bersama dari rakyat melalui koperasi itu, kekuatan ekonomi besar yang merugikan mereka dapat dihadapi, dan selanjutnya secara berangsur-angsur mereka dilepaskan dari posisi ekonomi subordinasi.

Sudah barang tentu hal tersebut memerlukan perjuangan, dimulai dengan kemauan politik kepemimpinan nasional, serta sikap tanggap dan semangat dedikasi para pelaksana pembangunan. Jika semua itu dapat diwujudkan menjadi tekad nasional, maka jelas betapa koperasi mempunyai peranan sangat penting sebagai kekuatan penyangga utama (sokoguru) perekonomian rakyat, yang tidak

dapat dilakukan oleh jenis badan usaha lainnya.

Pada tingkat perkembangan perekonomian Indonesia sekarang ini, yang sudah mulai melangkah ke taraf industri-alisasi, maka pengertian kesokoguruan koperasi ini harus dilihat pada peranannya yang sangat penting dalam mendukung keseluruhan bangunan perekonomian. Lapisan bawah dari masyarakat, yakni petani, pengrajin, nelayan, dan produsen kecil lainnya dihimpun ke dalam koperasi. Selanjutnya, koperasi-koperasi primer tersebut membentuk hubungan kemitraan secara vertikal dengan bangunan ekonomi terkaitnya. Misalnya, para nelayan yang tergabung dalam koperasi menjadi pendukung utama industri pengolahan ikan melalui hubungan kemitraan. Para nelayan, melalui koperasinya, turut memiliki saham yang tertanam dalam industri perikanan tersebut sebagai perwujudan dari hak demokrasinya. Dengan cara begitu, kaum nelayan tidak berada pada posisi subordinasi dalam kehidupan perekonomian modern tersebut, melainkan sebagai mitra usaha.

(4) Kedudukan Koperasi di Antara Badan Usaha.
Lainnya

Dalam UUD 1945 pasal 33 beserta penjelasannya, diisyaratkan adanya tiga jenis badan usaha ekonomi, yaitu koperasi, swasta, dan badan usaha milik negara. Koperasi disebutkan sebagai bangun usaha yang sesuai dengan ketentuan dalam pasal 33 tersebut, yaitu bahwa per-

ekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Perusahaan swasta hanya dibolehkan bergerak dalam bidang usaha yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.

Di bagian lain dari penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Oleh sebab itu, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Penjelasan tersebut di atas mengisyaratkan diperlukannya badan usaha milik negara (BUMN) untuk mengelola sektor-sektor produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

Ketiga jenis bangun usaha, yaitu koperasi, BUMN, dan swasta absah keberadaannya dalam membangun kesatuan ekonomi nasional. Koperasi sebagai lembaga atau unit kegiatan usaha menduduki posisi sentral dalam bangun perekonomian Indonesia. Sebagai unit kegiatan usaha ekonomi, koperasi merupakan kekuatan penyangga utama struktur perekonomian modern yang didukungnya. Sebagai misi, maka semangat dan jiwa koperasi yang berakar pada paham kebersamaan dan asas kekeluargaan harus dimasukkan secara integratif ke dalam semua bentuk atau bangun

usaha. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan menurut ayat 1 pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomiari disusun sebagai usaha bersama. Menyusun tata kehidupan perekonomian sebagaimana dikehendaki pasal 33 UUD 1945 itu merupakan tugas negara. Upaya nyata melakukan penataan secara struktural kehidupan perekonomian bangsa adalah penting agar struktur kehidupan perekonomian itu tidak tersusun sendiri melalui mekanisme pasar bebas. Sebab jika yang disebut terakhir itu terjadi, maka kehidupan perekonomian akan berkembang secara liberalistik dan menjauhi cita-cita demokrasi ekonomi.

Upaya memasukkan unsur kebersamaan ke dalam perusahaan swasta dapat dilakukan melalui pemilikan kolektif saham perusahaan oleh karyawan atau koperasi karyawan. Dengan cara itu, karyawan mendapatkan hak demokrasinya. Atas dasar prinsip ini, maka himbuan kepala negara kepada para pengusaha swasta besar beberapa waktu yang lalu agar menjual sebagian Eahamnya kepada koperasi terkait, tidak dapat dipandang sebagai belas kasihan. Hal itu, semata-mata berarti memenuhi hak demokrasi ekonomi karyawan atau anggota-anggota koperasi terkait tersebut.

3eperti halnya dengan prinsip kebersamaan, maka asas kekeluargaan pun harus diintegrasikan ke dalam perusahaan swasta dengan jalan menempatkan posisi karyawan tidak sebagai faktor produksi, melainkan sebagai mitra produksi. Dalam posisinya sebagai mitra itu, karyawan atau

koperasi karyawan sudah selayaknya diperlakukan sebagai anggota keluarga besar perusahaan yang bersangkutan, dan berhak untuk turut memiliki sebagian saham perusahaan. Dalam posisi yang demikian itu, karyawan dan anggota koperasi karyawan dapat memiliki status kemandirian dan menikmati hak-hak demokrasi ekonomi. Dengan demikian, martabat dan harga dirinya sebagai manusia dapat diaktualisasikan secara wajar, tidak menjadi hamba dari majikan.

Apabila prinsip kersamaan dan asas kekeluargaan sudah terintegrasikan ke dalam perusahaan swasta dan BUMN, bahkan juga sektor informal yang semakin berkembang meluas dewasa ini, maka kesemua badan usaha serta wadah ekonomi itu dapat diibaratkan sebagai pembilang yang berbeda dari suatu pecahan. Penyebutnya sebagai common denominator adalah demokrasi ekonomi dan trilogi pembangunan. Dengan begitu kesemuanya berjalan searah dalam suatu tugas besar bersama membangun dan menyusun struktur perekonomian nasional berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan (Sri-Edi Swasono, 1931, h. 4).

Pemahaman konseptual mengenai koperasi Indonesia seperti diutarakan di atas, dalam beberapa hal mengalami distorsi dewasa ini. Hal ini, antara lain disebabkan konsep Demokrasi Indonesia sebagai Demokrasi Sosial yang meliputi Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi, masih kurang dipahami oleh banyak orang, meskipun hal itu sudah

menjadi bahan pelajaran baku dalam pendidikan kader bangsa pada awal tahun 1930-an.

Beberapa hal yang mengindikasikan tentang adanya distorsi pemahaman konsep koperasi Indonesia diutarakan berikutnya ini.

Koperasi hampir selalu dipandang dan dipersepelekan dengan memakai acuan pikiran Perseroan Terbatas (PT). Atas dasar itu, maka konsep tentang laba (profit) dikenakan juga terhadap SHU pada koperasi. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi memang tidak sebesar laba yang mampu diraih oleh PT. Oleh karena itu, terjadi kekeliruan dalam menarik kesimpulan, yaitu bahwa PT lebih menguntungkan dari pada koperasi. Kurang disadari oleh banyak orang bahwa koperasi terutama berorientasi kepada pelayanan untuk memberikan ke-manfaatan sosial-ekonomi kepada anggotanya secara keseluruhan. SHU merupakan kelebihan yang masih ada pada koperasi setelah anggota mendapatkan kemanfaatan sosial-ekonomi dari kegiatan yang dilakukan oleh koperasinya. Oleh karena itu, membandingkan SHU dengan laba (profit) adalah tidak relevan.

Cara pandang terhadap koperasi dengan memakai acuan pikiran PT, juga menyebabkan kekeliruan pemahaman terhadap koperasi itu, dalam hal koperasi tidak mengutamakan mencari laba yang sebesar-besarnya. Kesimpulan yang diperoleh dari cara pandang yang demikian, ialah bahwa koperasi merupakan badan usaha yang tidak rasional.

Seharusnya dipahami bahwa koperasi memang tidak mengutamakan laba melainkan kemanfaatan sosial-ekonomi, seperti telah dijelaskan di atas.

Rasionalitas koperasi juga dipertanyakan karena dipandang mencampuradukkan kepentingan ekonomi dengan kedermawanan. Pengertian koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial dipahami secara keliru sebagai sesuatu hal yang tidak realistis. Watak sosial yaitu watak yang mengutamakan kepentingan orang banyak, memang merupakan hal yang hakiki pada koperasi. Koperasi tanpa watak sosial tidak lebih dari lembaga ekonomi semata-mata seperti halnya PT, Firma, dan sebagainya. Pemahaman mengenai watak sosial koperasi itu, sebagaimana telah dijelaskan harus ditelusuri akarnya pada paham kedaulatan rakyat yang integralistik, yakni paham keindonesiaan mengenai asas kedaulatan rakyat.

Kerancuan pemahaman terhadap koperasi juga terjadi berkenaan dengan pengertian kesokoguruannya. Profil koperasi yang masih serba kecil, serba lemah, peranan ekonominya dalam GNP yang masih kecil dijadikan tolak ukur kemustahilan koperasi berperan sebagai sokoguru perekonomian nasional. Persepsi keliru ini bertambah lagi dengan pengertian bahwa koperasi hanyalah salah satu sokoguru dari perekonomian nasional karena menghubungkannya dengan jumlah soko (tiang) suatu bangunan rumah. Kerancuan pemahaman mengenai masalah ini juga

disebabkan tidak dipahaminya secara tepat esensi-esensi mengenai kedaulatan rakyat, sosialisme Indonesia, dan demokrasi Indonesia serta Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup bangsa, kaitannya dengan konsep koperasi Indonesia. Untuk mendapatkan pemahaman yang benar mengenai koperasi dan gerakan koperasi di Indonesia, maka esensi-esensi tentang hal-hal tersebut di atas, harus ditelaah secara cermat.

Sekurang-kurangnya terdapat dua hal yang merupakan latar belakang terjadinya penyimpangan pemahaman mengenai koperasi dan gerakan koperasi itu. Pertama, ialah masa transisi yang berkepanjangan, yang dimungkinkan oleh diberlakukannya Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945. Dalam masa transisi yang berkepanjangan itu perusahaan swasta nonkoperasi yang bekerja atas dasar KUHD yang individualistik itu, telah mendapat kesempatan berkembang sekaligus membudaya. Secara ekonomis usahanya berkembang pesat hingga terdapat di antaranya yang tumbuh menjadi konglomerasi. Ide dan konsepnya membudaya dan melembaga menjadi pola pikir serta akhlak (moral conduct) di kalangan masyarakat luas. Hal yang demikian bukan hanya menggejala di kalangan awam, tetapi juga di kalangan cendekiawan, di kalangan orang-orang terpelajar dan sangat terpelajar.

Proses membudaya dan melembaganya asas individualisme sejalan dengan tumbuh kembangnya bangun perusahaan

yang berjalur KUHD, sudah tentu turut pula memperkuat keberadaan paham liberalisme dan kapitalisme di dalam masyarakat. Kecenderungan yang demikian dengan mudah dapat diamati di sekeliling kita. Tidak banyak orang terpelajar dan setengah terpelajar yang berpaling kepada koperasi dan gerakan koperasi untuk menjadikannya sebagai lahan garapan, meskipun diketahui bahwa bangun perusahaan inilah yang berjalur Demokrasi Ekonomi. Dalam iklim individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang cenderung menguat itulah banyak orang terpengaruh menggunakan cara pandang yang keliru terhadap koperasi.

Hal yang lain, yang turut berpengaruh terhadap penyimpangan persepsi dan pemahaman terhadap koperasi dan gerakan koperasi ialah masih kuatnya pengaruh ide-ide dan pandangan hidup Barat dalam khazanah ilmu-ilmu sosial dan budaya kita. Kaum cendekiawan kita di kampus-kampus belum sepenuhnya mampu mengintegrasikan pandangan hidup bangsa serta falsafah dasar negara ke dalam kurikulum yang digunakan. Pendidikan Moral Pancasila memang merupakan bagian dari kurikulum sekolah pada semua jenis, jenjang, dan tingkatan. Namun penghayatan dan pemahaman serta pengalaman pandangan hidup bangsa tersebut masih saja dirasakan tidak mantap.

Kesadaran akan adanya paradigma Indonesia memang juga mulai tumbuh, yang diduga sebagai dampak dari penataran PA yang semakin diperluas target sarannya.

Akan tetapi, pengaruh pandangan hidup serta ide-ide Barat juga semakin merasuki pola pikir dan akhlak masyarakat kita tidak terkecuali masyarakat ilmuwan dan cendekiawan. Kalangan ilmuwan dan cendekiawan yang mudah menyerap paradigma Barat cenderung mudah pula mengagumi pandangan hidup serta produk nilai-nilai Barat. Keadaan yang demikian, seringkali membuat mereka terjebak ke dalam involusi ilmiah.

Terdapat kecenderungan komunitas kampus mengidap "kelengahan kultural" sehingga mudah kagum terhadap Barat, mudah menyerap paradigma, pandangan hidup dari nilai-nilai Barat, kurang waspada dalam menelusur epistemologi ilmu, sehingga menjebak mereka ke dalam involusi ilmiah tersebut. Sebagian penyebabnya adalah masih kuatnya pengaruh pandangan hidup dan paradigma Barat dalam ilmu-ilmu sosial budaya yang menjadi referensi kurikuler mereka. Keadaan yang demikian membuat mereka tidak mampu memberikan ketajaman apresiasi dan visi terhadap nilai-nilai, sikap, serta kebijaksanaan budaya nasional (Sri-Edi Swarsono, 1991, h. A).

Hal yang sama juga terjadi pada kalangan ilmuwan di lingkungan birokrasi, yang terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan menyangkut strategi dan kebijakan pembangunan. Secara sadar atau tidak seringkali kebijaksanaan budaya Barat dipandang dengan sendirinya dapat diterapkan secara tepatguna dalam memecahkan

masalah-masalah sosial-budaya nasional atau lokal.

Dalam menghadapi kenyataan yang demikian, diperlukan upaya transformasi kurikulum yang mampu meningkatkan ketajaman dan kecermatan penelaahan epistemologi ilmu-ilmu sosial-budaya yang digeluti. Dengan begitu, seseorang akan mampu melacak dan menelusuri sifat dan batas-batas serta asal-muasal ilmu, pandangan hidup, paradigma maupun nilai-nilai menurut jalur metodologi yang absah. Dengan begitu pula akan dapat diperoleh kerangka pemikiran dan pemahaman yang benar terhadap ilmu, pandangan hidup, paradigma atau nilai-nilai yang diekspos kepadanya.

Penguasaan kerangka pemikiran dan pemahaman yang benar memungkinkan seseorang mempertajam apresiasi dan visinya terhadap nilai-nilai, sikap serta kebijakan budaya nasional di tengah-tengah pengaruh nilai-nilai dan ide-ide asing yang gencar. Dengan ketajaman apresiasi dan visi terhadap nilai-nilai dan kebijakan budaya nasional itu, memungkinkan seseorang memahami secara benar hakikat koperasi dan gerakan koperasi Indonesia, latar sejarah dan akar falsafah keindonesiaannya. Dengan begitu ia tidak mencampurbaurkan secara rancu cara pandang Barat dan cara pandang Indonesia terhadap koperasi, gerakan koperasi beserta permasalahannya.

Pada tingkat komunitas awam pengaruh pandangan hidup Barat yang individualistik dan liberaiistik juga

tampaknya masih kuat. Bahkan pengaruh tersebut cenderung makin menguat dan meluas, sejalan dengan pola pembangunan kehidupan perekonomian yang mengabsahkan jalur KUHD yang individualistik dan liberaiistik itu. Kecenderungan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang berorientasi keuntungan kebendaan dan kenikmatan material mencemari watak sosialnya. Keadaan yang demikian sudah barang tentu merugikan perkembangan gerakan koperasi.

Dalam menghadapi kenyataan tersebut di atas, diperlukan upaya mempercepat berakhirnya dualisme strategi pembangunan perekonomian, yang menyangkut upaya reformasi makro maupun reformasi mikro.

Pengembangan gerakan koperasi pedesaan yang menjadi kepedulian (concern.) studi ini merupakan bagian dari upaya reformasi mikro. Pengalaman lokal kontekstual yang mencakup karakteristik kepemimpinan lokal, konsep nilai budaya lokal, ciri kelompok elit lokal, serta pola belajar-pembelajaran PLS yang alamiah maupun yang direkayasa, diamati dalam kaitannya dengan proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan.

E- Pengembangan Gerakan Koperasi Pedesaan

1- Pendobrakan Keadaan Inertia Masyarakat Desa .

Sejarah koperasi bermula sebagai produk negara maju dan kemudian dikembangkan keberbagai negara dan negara-

negara sedang berkembang termasuk juga Indonesia.

Masyarakat Indonesia memiliki semangat kekeluargaan yang berakar dalam tradisi budaya dan diperkuat oleh agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Suasana kehidupan guyub dalam masyarakat Indonesia berkaitan dengan semangat kekeluargaan tersebut, Unsiri: guyub dan semangat kekeluargaan tersebut umumnya dipersepsi sebagai lahan kultural bagi tumbuhnya koperasi.

Jiwa kekeluargaan dan keguyuban itu sendiri pada kenyataannya tidak dengan sendirinya menumbuhkan koperasi. Memang kerja sama dalam bentuk gotong royong atau koperasi sosial menurut Bung Hatta sudah lama dikenal rakyat Indonesia, tetapi kerja sama dalam bentuk aktivitas ekonomi atau koperasi ekonomi belum dikenal. Oleh karena itu menurut Bung Hatta, koperasi masih harus dididikkan kepada rakyat.

Penyebaran dan perkembangan koperasi di berbagai negara seperti disebut di atas menunjukkan perbedaan-perbedaan sejalan dengan kenyataan konstektual ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya (ipoleksosbud) dari masing-masing negara. Di Indonesia, gagasan dan konsep serta praktek koperasi juga sudah cukup lama dikenal. Pertumbuhan dan perkembangan gerakan koperasi di Indonesia telah mengalami pasang surut, sejalan dengan pasang surutnya tatanan kehidupan ipoleksosbud masa kolonial dan pasca kolonial.

Dalam pada itu komunitas pedesaan yang dikenal

masih kuat jiwa kekeluargaannya dan semangat guyubnya, ternyata belum pernah mampu memiliki koperasi dalam arti koperasi ekonomi, sebagaimana dimaksudkan oleh Bung Hatta.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan tidak memiliki kemampuan untuk secara spontan mengorganisasikan diri dalam suatu lembaga kerja sama ekonomik. Dengan perkataan lain, masyarakat desa mengalami keadaan inertia.

Keadaan inertia yang dialami masyarakat desa itu tidak atau kurang memungkinkan terjadinya perubahan sosial imanen. Hal itu pula yang menjadikan jiwa kekeluargaan dan semangat keguyuban yang dimiliki tidak pernah menjadi lahan kultur yang subur bagi tumbuhnya institusi ekonomik semacam koperasi. Memang diakui bahwa bentuk-bentuk semacam prakoperasi, seperti lumbung desa, arisan, dan sebagainya tidak asing bagi masyarakat pedesaan kita. Akan tetapi, lembaga prakoperasi tersebut belum pernah ada yang tumbuh menjadi koperasi yang diidealkan, semacam koperasi ekonomik yang dimaksudkan oleh Bung Hatta, yang bisa mengangkat derajat kehidupan dan menaikkan tingkat kesejahteraan mereka.

Bagi suatu masyarakat yang mengalami keadaan inertia diperlukan kekuatan pendorong dari luar untuk mendobrak keadaan inertia tersebut. Kekuatan pendobrakan itu mungkin bersifat teknik, teknologik, administratif dan mungkin institusional. Apa yang disebut pendekatan

top down pada dasarnya berkaitan dengan keadaan inertia yang dialami masyarakat di negara sedang berkembang, yang tidak atau sulit diharapkan segera adanya proses bottom up.

Berkenaan dengan pengembangan gerakan koperasi pedesaan di Indonesia, dalam mana masyarakat pedesaan yang telah menderita kemiskinan dan keterbelakangan untuk jangka waktu yang lama, adalah tidak realistis mengharapkan tumbuhnya gerakan dari bawah. Perkumpulan-perkumpulan koperasi yang pernah muncul secara swakarsa, umumnya tidak mampu bertahan apalagi berkembang. Masyarakat pedesaan yang menderita kemiskinan dan keterbelakangan yang cukup lama tersebut menderita keadaan inertia tersebut. Namun demikian upaya pendobrakan -itu harus sekaligus berlangsung dengan suatu gerakan (imovement) menyadarkan masyarakat yang bersangkutan untuk mengorganisasikan diri dan "bekerja sama ke arah perbaikan keadaan kehidupannya.

Gerakan menyadarkan masyarakat, sebagaimana dikonsepsikan oleh Paulo Freire dengan istilah concientization» dimulai dengan menyadarkan akan keadaan nyata yang dialaminya, makna dari keadaan nyata tersebut bagi kehidupannya masa kini dan pada masa yang akan datang.

Gerakan penyadaran tersebut diperlukan agar masyarakat mengerti keadaan inertla yang dialaminya, dan juga memahami makna kekuatan luar untuk mendobrak keadaan

inertia tersebut. Sebab semua kekuatan luar untuk maksud pendobrakan itu, hanya akan mendapat tanggapan (respons) yang memadai, jika ia dimengerti serta mendapat dukungan masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan dari kekuatan luar untuk maksud pendobrakan itu, pada dasarnya adalah untuk membantu masyarakat desa yang dalam keadaan lemah itu untuk membantu dirinya sendiri (to help to self-help). Dengan bantuan dari luar tersebut diharapkan masyarakat desa mampu merumuskan dan merencanakan sendiri pengembangan dirinya, sehingga turut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan berdasarkan keputusannya sendiri secara sadar dan bertanggung jawab.

Menghadapi keadaan masyarakat desa yang mengalami keadaan inertia tersebut, maka gerakan koperasi pedesaan di Indonesia mencoba mengembangkan koperasi pedesaan pola KUD. Pola koperasi pedesaan KUD dapat dikatakan sebagai suatu inovasi dalam upaya pengembangan gerakan koperasi pedesaan.

KUD yang merupakan pola koperasi pedesaan baru itu merupakan suatu produk rekayasa pada tingkat nasional. Artinya, gagasan dan konsepnya dirancang dalam skala nasional, yang selanjutnya hendak diimplimentasikan pada tingkat kehidupan komunitas pedesaan. Sebagai produk luar desa, maka upaya pengadaptasiannya menggunakan pendekatan atas-bawah (top down).

Pada dasarnya implimentasi gagasan dan konsep KUD dapat dipandang sebagai upaya pendobrakan keadaan inertia masyarakat desa, yang tidak kunjung melahirkan koperasi yang handal secara imanen. Pendekatan atas-bawah (top down approach) pun semula dimaksudkan hanya sekedar sebagai upaya pendobrakan institusional. Tujuannya adalah membantu masyarakat desa untuk mengorganisasikan diri, kemudian bersama-sama bekerjasama mengelola kehidupan ekonominya dengan KUD sebagai perangkat institusional. Dengan demikian tujuan semula bukanlah menjadikan KUD sebagai suatu institusi birokratik yang menjadi pelaksana program pemerintah.

Dalam pada itu David C. Korten (1988) menyatakan bahwa koperasi dalam realitasnya merupakan ciptaan pemerintah dan yang beroperasi di bawah pengelolaan pemerintah. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pembangunan koperasi, seperti halnya pembangunan komunitas pada skala yang lebih luas, hanyalah menghasilkan seperangkat program dan target yang dirumuskan dari pusat, dengan pelaksanaannya adalah struktur-struktur birokratis yang konvensional, sehingga tidak tanggap terhadap preferensi dan/atau kebutuhan-kebutuhan setempat. Pernyataan David C. Korten tersebut, jika dikaitkan dengan praktek pengimplimentasian koperasi pola KUD, sebagian ada benarnya.

Kondisi kehidupan komunitas dan keadaan ekologi desa-desa di Indonesia yang jumlahnya ribuan, di mana gagasan, konsep, dan program KUD hendak diaplikasikan,

sesungguhnya sangat bervariasi- Dalam pada itu KUD seperti halnya program pembangunan lainnya, menurut pengamatan David C. Korten, direncanakan dengan menggunakan pendekatan cetak biru (blueprint approach). Pendekatan yang demikian memang tidak tanggap terhadap permasalahan lokal; sebab menurut Korten, permasalahan lokal itu mempunyai tujuan-tujuan yang beraneka ragam yang batas-batasnya tidak selalu jelas dan selalu mungkin mengalami suatu perubahan, yang syarat-syaratnya tidak jelas, yang lingkungannya dapat selalu berubah dan yang biayanya tidak dapat diperkirakan.

Pada umumnya para ahli sependapat bahwa tidak ada dua daerah yang sama, karena daerah geografi maupun penduduknya berbeda-beda- Oleh karena itu, perlu sekali diteliti di tingkat dan daerah mana pembangunan diadakan, dalam bidang apa dan teknologi yang mana (Susanto, 1983, h. 259).

John W- Mellor (1966, h- 30) juga menggambarkan keanekaragaman desa dengan membagi tahap-tahap perekonomian agraria dalam tiga tahap, yaitu (1) tahap tradisional, (2) tahap transisi, (3) tahap penguasaan produksi. Dalam tahap tradisional teknik produksi dapat dikatakan sama dan tidak banyak berubah dari abad ke abad. Dalam tahap transisi telah digunakan teknologi baru yang diarahkan untuk memperoleh hasil produksi yang lebih banyak. Di Indonesia, tahap ini ditandai dengan implementasi teknologi pertanian sederhana yang sudah

dikembangkan, yakni yang dikenal dengan istilah panca usaha tani. Teknologi panca usaha tani tersebut meliputi pemakaian bibit unggul, penggunaan pupuk dan obat-obatan pembasmi hama, pemanfaatan pengairan dan pengolahan tanah secara lebih baik. Sedangkan tahap penguasaan produksi menunjukkan pemakaian alat-alat produksi mesin untuk menggantikan tenaga manusia dan hewan.

J. W. Mellor juga menjelaskan bahwa yang diperlukan oleh negara-negara sedang berkembang sebagai negara agraria ialah terutama mengidentifikasi dan menggunakan sumber yang berlebihan untuk mengimbangi sumber yang sangat terbatas sehingga dapat dinikmati oleh penduduk. Sumber yang berlebihan itu ialah penduduk, sedangkan sumber yang terbatas ialah kemampuan administrasi untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan ke arah tujuan yang tepat. Identifikasi dan penggunaan sumber yang terbatas itu merupakan masukan (input) pembangunan dan disesuaikan dengan situasi lokal.

Komunitas pedesaan yang beraneka ragam kondisinya sebagaimana dikemukakan di atas, dengan pengembangan gerakan koperasi pedesaan diharapkan dapat mengadaptasikan gagasan, konsep, dan program KUD yang dirancang secara nasional itu. Proses pengadaptasian yang diusahakan seringkali tanpa memperhitungkan preferensi dan kebutuhan lokal yang juga beraneka ragam.

Semenjak program KUD diluncurkan pada tahun 1971 dan kemudian didiseminasikan ke berbagai daerah dan desa

lain di Indonesia pada tahun 1973, terdapat beberapa di antaranya yang mampu berjalan secara cukup baik. Akan tetapi, sebagian besar lainnya mengalami nasib yang kurang menggembirakan. Keseluruhan KUD yang pernah dibentuk itu, dalam perkembangan selanjutnya dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu: (1) KUD "papan nama", (2) KUD ucnu, dan (3) KUD harapan. Jenis KUD yang pertama, ialah KUD yang tidak mampu melanjutkan kegiatannya sehingga ekstensinya hanya ditandai oleh papan namanya yang masih terpancung. Jenis KUD yang kedua, ialah KUD yang masih tetap dapat melanjutkan kegiatannya, namun demikian kepentingan yang diembannya hanyalah terutama bagi segelintir orang tertentu yang menguasai jalannya KUD tersebut. Dalam ungkapan mencemooh dari masyarakat, KUD semacam ini dijuluki sebagai "KUD ketua" atau "KUD pengurus". Seringkali pula disebut sebagai akronim dari "ketua untung dulu". Jenis KUD yang lain, ialah KUD yang selain tetap dapat melanjutkan kegiatannya, juga pada tingkat tertentu mampu menunjukkan kemajuan yang berarti. Jenis KUD yang terakhir ini, tidak atau belum banyak jumlahnya saat ini, atau bahkan dapat dikatakan masih sangat sedikit. Salah satu di antara KUD jenis yang terakhir ini, ialah KUD Mattirobulu di desa Bontosunggu, Bulukumba, Sulawesi Selatan.

Pada Bab I telah dikemukakan pertanyaan pokok yang hendak dicari jawabannya, dan yang merupakan masalah utama penelitian ini ialah bagaimana proses pengembangan gerakan

koperasi dalam suatu komunitas pedesaan. Perspektif pendidikan digunakan sebagai paradigma penelitian ini, tidak lain karena studi ini dilakukan dalam lingkup bidang studi Pendidikan Luar sekolah merupakan ilmu terapan yang menggunakan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dari berbagai ilmu lain seperti sosiologi, psikologi, komunikasi, dan lain-lain.

Pendidikan merupakan salah satu subsistem dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional Indonesia seperti telah dikemukakan di atas, merupakan pembangunan yang berorientasi manusia. Atau dalam istilah D. C. Korten ialah model pembangunan berdimensi kerakyatan.

Pendidikan baik sebagai bidang kajian maupun sebagai upaya sadar (terapan) berkaitan erat dan bahkan merupakan inti dari upaya pengembangan potensi-potensi manusia, sebagai mahluk mampu didik (*homo educandum*). Melalui pengalaman, pendidikan potensi fisik dan psikhis pada manusia dapat dikembangkan. Dengan segenap potensi fisik dan psikhis yang sudah dikembangkan itu memberikan kepadanya kemampuan mengubah, mempengaruhi, dan mengembangkan (mentransformasikan) lingkungan fisik, lingkungan sosial dan/atau komunitasnya.

Untuk kepentingan penelitian ini dipilih KUD Mattirobulu sebagai obyek penelitian kasus. KUD tersebut tergolong sebagai KUD yang tetap mampu mempertahankan eksistensinya, dan secara mantap tetap mampu mengembangkan kegiatannya sejak dibentuknya pada tahun 1973. Selama satu

dasawarsa berturut-turut hingga tahun 1990, KUD ini mencatat kemajuan yang mengesankan, yakni selalu memperoleh penghargaan sebagai KUD Teladan, baik pada tingkat regional maupun pada tingkat nasional.

Pengamatan pada KUD ini lebih ditekankan pada aspek manusianya, dan dalam kerangka konsep pendidikan luar sekolah umumnya dan pendidikan orang dewasa khususnya. Karena itu mekanisme manajerial dan aktivitas bisnisnya tidak merupakan sasaran pengamatan khusus dan tidak tercakup dalam pembahasan ini. Beberapa hal yang dipandang perlu dikemukakan lebih lanjut dalam pembahasan ini, antara lain ialah: (1) introduksi gagasan dan konsep koperasi pedesaan dan adopsi gagasan serta konsep tersebut oleh pemimpin puncak lokal, (2) Difusi gagasan dan konsep yang merupakan tindak perintisan gerakan koperasi pedesaan oleh pemimpin, (3) sasaran difusi yang pertama dan berikutnya yang kemudian merupakan kelompok perintis dan pendukung gerakan, (4) Masukan sosio-struktural dan sosio-kultural.

Telaah dan pembahasan semua hal yang dikemukakan tersebut dilakukan dalam kerangka konsep pendidikan luar sekolah.

2. Introduksi Gagasan dan Konsep Koperasi Pedesaan

Introduksi gagasan dan konsep koperasi pedesaan melibatkan hubungan antara perangkat birokrasi-atas desa dan pemimpin puncak lokal, masing-masing sebagai sumber

informasi dan penerima informasi. Dalam terminologi PLS, yang pertama disebut sebagai sumber belajar, sedangkan yang kedua disebut warga belajar atau peserta didik. Dilihat dari sisi sumber belajar, maka proses introduksi gagasan dan konsep tersebut diidentifikasi sebagai proses pembelajaran. Sedangkan apabila dilihat dari sisi warga belajar atau peserta didik, maka proses itu disebut proses belajar atau interaksi belajar.

Interaksi belajar-pembelajaran dalam kasus ini termasuk dalam lingkup pendidikan orang dewasa (adult education) oleh karena peserta didiknya terdiri dari orang dewasa. Selain itu, interaksi belajar-pembelajaran tersebut dapat diidentifikasi sebagai proses interaksi belajar-pembelajaran dalam formal intruksional setting, menurut istilah Jensen (1964), Clark (1973), Dickinson (1979) dan Little (1979). Hal ini disebabkan oleh "evenfnya merupakan pertemuan resmi antara dua pihak (sumber belajar dan peserta didik) yang direncanakan secara sengaja, disepakati tempat, waktu, dan durasinya, begitu pula tema atau materi belajar-pembelajaran. Metoda dan tekniknya ditentukan sebelumnya, yakni dalam hal ini metoda komunikasi formal dengan pendekatan yang sifatnya instruktif dengan teknik ceramah atau pengarahan.

Komunikasi antara sumber belajar dengan peserta didik dalam proses ini lebih bersifat komunikasi satu arah, yakni dari sumber belajar kepada peserta didik. Proses dialogik tidak terjadi dan diskusi tidak berkembang

disebabkan suasana formal pada umumnya memang tidak merupakan suasana yang merangsang timbulnya iklim belajar yang favorable suasana formal itu diperkuat intensitasnya oleh sifat hubungan diantara kedua pihak yang sudah ada sebelumnya. Sumber belajar merupakan representasi dari posisi atasan dan peserta didik dari posisi bawahan dalam struktur birokrasi.

Metode komunikasi verbal dengan teknik ceramah atau pengarah, pada umumnya juga 'kurang mampu menumbuhkan proses dialogik dan pertukaran pikiran di antara sumber belajar dan peserta didik, baik dalam sistem sekolah formal maupun pada kegiatan pendidikan luar sekolah. Dalam pada itu materi pembelajaran yang berwujud konsep-konsep abstrak yang disajikan secara verbalistik, memerlukan daya serap dengan tingkat operasi formal atau proposional (menurut istilah J. Piaget) dari peserta didik. Sedangkan diketahui bahwa peserta didik dalam hal ini umumnya cenderung hanya memiliki daya serap pada tingkat operasi konkrit sesuai dengan latar belakang pendidikan formalnya, dan aktivitas kehidupannya sehari-hari.

Berdasarkan paparan mengenai keadaan interaksi belajar-pembelajaran dalam rangka introdukEi gagasan dan konsep koperasi pedesaten, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat diperkirakan tidak semua peserta didik menyerap informasi itu secara komprehensif. Dengan demikian, juga dapat diperkirakan bahwa tidak semua peserta didik, dalam hal ini pemimpin puncak lokal

berbagai desa itu, mengadopsi gagasan atau konsep yang dikomunikasikan, yakni gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola KUD itu.

Salah satu pertanyaan yang dapat muncul dalam hal ini, ialah apakah pemimpin puncak lokal yang kemudian ternyata mengadopsi gagasan dan konsep itu berhasil menyerap informal secara komprehensif pada waktu itu juga. Pertanyaan itu terjawab dari hasil penelitian kasus KUD Mattirobulu dan yang menyangkut diri H. Palessei, pemimpin puncak lokal desa Bontosunggu. Hasil penelitian tersebut telah dipaparkan pada Bab IV disertasi ini.

Karakteristik kepribadian dan kepemimpinan kepala desa sebagai pemimpin puncak lokal, yang menjadi peserta didik dalam hal ini turut memberikan masukan atau input terjadinya keputusan adopsi inovasi. Rasa tanggung jawab moral dan solidaritas sosial merupakan pradisposisi pada diri seseorang yang memberikan kepadanya kecenderungan memilih komitmen terhadap kepentingan masyarakat. H. Palessei dikenal dari riwayat hidupnya sebagai seorang yang memiliki kualitas kepribadian yang demikian. Dalam pada itu ia sebagai pemimpin dalam komunitas desanya memiliki kecenderungan orientasi populistik. Ia tokoh toriasiri, yakni seseorang yang orang lain segan dan hormat, bukan karena kekuasaannya, melainkan karena komitmennya yang konsisten terhadap nilai-nilai moral yang luhur. Dalam berbagai episode riwayat hidupnya, ia telah membuktikan sifat-sifat keberanian membela dan melindungi

kepentingan (keamanan) warga desanya, sifat-sifat kejujuran dan kesahajaan, tanggung jawab sosial dan solidaritas, serta sikap sopan santun kerendahhatian.

Falsafah hidup yang menjadi pegangannya yang seringkali diucapkan dalam berbagai percakapan dengan penulis, ialah; tella paiakara parellu rijagai, roakes-singi a.tie,, makessinoi ada-adae, makessingi gaue. Artinya, ada tiga hal yang harus selalu dijaga agar senantiasa baik, yaitu hati (niat), lisan dan perilaku.

Riwayat hidupnya semenjak masa muda hingga masa tuanya belum pernah tercemar dengan tindakan atau perilaku yang tercela menurut etika moral yang berlaku dalam komunitasnya. Dalam masa perjuangan nasional, ia telah menunjukkan partisipasinya yang nyata. Dalam gerakan penumpasan gerombolan pengacau yang sempat menceraiberaikan warga desanya, ia telah membuktikan keberanian yang membuat orang lain kagum. Komitmennya terhadap nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas disamping kualitas kepribadian lainnya yang telah disebutkan, membuatnya cukup memiliki predisposisi untuk mengadopsi gagasan dan konsep koperasi pedesaan, yang diinformasikan sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat desa.

Di sisi yang lain, sebagai pemimpin formal yang merupakan bagian dari perangkat birokrasi, ia terkenal memiliki loyalitas dan semangat dedikasi yang tinggi dalam mengemban tugasnya. Kualitas ini pun merupakan predisposisi pada dirinya untuk mengadopsi gagasan dan

konsep koperasi pedesaan, yang diinformasikan dengan penekanan pada pendekatan instruktif oleh perangkat birokrasi-atas desa.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keputusan adopsi inovasi yang dilakukannya bukanlah terutama berdasarkan pengetahuannya yang luas dan mendalam mengenai gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu sendiri. Faktor yang utama adalah kualitas kepribadiannya dan kepemimpinan informalnya yang berkecenderungan populistik dan karakteristik kepemimpinan formalnya yang loyal-dedikatif.

Dalam perkembangan lebih lanjut gerakan koperasi yang dirintisnya di desanya, tampak bahwa ia sesungguhnya tidak atau kurang memiliki kompetensi teknik secara memadai. Namun, kekurangan ini diimbangi dengan sikap keterbukaannya terhadap pendapat dari orang lain dan terhadap hal-hal yang baru. Sikap keterbukaan terhadap pendapat orang lain itu berkaitan dengan watak kerendahan-hatinya.

3- Difusi Gagasan dan Konsep Sebagai Tindak Perintisan Gerakan Koperasi Pedesaan

Tahap pengembangan gerakan koperasi pedesaan, pada dasarnya bukanlah dimulai pada saat pemimpin puncak lokal diperkenalkan dengan gagasan dan konsep koperasi pedesaan tersebut. Introduksi gagasan dan konsep itu sendiri sampai kemudian mendapat perhatian khusus yang diikuti dengan upaya mencari penjelasan lebih banyak oleh pemimpin puncak

lokal, dapat dikatakan masih merupakan proses yang berlangsung di luar komunitas desa. Proses tersebut tidak atau belum melibatkan warga desa secara luas, melainkan hanya pemimpin itu sendiri sebagai peserta didik dengan sumber belajar formal maupun informal.

Tahap awal itu sesungguhnya juga belum mulai pada saat pemimpin mengadopsi gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang diintroduksi itu.

Pengembangan gerakan koperasi pedesaan sesungguhnya baru mulai pada saat pemimpin puncak lokal mendifusikan gagasan dan konsep yang telah diadopsinya kepada subyek sasaran yang dipilihnya. Sebagaimana diketahui dalam kasus pengembangan koperasi pedesaan di desa Bontosunggu (kasus KUD Mattirobulu), subyek sasaran difusi yang dipilih pertama kali oleh pemimpin adalah beberapa orang tertentu dari kalangan elit lokal.

Pada tahap awal pengembangan gerakan koperasi pedesaan di Bontosunggu itu, pemimpin tidak melakukan upaya pelibatan secara serentak lapisan massa dari warga desanya. Juga, ia tidak menempuh pendekatan formal dan instruktif, melainkan ia menggunakan pendekatan informal persuasif dalam upaya mendifusikan gagasan dan konsep koperasi yang telah diadopsinya. Sesungguhnya cara yang ditempuhnya tersebut menunjukkan suatu sikap kehati-hatian yang beralasan.

Pada suatu saat sebelum ia mengambil keputusan

adopsi inovasi mengenai gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu, ia mendapat pertanyaan dari bupati mengenai kesediaan dan kesiapannya mengimplementasikan gagasan dan konsep tersebut di desanya. Jawaban yang diberikannya juga menunjukkan sikap kehati-hatian seorang yang arif. Jawaban yang diberikan saat itu, ialah : "Asal ia tidak dibebani suatu target yang tidak bisa ditawarkan, maka dengan mengucapkan bismillah ia akan mencoba berbuat dengan kesungguhan hati".

Alasan rasional, yang mendasari sikap kehati-hatian pemimpin mendifusikan gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu, ialah kesadarannya akan citra negatif koperasi di mata rakyat dan sikap skeptis masyarakat pada umumnya terhadap peluang keberhasilan suatu usaha semacam koperasi.

Sebelum membahas lebih lanjut pengembangan gerakan koperasi pedesaan, yang dimulai dengan upaya pemimpin mendifusikan gagasan dan konsep koperasi itu, perlu dikemukakan kembali kajian mengenai komunikasi difusi inovasi dan mengaitkannya dengan konsep koperasi pedesaan yang telah diintroduksikan.

Gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola KUD pada dasarnya adalah suatu inovasi bagi masyarakat pedesaan. Inovasi merupakan penemuan sesuatu yang berkaitan dengan upaya mencari pemecahan masalah, karena cara konvensional dipandang tidak lagi memadai. Inovasi selalu berkaitan

dengan konteks sosial tertentu serta kurun waktu tertentu. Ini berarti, sesuatu yang dianggap sebagai inovasi pada saat ini, pada saat yang akan datang mungkin tidak lagi dipandang sebagai suatu inovasi, bahkan mungkin telah menjadi sesuatu yang telah dilupakan.

Koperasi pedesaan pola KUD sebagai suatu inovasi mencakup komponen ide atau gagasan dan komponen fisik, yang dalam hal ini dianalogikan dengan segi institusi atau kelembagaannya sebagai koperasi- Menurut substansinya inovasi dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : (1) inovasi yang berupa wawasan, konsep, atau teori baru, (2) inovasi yang berupa produk teknologi baru, dan (3) inovasi yang berupa struktur serta fungsi baru. Pada suatu masyarakat, mula-mula muncul inovasi berupa wawasan, sedangkan pada masyarakat yang lain mungkin yang lebih dahulu muncul adalah restrukturisasi dan refungsionalisasi. (Muhadjir, 1983, h. 17).

Dalam kaitannya dengan gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola KUD sebagai suatu inovasi, tampaknya ketiga substansi tersebut tercakup atau mungkin dapat disebut tumpang tindih.

Dalam hal kecepatan seseorang menanggapi suatu inovasi, Rogers (1971) membedakan lima kelompok individu, yaitu : (1) penemu (innovators), (2) pendahulu (early adopters), (3) mayoritas pendahulu (early majority), (4) mayoritas lambat (late majority) dan (5) yang tertinggal (laggards). Dalam suatu sistem sosial, penemu ialah orang

yang membuat inovasi atau orang yang pertama-tama memilih atau memodifikasi inovasi dari suatu sistem sosial yang lain. Dalam pada itu ada yang berpendapat bahwa para penemu dan pendahulu itu adalah pengadopsi potensial.

Dalam kasus pengembangan gerakan koperasi pedesaan di desa Bontosunggu, H. Palessei, pemimpin puncak lokal adalah yang pertama-tama memilih inovasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola KUD dari sistem sosial luar desa. Sedangkan kelompok perintis yang semula terdiri dari orang-orang tertentu yang dipilihnya dari kalangan elit lokal sebagai subyek sasaran difusi inovasi dapat dipandang sebagai pengadopsi potensial, dalam arti mereka tergolong early adopters atau pendahulu.

Adopsi inovasi atau penyerapan gagasan dan konsep baru pada hakikatnya merupakan suatu proses mental pada diri seseorang. Proses mental tersebut terjadi sebelum dilakukan keputusan untuk menerima atau menolak gagasan dan konsep baru tersebut. Proses mental tersebut, oleh Rogers dan Shoemaker (1971) disebut proses keputusan inovasi opsional.

Terdapat tiga variabel yang tercakup dalam proses keputusan inovasi itu, yakni variabel-variabel anteseden, proses, dan konsekuensi. Variabel anteseden ialah keadaan sebelum diperkenalkannya suatu inovasi. Keadaan ini meliputi karakteristik kepribadian seseorang, misalnya sikapnya terhadap perubahan, sosiabilitasnya, intensitas

kebutuhannya terhadap inovasi. Selain itu, meliputi pula sistem sosial yang ada, seperti sistem norma tradisional atau modern, toleransi terhadap penyimpangan dan kepaduan komunikasi. Sejak diterimanya informasi, seseorang membentuk persepsinya terhadap inovasi. Sedangkan setelah diputuskannya untuk menerima inovasi, terjadi kemungkinan ia meneruskan atau menghentikan penggunaannya (discontinuation). Keadaan yang terakhir ini terjadi apabila seseorang tersebut menemukan ide lain yang dipandang lebih baik. Variabel yang ketiga, ialah konsekuensi di mana seseorang sampai kepada pilihan untuk menerima atau menolak inovasi. Biasanya orang mencari informasi lebih lanjut pada tahap konfirmasi untuk menemukan faktor penguat bagi keputusannya.

Redlich (1969) dan Rogers (1971) membedakan saluran mengenai inovasi menjadi dua jenis, yaitu saluran yang bersifat personal dan yang impersonal. Sedangkan Havelock membedakannya antara saluran yang interpersonal, saluran formal, dan saluran yang bersifat massal. (Muhadjir, 1983, h. 18).

Berdasarkan konsep-konsep teoritik yang dikemukakan para pakar tersebut di atas, dapat dipahami bagaimana proses keputusan inovasi yang dialami oleh pemimpin, H. Palessei. Karakteristik kepribadiannya yang tercakup sebagai variabel anteseden ialah di antaranya sikap kerendahhatiannya yang bersedia menerima pandangan

orang lain. Komitmennya terhadap kebersamaan dan solidaritas, kecenderungan yang populistik di satu sisi, sedangkan di sisi lain ialah loyalitas dan dedikasinya sebagai aparat birokrasi.

Selanjutnya, upaya merintis pengembangan gerakan koperasi di desanya, tidaklah serta merta dilakukannya dengan menggunakan saluran yang bersifat massal, sebagaimana telah disebutkan, dengan pendekatan instruktif. Ia justru memilih menggunakan saluran interpersonal sebagaimana dimaksudkan oleh Havelock.

Melalui saluran interpersonal itu, pemimpin melakukan tindakan difusi inovasi dengan menekankan pendekatan informal persuasif- Tradisi sillaturrahi dalam wujud saling kunjung-jenguk di antara kerabat keluarga maupun tetangga digunakannya sebagai forum komunikasi difusi inovasi. Sedangkan subyek sasaran difusi dipilihnya dari kalangan elit lokal yang dipandangnya pengadopsi potensial.

Dalam kerangka konsep pendidikan luar sekolah, pemimpin puncak lokal yang menjadi pelaku difusi inovasi, dalam hubungannya dengan subyek sasaran difusi dapat disebut sebagai sumber belajar dan/atau fasilitator. Sedangkan subyek sasaran difusi dapat dipandang sebagai warga belajar atau peserta didik.

Pada masa-masa awal ia memulai mendifusikan gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu melalui

komunikasi antarpersonal dengan subyek sasaran yang dipilihnya, peranannya adalah sebagai sumber belajar. Peranan itu dilakukannya dengan pendekatan persuasif mengajak subyek sasaran untuk bersama-sama mendukung gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang akan diaplikasikan itu. Akan tetapi, pada tahap-tahap selanjutnya, ia lebih banyak berperan sebagai fasilitator. Peranan ini dilakukannya dengan cara mengupayakan pertemuan komunikasi difusi inovasi antara sumber belajar yang direkrut dari kalangan keluarga yang bertugas pada Kandepkop. Pertemuan yang bersifat informal tersebut merupakan forum informasi belajar-pembelajaran. Meskipun forum tersebut lebih bersifat informal ketimbang formal, namun karena adanya unsur perencanaan yang dilakukan oleh fasilitator, maka settingnya cenderung digolongkan sebagai formal, instructional setting.

Interaksi belajar-pembelajaran pada masa-masa awalnya terutama dimaksudkan untuk memahami secara lebih luas dan komprehensif mengenai gagasan dan konsep koperasi itu.

Melalui kegiatan interaksi belajar-pembelajaran itulah perintisan gerakan koperasi pedesaan dilakukan oleh pemimpin puncak lokal. Dalam kegiatan interaksi belajar-pembelajaran itu, gagasan dan konsep diupayakan untuk lebih dipahami bersama, dipikirkan kemungkinan aplikasinya, dan pengembangannya.

4. Subyek Sasaran Difusi., Kelompok Perintis dan Kelompok Pendukung

Ketika pemimpin puncak lokal menetapkan akan mendifusikan gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu, lebih dahulu ia menetapkan subyek sasarnya- Beberapa orang dari kalangan elit lokal, yang merupakan kerabat keluarganya dipilihnya sebagai subyek" sasaran pertama. Pertimbangannya dalam memilih adalah berdasarkan perkiraannya mengenai kemungkinan subyek sasaran tersebut dilibatkan sebagai perintis pengembangan gerakan koperasi di desanya, dengan melihat kondisi sosial-ekonominya, sikap pandangannya, dan kemampuannya bekerja tanpa semata-mata menggantungkan harapan pada koperasi.

Kelompok kecil yang secara berangsur-angsur terbentuk itu, oleh pemimpin dilibatkan dalam interaksi pembelajaran untuk memahami dan menghayati gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola KUD yang akan diaplikasikan kelak. Pemimpin lebih berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan sumber belajar dengan peserta didik. Sumber belajar direkrut dari kerabat keluarga yang bertugas pada Kondepkop. Dengan demikian, semua yang terlibat di dalam interaksi belajar-pembelajaran itu masih terikat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Jumlah anggota kelompok yang kecil dan hubungan kekerabatan yang masih kuat menyebabkan adanya suasana informal dan famillarity dalam hubungan di antara masing-masing yang terlibat. Suasana yang

demikian cenderung menimbulkan iklim pembelajaran yang positif terutama bagi peserta dewasa di pedesaan.

Dalam perkembangan selanjutnya kelompok kecil ini berperan sebagai perintis pengembangan gerakan koperasi. Aktivitasnya yang pertama setelah berbagi tugas di antara sesama mereka adalah menyelenggarakan kegiatan koperasi yang mengintegrasikan unit-unit kegiatan yang sudah ada sebelumnya, seperti unit penggilingan gabah dan unit pergudangan dan penjemuran gabah.

Kelompok perintis ini selanjutnya bersama-sama dengan pemimpin puncak lokal melakukan kegiatan pengembangan untuk memperluas dukungan terhadap gerakan koperasi yang telah mulai jalan itu. Kegiatan persuasi dilakukan oleh masing-masing, baik oleh pemimpin puncak lokal maupun anggota-anggota kelompok perintis. Subyek sasaran juga dipilih dari kalangan elit lokal dan kerabat keluarga. Seperti halnya pada waktu merekrut anggota kelompok perintis, maka dalam upaya merekrut pendukung itu, faktor kredibilitas pemimpin puncak lokal, H. Palessei, dimanfaatkan sebagai unsur penunjang kegiatan persuasi. Dukungan pemimpin terhadap pengembangan gerakan koperasi dijadikan sebagai jaminan psikologik bagi pelibatan para subyek sasaran untuk mendukung gerakan koperasi itu. Selain itu, para anggota kelompok perintis adalah orang-orang yang tidak atau belum pernah memiliki cacat-cela dalam pandangan masyarakat.

Dalam upaya memperluas dukungan terhadap pengembangan gerakan koperasi itu, metode yang digunakan masih juga menekankan pada komunikasi informal antarpersonal. Masing-masing dari anggota kelompok perintis melakukan kegiatan persuasi terhadap satu dua orang dari kalangan kerabat keluarga atau tetangganya yang terdekat dalam kehidupannya sehari-hari. Selain itu, pemimpin puncak lokal juga aktif melakukan kegiatan persuasi terhadap subyek sasaran yang sama. Dengan begitu intensitas kegiatan persuasi terhadap subyek sasaran yang sama tersebut menjadi lebih kuat.

Pertanyaan yang dengan mudah akan timbul ialah apakah pihak subyek sasaran dengan begitu saja menyatakan kesediaannya mendukung gerakan koperasi, berdasarkan ajakan dari anggota kelompok perintis itu. Tidakkah ada yang serta merta menolak, atau secara diplomatik membuat dalih untuk tidak ikut serta dalam gerakan koperasi tersebut.

Scepticism dalam bentuk sikap dan atau perilaku covert bukannya tidak mungkin ada. Akan tetapi, pada diri orang desa pada umumnya terdapat kecenderungan konformitas yang kuat. Kecenderungan inilah, menurut Hovland, yang memudahkan seseorang, yang dalam hal ini subyek sasaran difusi, menjadi mudah dipersuasi. Obyek dari orientasi afiliasi subyek sasaran ini cenderung memberikan persuasi yang akumulatif sifatnya, karena beberapa sebab. Pertama,

karisma pemimpin puncak lokal yang menjadi pelopor utama gerakan koperasi. **Kedua**, hubungan kekeluargaan antara subyek sasaran difusi dengan anggota kelompok perintis yang menjadi sumber pesan pembelajaran persuasif itu. **Ketiga**, konteks sosial pedesaan yang memiliki semangat keguyuban yang kuat, yang mengkondisikan kecenderungan afiliasi yang juga kuat. **Keempat**, komunikasi interpersonal menurut Rogers (1971) pada dasarnya memang juga memiliki keefektifan dalam melakukan aktivitas persuasi. Keunggulannya, antara lain, ialah dimungkinkannya terjadi pertukaran ide secara langsung antara komunikator dengan penerima pesan, sehingga faktor penghambat psikologis yang menyangkut kerangsangan selektif, persepsi, dan perhatian dapat dikurangi atau dihilangkan (Rogers, 1971, h. 252).

Hal yang sama seperti itu juga pada dasarnya terjadi ketika pemimpin puncak lokal mempersuasi subyek sasaran yang kemudian tergabung dalam kelompok perintis. Scepticism cenderung hanya pada taraf sikap dan perilaku covert.' Kecenderungan konformisme dan motivasi afiliasi melebihi keragu-raguannya dalam menanggapi persuasi pemimpin puncak lokal. Konteks sosial di mana berlangsung komunikasi difusi inovasi, yaitu kunjungan silaturahmi pemimpin kepada subyek sasaran, yang menurut tata krama menempati posisi subordinasi sangat memudahkan terjadinya pengaruh persuasi terhadap diri subyek sasaran difusi. Dalam tata krama kesopanan, pihak yang menempati posisi

subordinasi lebih memiliki kepantasan berkunjung kepada pihak yang lebih dihormati daripada sebaliknya. Apabila terjadi pihak yang lebih dihormati mengunjungi pihak yang subordinate > maka bagi pihak yang terakhir ini akan merasakan mendapat kehormatan lebih. Dan sebagai imbalannya, ia akan berusaha secara maksimal berbuat apa saja bagi kesenangan pihak yang datang berkunjung itu. Dalam konteks sosial seperti itulah cenderung terjadi kemudahan pengaruh persuasi.

Upaya difusi inovasi yang dilakukan oleh pemimpin puncak lokal sebagai konsekuensi keputusan adopsi inovasi yang dilakukannya, menjadikan kalangan elit lokal yang dipilihnya, sebagai subyek sasaran difusi. Kalangan inilah kemudian yang berkembang menjadi kelompok perintis gerakan koperasi atas dorongan pemimpin puncak lokal. Selanjutnya, subyek sasaran berikutnya dari upaya difusi inovasi yang dilakukan oleh pemimpin puncak lokal maupun kelompok perintis juga masih dari kalangan elit lokal. Kalangan inilah yang kemudian berkembang menjadi kelompok pendukung pertama gerakan koperasi pedesaan. Sesungguhnya kelompok perintis dan kelompok pendukung itu terdiri dari orang-orang yang masih terikat hubungan kekerabatan dan kekeluargaan.

5. Masukan Sosio-struktural dan Sosio-kultural

Struktur sosial menurut J. A. A. van Doorn dan C. J. Lammers (1959), dapat dijelaskan dengan dua alternatif.

Pertama, sebagai jaring-jaring dari sejumlah relasi sosial dan hubungan sosial di dalam suatu pola atau kombinasi yang unsur-unsurnya ajeg, seperti yang tergambar dari suatu jarak sosial, suatu bentuk integrasi dan suatu jenis perbedaan tingkatan di antara pelaku-pelakunya dalam hubungan sosial itu. (Sajogyo, 1985, h. 48).

Istilah-istilah jarak sosial, integrasi sosial, dan tingkatan sosial menggambarkan dimensi-dimensi sosial struktural. Kedua, struktur sosial dapat pula dilihat sebagai kombinasi atau susunan sejumlah posisi sosial yang saling berhubungan dan saling mengisi. Berdasarkan fungsi-fungsi tertentu dari interaksi yang menjadi ciri pelaku-pelaku tertentu, maka kita dapat membedakan sejumlah posisi, misalnya yang berfungsi pemimpin menduduki posisi pemimpin, sedangkan yang berfungsi mengikuti menduduki posisi pengikut.

Setiap masyarakat yang teratur mencerminkan adanya struktur sosial, yang merupakan jaringan sejumlah relasi dan hubungan sosial, serta susunan sejumlah posisi-posisi sosial yang saling berhubungan. Posisi-posisi itu menandai peranan-peranan setiap orang dalam kehidupan bersama, yang berbeda-beda menurut persepsi dan penilaian terhadap peranan tersebut.

Pitirim A. Sorokin (1954) mengemukakan bahwa ciri tetap yang umum bagi setiap masyarakat yang teratur (organized), ialah adanya pelapisan-pelapisan dari kedudukan-kedudukan yang bertingkat-tingkat dari atas ke

bawah. Terjadinya pelapisan-pelapian atau stratifikasi sosial itu berpangkal dari ketidaksamaan (inequality) dalam kehidupan masyarakat.

Sumber ketidaksamaan itu, menurut Beteille (1977), ada dua, yaitu status dan organisasi. Status berbeda-beda berdasarkan nilai-nilai dalam masyarakat. Dalam penelitian ini status dikaitkan dengan penghargaan dan respek yang tinggi terhadap posisi-posisi tertentu dalam hirarkhi status. Sedangkan organisasi memberikan posisi kekuasaan dan/atau wewenang (power/authority) kepada sebagian warga masyarakat. Kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat. Karena itu timbulah makna pokok kekuasaan, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak dari pihak pemegang kekuasaan.

Stratifikasi sosial dapat bersifat tertutup (closefl social stratification) dan dapat pula bersifat terbuka (open social stratification). Stratifikasi sosial yang bersifat terbuka memberikan peluang bagi setiap warga masyarakat untuk berusaha pindah atau naik dari satu strata ke strata lain di atasnya. Dapat pula terjadi perpindahan seseorang dari strata yang di atas ke strata yang di bawah-. Sebaliknya pada stratifikasi sosial yang tertutup tidak memberikan peluang bagi seseorang untuk pindah dari strata yang satu ke strata yang lain, misalnya pada masyarakat yang mengenal sistem kasta atau sistem feodal yang ketat.

Lokasi penelitian ini berada dalam daerah Sulawesi

Selatan, yakni pada ujung sebelah selatan jazirah ini. Di Sulawesi Selatan pada masa yang lalu, sistem kemasyarakatannya berpusat pada raja (karaeng atau arung). Karaeng atau arung adalah sebagai tokoh pemimpin yang menjadi titik sentral serta sumber dinamika sosial.

Bertolak dari dasar pemikiran sosi o-struktural, maka dapat ditemukan adanya tiga strata sosial di Sulawesi Selatan di masa yang lalu. Ketiga strata sosial itu ialah: (1) strata karaeng atau arung, (2) strata tomaradeka dan (3) strata gta (Mattulada, 1977). Strata (bangsawan) memiliki ciri tersendiri yang membedakan eksistensi sosialnya dengan strata yang di bawahnya. Mark Bloch menyebutkan ciri-ciri bangsawan, yaitu **pertama** harus memiliki status legalnya sendiri yang menegaskan status legal yang dituntutnya. Kedua, status tersebut haruslah turun temurun dengan kualifikasi bahwa sejumlah keluarga baru dapat saja diterima dalam lingkungan itu, jika ketentuan-ketentuannya yang berlaku secara formal dipenuhi. (Kartidirdjo, 1981, h. 25).

Di masa yang lalu strata kebangsawanan menikmati privilese-privilese politik, sosial, dan ekonomi di Sulawesi Selatan. Hal ini terutama sangat menonjol di daerah-daerah yang pernah menjadi pusat-pusat kerajaan, baik yang besar seperti Gowa dan Bone, maupun yang kecil-kecil seperti di Gattareng, Kindang, Tiro, dan lain sebagainya. Namun pada masa kemerdekaan dan terutama dalam

masa pembangunan sekarang ini, privilese politik dan ekonomi tidak ada lagi pada mereka.

Dalam pada itu strata ata oleh pemerintah kolonial dilarang adanya. Dengan demikian, telah terjadi penyederhanaan stratifikasi secara normatif, meskipun secara aktual masih tetap ada sampai waktu yang lama. Meskipun Privilese politik dan ekonomi tidak lagi ada bagi para keturunan bangsawan, namun dalam segi etika sosial masih tetap ada semacam privilese sosial. Sebutan andi sebagai nama depan masih merupakan kebanggaan tersendiri atau sebutan petta di belakang nama diri seseorang di tanah Bugis atau karaeng dan daeng di tanah Mangkasa.

W.F.M. Hofstede menemukan dari hasil penelitiannya pada empat desa di Jawa Barat pada tahun 1970, adanya penyederhanaan stratifikasi menjadi: (1) elit desa, dan (2) massa. Keempat desa yang diteliti itu ialah Situraja, Bangbayang, Sindangsari, dan Purwodadi. Patokan pembentukan strata berdasarkan pemilikan sawah, kebun, dan rumah makin lama makin kabur dan kurang diperhatikan. Yang dipandang sebagai elit lokal ialah lurah, pegawai-pegawai daerah dan pusat, guru-guru, tokoh-tokoh agama, dan politik serta petani kaya.

Pemimpin formal dan pemuka masyarakat sebagaimana dikemukakan di atas, tergolong elit desa. Para pemimpin formal di desa dimaksudkan ialah mereka yang mempunyai kedudukan resmi dalam kegiatan administrasi desa,

sedangkan pemuka masyarakat ialah orang-orang yang berpengaruh dan diakui sebagai pemimpin suatu kelompok khusus atau umum, meskipun tidak menduduki suatu kedudukan resmi di desanya. Mereka ini dalam berbagai kepustakaan disebut juga pemimpin informal. Bahwa golongan terpelajar di desa juga digolongkan kelas elit lokal, menunjukkan bahwa modernisasi sedang berlangsung di pedesaan.

Selo Soemardjan dalam suatu penelitian yang lain, yaitu di desa Bojong, kecamatan Pengandaran, Jawa Barat menunjukkan bahwa dalam organisasi-organisasi jenis baru, seperti koperasi, ada tendensi bahwa golongan intelek desa lebih berperanan, karena masalahnya lebih berkaitan dengan masalah-masalah nasional. Sedangkan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat tradisional, seperti urusan lumbung desa dan lain-lain diserahkan kepada mereka yang kurang terpelajar. (Susanto, 1983, h. 84).

Stratifikasi yang telah mengalami penyederhanaan sebagaimana ditemukan dalam penelitian Hofstede di Jawa Barat tersebut di atas, sesungguhnya sangat mirip dengan stratifikasi sosial yang dijumpai di desa Bontosunggu yang menjadi lokasi penelitian ini. Di desa ini tidak dijumpai secara nyata adanya lapisan masyarakat bangsawan, sebagaimana di beberapa desa tetangganya, seperti Kindang, Gantareng, dan sebagainya. Juga lapisan keturunan ata tidak ditemukan di desa ini.

Dengan demikian, sistem pelapisan sosial di desa

Bontosunggu dapat digambarkan sebagai hanya terdiri atas lapisan elit lokal dan lapisan massa. Yang dapat digolongkan sebagai lapisan elit lokal ialah mereka yang mempunyai kedudukan resmi dalam kegiatan administrasi desa, seperti perangkat pamong desa, guru-guru dan pegawai negeri, pemuka masyarakat atau pemimpin informal, dan para petani kaya.

Tidak adanya lapisan keturunan bangsawan dalam struktur kemasyarakatan di Bontosunggu, menunjukkan bahwa di masa yang lalu desa hanya merupakan wilayah pinggiran dari daerah kerajaan, yang dihuni oleh golongan tomaradeka.

Golongan elit lokal di Bontosunggu ini tidak menikmati suatu hak privilese sebagaimana halnya golongan elit berdasarkan kebangsawanan, yang lazim ditemui di daerah lain. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat faktor sosio-struktural yang mendorong tumbuhnya semacam sikap-sikap eksklusif golongan elit.

Dengan tidak adanya faktor sosio-struktural bagi tumbuhnya semacam eksklusifisme kelompok elit, baik karena motif kebangsawanan maupun karena motif keberhasilan sosial-ekonomi (kekayaan), maka tidak dirasakan masalah kesenjangan sosial. Oleh karena masalah kesenjangan sosial merupakan faktor utama yang seringkali menjadi penghambat tumbuhnya semangat kebersamaan dan solidaritas sosial, itu tidak dijumpai di desa Bontosunggu, maka dari segi

sosio-struktural tidak terdapat hambatan yang berarti bagi pengembangan gerakan koperasi. Asumsi ini dipunyai juga oleh H. Palessei, pemimpin puncak lokal Bontosunggu, Makkulau, seorang guru di Bontosunggu, dan anggota KUD Hattirobulu, serta Ince Mansyur, pensiunan Kakandep Dikbud Bulukumba yang juga seorang aktivis gerakan koperasi semenjak muda, dan saat ini menjadi ketua Koperasi Pegawai Negeri merangkap Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Bulukumba,

Semangat kebersamaan dan solidaritas sosial serta kerja sama gotong royong, merupakan faktor prinsipal yang menyediakan lahan sosial-psikologis bagi tumbuhnya gerakan koperasi. Faktor-faktor ini sebenarnya " terdapat dalam masyarakat pada umumnya. Namun demikian, seringkali aktualisasinya terhambat oleh adanya kesenjangan sosial antarkelompok masyarakat dan antarstrata sosial. Kesenjangan sosial itu cenderung memberi peluang bagi dominasi kelompok sosial atau strata sosial tertentu terhadap tatanan maupun kesempatan memperoleh akses di bidang ekonomi, sosial, politik, maupun budaya.

Dominasi tersebut secara sosial-psikologis merupakan faktor bagi tumbuhnya dan berkembangnya kecenderungan eksklusifisme kelompok atau strata yang pada gilirannya dapat menciptakan jurang antargolongan dan lapis sosial.

Dapatlah dikatakan bahwa realitas sosio-struktural yang dijumpai di desa Bontosunggu merupakan lahan sosio-

psikologis bagi pengembangan gerakan koperasi pedesaan. Dan dengan demikian, tidak mengherankan bahwa KUD Mattirobulu yang tumbuh dan berkembang di desa ini mampu menunjukkan prestasi yang baik. Kemajuan KUD ini secara terus-menerus semenjak dimulainya gerakan koperasi pedesaan di Bontosunggu pada tahun 1973, telah menghasilkan penghargaan sebagai KUD teladan nasional dan regional selama satu dasawarsa terakhir, tanpa pernah terputus. Unit-unit usahanya selain bergerak di desa Bontosunggu, yakni yang berkaitan langsung dengan kehidupan petani, juga bergerak di desa, kecamatan bahkan kabupaten lain.

Istilah kultur dari *culture* sama arti dengan kebudayaan, dan berasal dari kata Latin colere yang artinya mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari perkataan colere kemudian culture diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Kata kebudayaan yang sama artinya dengan culture berasal dari kata sansekerta buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan akal budi. (Koentjaraningrat, 1965, h. 77 - 78).

Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi (1964) mengemukakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*material culture*) yang

dibutuhkan manusia. Rasa mencakup jiwa manusia, mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan - Di dalamnya termasuk agama, ideologi, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi jiwa manusia. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir manusia yang menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Rasa dan Cipta digolongkan ke dalam kebudayaan rohaniah (spiritual atau immaterial culture). Sedangkan keseluruhan karya, rasa, dan cipta dikuasi oleh karsa dari orang-orang yang menentukan kegunaannya agar sesuai dengan kepentingan sebagian besar atau seluruh masyarakat.

Kebudayaan sebagaimana dijelaskan di atas, terdapat pada semua masyarakat. Fungsi kebudayaan pada dasarnya adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat manusia, baik yang bersifat material maupun yang bersifat spiritual dan mental.

Dalam setiap masyarakat terdapat pola-pola perikelakuan atau patterns of behavior, yakni cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari orang-orang dalam masyarakat tersebut. Sejalan dengan itu maka tidak mengherankan bahwa salah satu definisi lain dari kebudayaan ialah sebagai perilaku berpola yang ada dalam kelompok tertentu yang anggota-anggotanya memiliki makna yang sama serta simbol yang sama untuk mengkomunikasikan makna tersebut.

Kebudayaan terdapat di semua masyarakat dengan corak dan tingkat perkembangannya masing-masing. Kebudayaan mempunyai unsur-unsurnya yang bersifat universal, yakni unsur-unsur yang terdapat pada setiap kebudayaan di mana pun di dunia. Akan tetapi, masing-masing kelompok atau juga masyarakat mengembangkan juga ciri-ciri kebudayaannya masing-masing. Oleh karena itu, seringkali dikatakan bahwa setiap masyarakat memiliki corak kebudayaannya sendiri, dan orang-orang dari kelompok masyarakat tersebut mempunyai karakteristik kepribadian yang khas yang berbeda dengan orang-orang dari kelompok masyarakat yang lain.

Sebagaimana telah dikemukakan, pada setiap komunitas terdapat sistem nilai budaya sendiri dengan karakteristik yang bersifat khas. Begitu juga halnya dengan komunitas Bugis-Makassar terdapat sistem nilai budaya yang merupakan nilai acuan orang-orang dari komunitas tersebut. Nilai budaya, sebagaimana telah dikemukakan oleh Koentjaraningrat (1981), adalah ide-ide yang mengkonsepsikan hal-hal yang paling bernilai dalam kehidupan masyarakat, yang bersifat luas dan kabur, serta tidak rasional dan berakar dalam kegiatan emosional dari jiwa manusia.

Sistem nilai budaya etnis Bugis-Makassar berpusat pada konsep nilai budaya siri., yang mengkonsepsikan mengenai harga diri atau martabat yang wajib dipelihara

dan dijunjung tinggi sepanjang hayat. Keharusan moral untuk menjaga dan menjunjung tinggi harga diri atau martabat itu ditegaskan dalam ungkapan: siri emi rionroang ri lino_f utettong ri ade'e najagainnami siri'ta, naia siri'e sunge' naranreng, nyawa nakira-kixu. Artinya secara harfiah ialah, hanya demi siri kita hidup di bumi, aku tegak berdiri pada adat karena adat memelihara siri kita, siri itu jiwa imbalannya, nyawa taruhannya.

Dalam konteks nilai budaya siri itu setiap orang wajib memelihara dan menjunjung tinggi martabat atau harga dirinya, keluarganya atau kerabatnya, bahkan kelompok dan komunitasnya. Dalam kaitan ini orang tua di masa lalu mengajarkan kepada anak cucunya petuah dalam bentuk ungkapan: aja muappakasiri (Bugis) atau teako appaka-sirikl (Makassar). Artinya jangan engkau berbuat sesuatu yang dapat menyebabkan kita »asiri (malu, jatuh harga diri). Masiri atau malu atau hilang martabat/harga diri adalah suatu keadaan kejiwaan yang dialami, dalam mana harga diri atau martabat kehormatan dirasakan jatuh atau merosot, baik karena ulah orang lain maupun karena ulah perbuatan sendiri.

Mappakasiri-siri dan masiri sebagai suatu keadaan atau hal yang tidak dikehendaki dan yang harus dicegah kemungkinannya menimpa diri pribadi, kerabat, keluarga dan bahkan komunitas dalam mana seseorang menjadi warga, mensyaratkan :

(1> Motivasi yang kuat untuk membuktikan kemampuan, kebiasaan atau kesanggupan.

(2} Usaha maksimal, tidak putus asa, pantang surut.

(3) Berpikir masak-masak, berpikir hati-hati, dan cermat sebelum menetapkan suatu keputusan.

(4) Konsisten terhadap keputusan yang telah ditetapkan dan konsekuen terhadap pelaksanaannya.

(5) Tanggung jawab moral dan sanggup membuktikan aktualisasi diri.

{6} Sikap rendah hati, bersahaja, tidak meremehkan orang lain, tenggang rasa.

To engka sirlna atau orang yang memiliki martabat atau harga diri, ta matanre siri atau orang yang memiliki martabat atau harga diri yang tinggi adalah seseorang yang tingkat aspirasi untuk aktualisasi dirinya tinggi. Orang yang demikian akan selalu berusaha untuk bersikap correct, senantiasa menjaga citra diri, seorang yang patut di hargai dan dihormati. Sedangkan istilah toriasiri ialah seseorang yang disegani, berwibawa, panutan bagi orang lain di sekitarnya karena ia memiliki komitmen yang kokoh terhadap nilai-nilai yang luhur, seperti keberanian, kejujuran, sikap adil, tenggang rasa, kesahajaan, dan sebagainya.

Pemimpin puncak lokal desa Bontosunggu, H. Palessei dikenal warga desanya sebagai toriasirl. Kualitasnya sebagai toriasiri itulah sesungguhnya yang merupakan

faktor utama keberhasilan usaha persuasinya untuk pengembangan gerakan koperasi di desanya. Pengetahuannya tentang konsep koperasi itu sendiri, serta kecakapannya dalam pengembangan program koperasi tidaklah memadai. Oleh karena itulah, maka pada masa perintisan gerakan koperasi di desanya, ia secara dini merekrut kelompok perintis yang dipandangnya mampu melakukan aktivitas perintisan itu untuk bersama-sama belajar dan belajar bersama memahami gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang diintroduksikan.

Pada dasarnya H. Palessei tidak luput dari perasaan ragu pada saat akan mengambil keputusan adopsi inovasi gagasan dan konsep koperasi itu. Bahkan juga setelah melakukan keputusan adopsi itu keraguan tetap dirasakannya. Akan tetapi, posisinya sebagai perpanjangan dari perangkat birokrasi dengan loyalitas dan dedikasi yang tinggi di satu sisi menempatkannya pada situasi dengan kecenderungan yang kuat untuk menyetujui dan mengaplikasikan gagasan dan konsep itu. Sedangkan di sisi yang lain, ia juga memiliki komitmen yang kuat terhadap kepentingan perbaikan hidup warga desanya, sesuai dengan makna semboyannya di masa gerakan penumpasan gerombolan pengacau: Iya elokka lao gerei bembe-e, de uelo lao bawang manre bembe (saya mau datang untuk menyembelih kambing, bukan untuk sekedar makan kambing atau pesta). Dan secara intuitif, sebagaimana dikatakannya sendiri, ia melihat peluang

koperasi pedesaan itu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat apabila dikelola dengan sungguh-sungguh dan benar.

Berlatar belakang perasaan ragu tersebut, maka sesungguhnya keputusan adopsi yang dilakukannya adalah suatu tindakan yang berani. Untuk mengambil keputusan yang demikian, hanya dapat dilakukan oleh seorang yang tergolong macca jnpuno bata-bata, yaitu seseorang yang pandai mematikan perasaan ragu-ragu yang ada pada dirinya. Keberaniannya mengambil keputusan adopsi inovasi itu lebih lagi kadarnya, jika dikaitkan dengan adanya citra negatif koperasi dan sikap masyarakat yang skeptis terhadap gerakan koperasi, yang dimanifestasikan dalam ungkapan melecehkan: asenna mupa koperasir, kuperra 'si (namanya saja pun koperasi, ... aku peras lagi).

Dalam situasi yang demikian itu, adalah merupakan suatu kearifan bahwa gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu tidak secara serta merta diusahakan sosialisasi dan adaptasinya secara massal. Ia justru memilih secara cermat dari kalangan sangat terbatas subyek sasaran persuasi untuk kepentingan difusi inovasi gagasan dan konsep tersebut. Jumlah orang yang terbatas tetapi dengan tingkat keguyuban yang tinggi, karena terdiri dari karabat keluarga, dengan jarak sosial-psikologis yang dekat memudahkan motivasi, mobilisasi, dan dinamisasinya bagi pengembangan gerakan koperasi.

Kedekatan jarak sosial-psikologis lebih memudahkan

untuk menumbuhkan perasaan we feeling, Perasaan we feeling itu pada gilirannya dapat ditumbuhkan menjadi kesadaran kelompok yang tinggi dengan unsur-unsurnya yaitu doing together, thinking together and feeling together sebagaimana dikatakan oleh Lasswell. (Lasswell dan Kaplan, 1969, h. 30),

Kelompok perintis yang anggota-anggotanya direkrut secara selektif dengan jumlah yang kecil itu, masih dapat digolongkan sebagai social group sebagaimana dikatakan oleh Park dan Burgess (1964). Dalam kelompok yang demikian, masih dijumpai faktor-faktor (1) an interrelationship of persons, (2) an interplay of personality, dan (3) a moving unit interacting personalitis. Faktor-faktor itulah yang memungkinkan tumbuhnya we attitude atau perasaan sense of belonging di antara anggota-anggotanya.

Dengan demikian, pemilihan subyek sasaran difusi dalam jumlah sangat terbatas itu, dan hanya meliputi orang-orang tertentu saja pada awal pengembangan gerakan koperasi desa Bontosunggu, jelas merupakan suatu tindakan arif dari pemimpin puncak lokal. Sebagai suatu kelompok dengan jumlah anggota yang kecil, dan dengan tingkat keguyuban yang tinggi itu telah sangat memudahkan untuk menggalangnya menjadi kelompok perintis-

Selanjutnya, adalah suatu kearifan pula bahwa kelompok yang tingkat keguyubannya tinggi itu dimotivasi,

dimobilisasi, dan didinamisasi oleh pemimpin puncak lokal dengan acuan konsep nilai budaya siri.

Kerabat keluarga, kelompok, dan bahkan komunitas dari mana seorang toriasiri berasal, dari segi etika moral kebersamaan memiliki tanggung jawab moral menjaga reputasi toriasiri. Oleh karena itu, tindakan pemimpin puncak lokal sebagai toriasiri di lingkungannya mengaitkan pengembangan gerakan koperasi di desanya dengan reputasinya, maka gerakan koperasi itu telah menjadi sesuatu yang bersifat imperatif bagi kelompok perintis. Reputasi toriasiri adalah reputasi kelompok, komunitas, dan kerabat keluarga, juga dari mana toriasiri itu berasal. Semua dan masing-masing di antaranya menanggung beban moral dan kewajiban moral memelihara reputasi itu.

Pengembangan gerakan koperasi telah diletakkan dalam konteks nilai budaya siri oleh H. Palessei. Reputasinya sebagai toriasiri dipersepsi sebagai identik dengan keberhasilan upaya pengembangan gerakan koperasi itu di desanya. Kelompok perintis yang terdiri dari orang-orang yang tergolong to enaka sirina, (orang yang memiliki siri), atau mungkin dapat dipadankan dengan pengertian orang yang beradab, dengan demikian, telah merasa dipertaruhkan martabat atau harga dirinya. Dengan begitu mereka masing-masing secara pribadi telah ditempatkan dalam posisi menghadapi tantangan, dalam hal ini pengembangan gerakan koperasi itu. Dalam konteks nilai

budaya siri bagi orang yang tergolong berkualitas to engka sirina tantangan haruslah dijawab atau dihadapi.

Dari paparan di atas terlihat bahwa konsep nilai budaya lokal telah memberikan masukan positif dan konstruktif terhadap pengembangan gerakan di desa Bontosunggu. Hal itu tidak terlepas dari kearifan pemimpin puncak lokal yang secara kreatif mengaktualisasikan kembali konsep nilai budaya siri. Reaktualisasi konsep nilai budaya lokal itu mungkin tidak dengan sendirinya dapat dilakukan oleh setiap pemimpin puncak lokal. Tampaknya diperlukan pemimpin berciri panutan dan kreatif untuk hal tersebut. Kreativitas pemimpin dalam hal ini ialah menempatkan upaya pengembangan gerakan koperasi dalam konteks nilai budaya siri, dan sekaligus menempatkan kelompok perintis pada posisi menghadapi tantangan. Jawaban yang tidak boleh tidak harus diberikan terhadap tantangan itu, adalah kerja keras yang sungguh-sungguh.

Sayogya (1988) dalam pernyataannya mengomentari tulisan Herman Soewardi, menunjuk kepada pentingnya memahami dasar potensi sumber daya budaya wilayah yang dapat menjadi tumpuan membangun "lembaga perkoperasian" yang berakar di bumi tiap lingkungan wilayah. Komentar Sayogya tersebut tampaknya relevan dengan kasus pengembangan gerakan koperasi pedesaan di Bontosunggu.

Dari paparan di atas, terungkap makna sosio-kultural sebagai masukan (input) terhadap pengembangan

gerakan koperasi pedesaan. Terungkap dari studi ini bahwa yang pertama dibutuhkan bagi upaya pengembangan gerakan koperasi pedesaan adalah adanya konsep nilai budaya sebagai acuan nilai, yang pada gilirannya menumbuhkan etika moral sebagai referensi dari tindakan atau perilaku yang diragakan para perintis dan pendukung gerakan koperasi.

Pengetahuan dan keterampilan barulah kemudian diupayakan pemerolehannya dalam prose pengembangan gerakan koperasi itu, baik sebagai natural societal learning maupun sebagai formal instructional learning. Dengan perkataan lain, apabila ditempatkan secara berurutan, maka yang pertama adalah konsep nilai sebagai acuan yang menumbuhkan etika moral dan tindakan atau perilaku yang dilahirkannya (berupa aktivitas pengembangan gerakan koperasi), dan baru kemudian pengetahuan dan keterampilan. Sudah barang tentu ini tidak berarti bahwa yang lain boleh ditiadakan oleh yang pertama.

Nilai-nilai merupakan referensi sikap dan perilaku termasuk keputusan untuk bertindak, sedangkan pengetahuan dan keterampilan meningkatkan efektivitas tindakan atau perilaku yang dipilih.

6. Perspektif Pendidikan Pengembangan Gerakan Koperasi Pedesaan

Pendidikan, dalam hal ini pendidikan luar sekolah

dipahami secara beragam menurut dimensi penekanan penelaahannya. Dalam kegiatan dengan pengembangan gerakan koperasi pedesaan yang menjadi pokok yang ditelaah dalam studi ini, PLS dipahami sebagai (1) proses' perubahan sikap dan perilaku, (2) proses pembentukan kewenangan (eiBDowering process) dan (3) proses transformasi sosial.

(1) Pendidikan sebagai proses perubahan sikap dan perilaku

Pendidikan, dalam hal ini pendidikan luar sekolah sebagai proses perubahan sikap dan perilaku menempatkan faktor motivasi sebagai faktor penting. Motif merupakan kekuatan penggerak dari dalam diri individu untuk melakukan suatu perbuatan- Individu memiliki sejumlah motif dengan tingkat atau derajat intensitas yang berbeda-beda. Motif yang paling tinggi derajat intensitasnya adalah motif yang berhasil mendorong perwujudan suatu perilaku. Motif dan kebutuhan merupakan suatu konsep yang seringkali tidak dapat dibedakan.

Motivasi sebagai dinamika perilaku, bukan terutama menekankan pada apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya tetapi mengapa seseorang melakukan sesuatu tindakan.

Suatu perilaku tertentu boleh jadi merupakan manifestasi dari berbagai motif- Misalnya, keputusan adopsi pedesaan yang dilakukan oleh H. Palessei, kepala desa Bontosunggu, boleh jadi didorong oleh motif untuk

mendapat penghargaan. Mungkin juga untuk aktualisasi diri yang bersifat memperkokoh citra kepemimpinannya yang menyatukan citra kepemimpinan formal dan informal, atau ragam motif lainnya. Pada dasarnya kebutuhan akan penghargaan meliputi gengsi atau prestise dan kekuasaan atau power. Maslow (1970) menyatakan : "All people in our society ... have a need or desire for a stable, firmly based, usually high evaluation of themselves, for a self-respect, or self-esteem, and for the esteem of others".

Motif aktualisasi diri mendorong seseorang melakukan yang terbaik menurut kemampuannya. Maslow (1970) mengemukakan; " ... the individual's desire for self-fulfillment, namely, to the tendency for him to become actualized in what he is potentially", termasuk dalam kebutuhan kompetensi dan kebutuhan berprestasi.

Motif atau kebutuhan kompeten pada orang dewasa tampak pada adanya keinginan untuk mengendalikan faktor-faktor lingkungan, baik yang bersifat fisik maupun sosial, termasuk untuk menguasai pekerjaan atau pertumbuhan profesional.

Keputusan adopsi inovasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang dilakukan H. Palessei, tampaknya lebih didasari keberanian intuitif, loyalitas, dan semangat dedikasinya, baik sebagai aparat birokrasi maupun sebagai panutan. Gagasan konsep mengenai koperasi pedesaan itu sendiri bukannya sesuatu yang sederhana untuk

dipahami, dimengerti, apalagi untuk di prediksi kemungkinan aplikasinya. Keberanian, loyalitas dan semangat dedikasi itu sendiri, dapat digolongkan ke dalam kawasan kebutuhan aktualisasi diri.

Namun demikian, perlu diingat bahwa sikap dan perilaku orang dewasa hampir selalu didasari motif ganda. Oleh karena itu, mengidentifikasi satu motif saja sebagai penggerak suatu tindakan, adalah bersifat terlalu menyederhanakan. Keputusan adopsi inovasi yang dilakukan oleh pemimpin puncak lokal di Bontosunggu itu, dapat pula diterangkan dari segi kebutuhan dominan (n Dominance), sebagaimana disebutkan oleh Edward dalam Edwards Personal Preference Schedule (EPPS). Kebutuhan dominan tersebut adalah kebutuhan untuk menjadi pemimpin atau menjadi orang yang mengawasi rangkaian peristiwa-peristiwa. (Goldman, 1966, h, 59 - 60).

Telah dikemukakan bahwa terwujud atau tidaknya perilaku individu bergantung pada kekuatan motif yang mendorongnya. Ada dua faktor utama yang mempengaruhi kekuatan motif, yakni pengharapan (expectancy) dan ketersediaan (availability). Pengharapan, menurut persepsi individu, adalah peluang untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu berdasarkan pengalaman di masa yang lalu, sedangkan ketersediaan merupakan keterbatasan-keterbatasan lingkungan, sebagaimana dipersepsi oleh individu yang bersangkutan. Pengharapan cenderung mempengaruhi motif

atau kebutuhan, sedangkan ketersediaan cenderung mempengaruhi persepsi tentang tujuan. Kebutuhan atau motif individu diarahkan kepada tujuan yang diinginkan. Tujuan ditafsirkan individu dalam hubungannya dengan ketersediaan, yakni tersedia tidaknya di dalam lingkungan. Pada gilirannya ketersediaan ini mempengaruhi pengharapannya. Jika pengharapan itu tinggi maka kekuatan motif juga besar. Semakin tinggi harapan semakin besar pula kekuatan motif mendorong terwujudnya perilaku. Dengan demikian, terdapat daur hubungan antara motif dengan pengharapan, dan antara tujuan dengan ketersediaan. (Hersey dan Blanchard, 1977, h. 26 - 27).

Dalam mengamati proses sebelum dan sesudah terjadinya keputusan adopsi inovasi gagasan dan konsep koperasi itu, tampak adanya peranan faktor-faktor kebutuhan dominan, kebutuhan kompeten dan kebutuhan aktualisasi diri dalam spektrum kepribadian inovator.

Dalam konteks motivasi sebagai dinamika perilaku, sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka yang lebih penting dalam telaahannya bukanlah perilaku apa dan bagaimana wujud perilaku itu, melainkan mengapa perilaku itu terjadi.

Pada kalangan anggota kelompok perintis, yang dalam pengelompokan Rogers (1971) tergolong early adopters atau pendahulu, motif keputusan inovasinya juga bervariasi.

Bagi yang menduduki jabatan pamong tingkat desa

atau subdesa, motifnya dapat ditelusuri pada kebutuhan deferensi (n Deference), kebutuhan perlindungan (n Succorance), dan kebutuhan afiliasi (n. Affiliation)• Kebutuhan deferensi adalah kebutuhan untuk mengikuti petunjuk orang lain dan menghargai orang lain. Hal ini dapat dimengerti dari besarnya rasa hormat terhadap "tokoh panutan" yang mempersuasi dan memotivasi mereka untuk melibatkan diri dalam pengembangan gerakan koperasi itu. Kebutuhan perlindungan adalah kebutuhan untuk mendapatkan bantuan dan pengakuan dari orang lain. Ini dapat dimengerti jika dikaitkan dengan posisi mereka sebagai aparat pembantu kepala desa. Kebutuhan afiliasi adalah kebutuhan untuk bersama-sama dan bekerja sama dengan orang lain. Kepatuhan terhadap persuasi pemimpin puncak lokal dan kesediaan mereka berpartisipasi merintis pengembangan gerakan koperasi berkaitan juga dengan kebutuhan afiliasi ini.

Bagi kalangan yang tergolong kerabat keluarga pemimpin puncak lokal, motif keputusan inovasinya atau kepatuhannya terhadap persuasi pemimpin, dapat ditelusuri pada kebutuhan deferensi (n Deference) dan kebutuhan untuk membantu (n Nurturance). Kebutuhan yang disebutkan terakhir adalah kebutuhan untuk memberikan bantuan dan pengakuan terhadap orang lain.

Bagi kalangan kerabat keluarga tersebut, bahkan sebagai kewajiban moral untuk menikuti petunjuk atau

deferensi dan menghargai, memberikan pengakuan dan bantuan kepada pemimpin puncak lokal yang memprakarsai pengembangan gerakan koperasi. Kepala desa sebagai pemimpin puncak lokal adalah tokoh toriasiri dari kalangan mereka, sehingga sebagai kerabat dan keluarga, mereka berkewajiban moral menjaga nama baik toyiasiri, dengan jalan mendukung sepenuhnya dalam pengembangan gerakan koperasi itu.

Perilaku seseorang pada dasarnya mencerminkan sikapnya. Oleh karena itu, berbicara tentang perilaku tidak dapat dipisahkan dengan perihal sikap. Dapat dikatakan bahwa perubahan sikap adalah merupakan kunci perubahan perilaku. Pembentukan dan pengembangan sikap dapat dilakukan dengan pemberian informasi. Informasi dapat diperoleh dari dalam maupun dari luar kelompok.

Dalam pengembangan gerakan koperasi pola KUD itu, informasi diperoleh masyarakat desa adalah dari luar desa. Pemimpin puncak lokal sebagai representasi komunitas desa mendapatkan informasi tersebut dari perangkat birokrasi-atas desa. Settingnya pertama kali adalah formal instructional setting, baru kemudian juga pada natural societal setting. Pada yang pertama digunakan komunikasi formal sedangkan pada yang kedua digunakan komunikasi informal interpersonal.

Adopsi gagasan dan konsep gerakan koperasi pedesaan oleh pemimpin puncak lokal, H. Palessei, belum terjadi

pada waktu mengikuti formal instructional learning akan tetapi setelah beberapa waktu kemudian, melalui natural societal learning.

Keputusan adopsi inovasi, sebagaimana diketahui melibatkan proses mental, telah menyebabkan terjadinya perubahan sikap dan perilaku pemimpin yang bersangkutan. Upaya penyebaran gagasan dan konsep (adopsi inovasi) koperasi itu sehingga menjadi suatu gerakan di dalam masyarakat, terjadi sebagai dampak keputusan adopsi inovasi tersebut. Introduksi gagasan dan konsep melalui pemberian informasi lewat formal intructlonal setting maupun natural societal setting telah mempengaruhi, mengembangkan, dan mengubah pengetahuan, sikap dan perilaku warga pedesaan, yakni dalam hal ini dimulai pada pemimpin puncak lokal, kemudian sejumlah kecil kalangan elit lokal. Mereka para pengadopsi potensial inilah kemudian menjadi dinamisator pengembangan gerakan koperasi pedesaan.

Selain itu, pembentukan sikap juga ditentukan melalui afiliasi-afiliasi kelompok. (Krech, 1962, h. 213). Krech mengatakan : "The attitudes of the individual are shaped by the information to which he is exposed". Dia juga mengatakan : "The group affiliations of the individual help determine the formation of his attitudes".

Pembentukan sikap melalui afiliasi kelompok tersebut terjadi pula pada kelompok perintis dan pendukung gerakan koperasi di desa Bontosunggu. Melalui berbagai

proses komunikasi, penyuluhan, serta dialog-dialog dengan sumber dari luar, maupun di antara sesama mereka, sikap loyal dan dedikatif terhadap upaya pengembangan gerakan koperasi di desa mereka, semakin diperkuat. Demikian juga halnya dengan semangat kebersamaan, kerja sama, dan solidaritas menjadi semakin diperkuat.

(2 > Pendidikan sebagai proses empowering

Kindervatter (1979, h. 13) menjelaskan bahwa PLS sebagai empowering process mengacu kepada pemahaman dan pengendalian secara lebih baik oleh rakyat, terhadap kekuatan atau keadaan sosial, ekonomi, maupun politik untuk kepentingan peningkatan derajat kehidupan mereka dalam masyarakat. Dengan pemahaman dan kemampuan pengendalian tersebut, diharapkan mereka mampu bekerja sama dalam memecahkan masalah-masalah mereka.

Dalam konteks PLS sebagai empowering process, Kindervatter mengemukakan beberapa petunjuk berikut ini.

a. Kegiatan PLS sebaiknya merupakan kelompok kecil, 5-10 orang (small group structure).

b. Agen pembaharuan menyerahkan tanggung jawab kegiatan PLS secara berangsur-angsur kepada peserta didik. Untuk itu maka sudah sejak awal mereka dilibatkan dalam tanggung jawab pengelolaan kegiatan (transfer of responsibility).

c. Semua kegiatan diputuskan dan diatur bersama

dengan kepemimpinan juga dari kalangan mereka sendiri (participant leadership).

d. Agen berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai guru (agent as. SL facilitator).

e. Dalam kegiatan belajar tidak digunakan aturan hirarki yang kaku, semua kegiatan berjalan secara luwes berdasarkan kesempatan (democratic imd. nonhierarchical relationship and process).

f. Kegiatan belajar selalu diusahakan bertolak dari masalah-masalah yang dihadapi dan dialami peserta. Atas dasar itu kemudian menyusun rencana kegiatan serta menetapkan jenis pengetahuan dan ketrampilan yang perlu dipelajari (integration of reflection and action).

g. Metode dan teknik yang digunakan ialah yang bersifat merangsang atau menumbuhkan rasa percaya diri, misalnya kegiatan bersama atau dialog (methods which encourage self-reliance).

h. Bahan belajar sedapat mungkin berkaitan dengan kebutuhan dan kenyataan hidup sehari-hari peserta didik, misalnya tentang perbaikan sosial, ekonomi, dan politik. (Kindervatter, 1979, h. 153 - 154).

Pengembangan gerakan koperasi di desa Bontosunggu diawali dengan keputusan adopsi inovasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola KUD/BUUD oleh pemimpin ppncak lokal. Menyusul kemudian pembentukan kelompok perintis yang merupakan suatu kelompok kecil. Kegiatan pertama kelompok kecil ini sebelum berkembang menjadi kelompok

perintis, adalah berupa kegiatan belajar-pembelajaran-Posisi mereka adalah resipien dari kegiatan persuasi yang dilakukan oleh pemimpin puncak lokal bersama dengan sumber belajar dari Kandepkop yang direkrut secara informal. Pemimpin puncak lokal berperan sebagai agen pembaharu (faont pgg, change). Penampilannya bukan sebagai guru melainkan sebagai fasilitator yang mempertemukan warga belajar, yakni anggota kelompok perintis dengan sumber belajar. Tema persuasi menyangkut masalah kehidupan sosial ekonomi yang dihadapi dan prospek pengembangan gerakan koperasi pedesaan. Kegiatan pembelajaran lebih bersifat informal dan tidak terdapat aturan hirarki yang bersifat mengikat. Tanggung jawab kegiatan kelompok lambat laun diserahkan sepenuhnya kepada warga kelompok itu sendiri, sedangkan pemimpin puncak lokal lebih berperan menurut prinsip tut wuri handayani. Hal ini, misalnya, terlihat bahwa kegiatan kelompok tidak dipimpin oleh pemimpin puncak lokal, H. Palessei, melainkan oleh H. Abdul Hafid. Bahkan sampai kepada terbentuknya dan berkembangnya KUD Mattirobulu di desa Bontosunggu itu, H. Abdul Hafid tampil sebagai pimpinan. Dalam pada itu H. Palessei, pemimpin puncak lokal lebih berperan sebagai moral force yang selalu memotivasi warga kelompok.

Dari kelompok kecil yang semula merupakan subyek sasaran persuasi pembelajaran, kemudian menjadi kelompok perintis pengembangan gerakan koperasi, dan selanjutnya

menjadi pengelola organisasi koperasi, masing-masing dan bersama-sama terus mengalami pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan.

Kecakapan bekerjasama mengelola organisasi, keterampilan melakukan tugas-tugas administrasi, banyak diperoleh dari kegiatan belajar yang menekankan pendekatan bejajara aplikasi praktis, serta learning to learn from experince, di samping bimbingan yang diperoleh dari sumber belajar dari luar. Kemampuan dan perluasan wawasan, aspirasi, pengetahuan, dan ketrampilan tersebut, pada gilirannya menjadi aset yang penting bagi mereka untuk memahami secara lebih baik seta mengendalikan keadaan sosial, ekonomi di desa ke arah peningkatan derajat kehidupan mereka dan warga desa umumnya. Proses perkembangan yang disebutkan terakhir ini adalah proses pmpowering sebagaimana dikatakan oleh Kindervatter.

Pada saat penelitian ini berlangsung, KUD Mattirotobulu yapg merupakan produk dari pengembangan gerakan koperasi di desa Bontosunggu, mampu menguasai penampungan dan pemasaran gabah dan beras, palawija, penyaluran saprodi dan saprotan, periistrikan dan transportasi, jasa simpan pinjam, penggilingan gabah/beras, pengeringan dan penggudangan gabah dan palawija, perkreditan, pemasaran rumah KPR/BTN. Sedangkan berbagai unit kegiatan bisnis lainnya bergerak di luar desa wilayah kerjanya, termasuk di ibu kota kabupaten

Bulukumba termasuk unit kegiatannya di kabupaten lain.

Proses belajar-pembelajaran sebagaimana disebutkan di atas, dan yang disebut oleh Kindervatter sebagai eropowering process itulah asal mula dari kemampuan para penyelenggara KUD Mattirobulu meraih prestasi tersebut. Sudah barang tentu prestasi itu haruslah dipandang sebagai sesuatu yang sifatnya tentatif. Untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi itu, tetap diperlukan kegiatan belajar-pembelajaran bagi semua penyelenggara kegiatan koperasi dan bagi semua pendukung kegiatan tersebut. Ini berarti diperlukan continuous learning program yang menekankan pendekatan empowering process.

(3) Pendidikan sebagai proses transformasi sosial

Perubahan merupakan watak dari sistem sosial di mana pun juga dan kapan pun juga. Persoalannya ialah bagaimana menggerakkan perubahan itu dan ke arah mana perubahan itu ditujukan.

Perubahan sosial dirumuskan pengertiannya secara berbeda-beda oleh para pakar. Rogers (1971, h. 7) menyatakan bahwa perubahan sosial itu adalah proses yang di dalamnya terjadi perubahan struktur dan fungsi dari suatu sistem sosial. Ada tiga unsur utama dalam suatu perubahan sosial. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Rogers tersebut, yakni (1) sumbu yang menjadi tenaga pendorong perubahan, (2) cara-cara yang dapat ditempuh

untuk menciptakan perubahan, dan (3) akibat atau konsekuensi dari perubahan tersebut.

Sumber kekuatan pendorong perubahan mungkin berasal dari dalam (endogenous) sistem sosial itu. Perubahan sosial yang demikian disebut perubahan sosial immanent. Sumber kekuatan pendorong itu dapat juga berasal dari luar (exogenous) sistem sosial yang bersangkutan. Perubahan sosial yang demikian disebut perubahan sosial kontak.

Perubahan sosial kontak dibedakan lagi atas perubahan sosial kontak-selektif, yakni yang terjadi apabila anggota-anggota suatu sistem sosial dihadapkan kepada suatu inovasi dari luar, dan mereka mengadopsi atau menolak inovasi tersebut.

Pengembangan gerakan koperasi pedesaan yang menjadi obyek pengamatan dalam studi ini, dapat digolongkan sebagai upaya perubahan sosial kontak-selektif. Gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang diintroduksikan dan kemudian diadopsi oleh pemimpin puncak lokal, merupakan produk rekayasa luar desa, yakni pada tingkatan-atas desa.

Gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang direkayasa di tingkat-atas desa tersebut, dimaksudkan untuk diaplikasikan di desa-desa yang beragam kondisi dan situasinya. Cara yang ditempuh di mana-mana adalah sama, menggunakan pendekatan top-down. Gagasan dan konsep diintroduksikan kepada pemimpin lokal oleh sumber dari atas desa. Selanjutnya, diharapkan pemimpin lokal

mendifusikannya ke dalam komunitas pedesaan dengan membentuk kelembagaan organisasi, menyusun pengurus dan merumuskan program kerja.

Tidak semua proses dan prosedur itu diiringi dengan berlangsungnya suatu gerakan (movement) yang menyadarkan masyarakat untuk berperan serta secara spontan dan atas kehendaknya sendiri. Dalam banyak kasus koperasi pedesaan yang dibentuk dari atas itu, tidak mampu berakar ke bawah, dalam arti bahwa komunitas desa tidak merasa ikut berkepentingan mengembangkannya. Hal yang demikian terjadi manakala tidak terjadi proses adopsi inovasi gagasan dan konsep oleh kalangan representasi dari komunitas pedesaan.

Pada kasus KUD Mattirobulu, proses dan prosedur awalnya sama dengan proses KUD lainnya. Gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola KUD ini berasal dari luar, dimaksudkan untuk diaplikasikan dalam komunitas desa Bontosunggu. Yang spesifik pada kasus ini ialah bahwa impuls dari luar desa berupa introduksi gagasan dan konsep itu, mendapatkan response adopsi inovasi oleh pemimpin puncak lokal yang merupakan representasi komunitas desanya. Oleh pemimpin puncak lokal gagasan dan konsep tersebut didifusikan melalui interaksi pembelajaran kepada subyek sasaran yang terbatas jumlahnya dan yang dipilihnya. Subyek sasaran difusi yang sedikit dan dipilih itu, kemudian digalang dalam proses interaksi pembelajaran menjadi kelompok perintis pengembangan gerakan koperasi.

Penggalangan kelompok melalui proses interaksi pembelajaran itu diarahkan kepada penyadaran akan masalah dan tanggung jawab sosial yang harus dipikul bersama. Gerakan (movement) yang dilakukan oleh kelompok perintis dan dimotivasi oleh pemimpin puncak lokal itu mendinamisasikan komunitas pedesaan secara bertahap. Pemimpin puncak lokal, setelah mengadopsi gagasan dan konsep koperasi pedesaan, memotivasi dan mendinamisasi kelompok perintis, kemudian pemimpin bersama kelompok perintis memotivasi dan mendinamisasi kelompok pendukung, selanjutnya bersama-sama menggerakkan massa pendukung koperasi.

Proses transformasi sosial yang terjadi sebagai dampak gerakan (movement) itu menggeser citra koperasi dari negatif ke positif. Bahwa proses transformasi tersebut terjadi, bermula dari upaya difusi gagasan dan konsep melalui interaksi pembelajaran kelompok kecil (perintis). Dengan perkataan lain, pendidikan dalam substansinya sebagai proses interaksi pembelajaran yang membawa dampak perubahan sosial, merupakan juga proses transformasi sosial.

Dalam pada itu perubahan sosial kontak-terarah, oleh Zaltman disebut juga perubahan sosial berencana, sebagaimana dikatakannya; "... to deliberate efforts by change agents to affect a change in a target system of individuals" (Zaltman, 1972, h. 2). Sedangkan Bennis (1972

h. 154) mengemukakan bahwa suatu perubahan sosial berencana ialah : "a conscious, délibérâte, and collaborative effort to improve the opérations of a system, wether it be self system, social system or cultural system, through the utilization of scientific knowledge". Dalam pernyataannya tersebut di atas, Bennis tampaknya menekankan pentingnya kerja sama dan penggunaan pengetahuan ilmiah dalam mengusahakan terjadinya perubahan sosial berencana.

Perubahan sosial yang terjadi itu boleh jadi pada tingkat individu, boleh jadi pada tingkat sistem sosial. Perubahan pada tingkat individu mengacu pada istilah-istilah difusi, adopsi, modernisasi, akulturasi, belajar, sosialisasi. Perubahan yang terjadi pada tingkat sistem sosial mengacu pada istilah-istilah pengembangan, spesialisasi, integrasi, dan adopsi (Rogers, 1971, h. 10).

Pengembangan gerakan koperasi pedesaan merupakan juga perubahan sosial berencana. Jika dikaitkan dengan definisi Zaltman tersebut di atas, maka change agents dalam hal kasus desa Bontosunggu adalah pemimpin puncak lokal. Pemimpinlah yang mempengaruhi individu target untuk menyetujui gagasan dan konsep koperasi pedesaan dan berperanserta dalam pengembangannya. Sedangkan, jika dikaitkan dengan konsep Bennis, terjadinya perubahan sosial berencana melalui proses pengembangan gerakan koperasi itu, merupakan hasil kerja sama pemimpin puncak

lokal dan kelompok elit lokal yang direpresentasikan oleh kelompok perintis dan pendukung.

Pengembangan gerakan koperasi pedesaan yang merupakan juga perubahan sosial kontak-selektif itu pada dasarnya sekaligus juga dapat dikategorikan perubahan sosial kontak-terarah dan perubahan sosial berencana. Pengembangan gerakan koperasi pedesaan ini direncanakan secara nasional. Dimulai pertama kali di Yogyakarta pada tahun 1971 dan selanjutnya didifusikan ke berbagai wilayah pedesaan di seluruh Indonesia.

Perubahan sosial yang merupakan dampak pengembangan gerakan koperasi pedesaan itu, telah terjadi di Bontosunggu yang menjadi lokasi penelitian ini, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat sistem sosial. Pada tingkat individu telah terjadi proses transformasi berupa tergesernya sikap skeptis terhadap koperasi menjadi sikap terbuka yang disertai kesediaan berpartisipasi paling sedikit sebagai penerima layanan (pelanggan)*. Pandangan negatif terhadap koperasi yang semula terdapat di kalangan warga masyarakat, sebagaimana tercermin dalam ungkapan : asenna rupa hoperasi - koperra'si, telah tergeser dengan kesediaan melakukan berbagai jenis transaksi dengan koperasi di desa. Lebih lagi pada desa kasus, Bontosunggu, di mana hampir semua penduduk telah menjadi anggota KUD Mattirobulu yang secara teratur melakukan transaksi dengan koperasinya, terutama

dalam hal yang berkaitan dengan produksi pertanian, sarana produksi pertanian, transportasi, perlistrikan, simpan-pinjam, dan sebagainya.

Proses difusi inovasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan yang telah mendorong terjadinya proses perubahan sosial, sebagaimana telah digambarkan di atas, dapat diidentifikasi sebagai pendidikan luar sekolah, baik sebagai peristiwa pendidikan yang terjadi di luar sistem persekolahan formal, maupun sebagai upaya pendidikan di luar sistem sekolah yang medannya memang sengaja dimaksudkan untuk kegiatan pendidikan.

Pendidikan luar sekolah, sebagaimana telah dikemukakan sering dirumuskan pengertiannya secara beragam. Bagi penganut positivisme, PLS dapat berarti peristiwa pendidikan yang terjadi di luar sistem persekolahan. Para peneliti biasanya menggunakan perspektif yang demikian. PLS bisa juga berarti upaya pendidikan yang terjadi di luar sistem persekolahan, yang medannya memang dimaksudkan secara sengaja untuk kegiatan pendidikan. Perspektif yang demikian lebih sering digunakan oleh para pengembang program dan tenaga kependidikan (Soedomo, 1990, h. 1).

Dalam pada itu Soepardjo Adikusumo menggambarkan pendidikan luar sekolah sebagai :

^H...setiap kesempatan di mana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya,

dengan tujuan mengembangkan tingkat ketrampilan, sikap dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan lingkungan masyarakatnya dan negaranya." (Soepardjo, 1971, h. 4).

Keseluruhan pengembangan yang telah dipaparkan di atas menjelaskan proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan, dengan mengambil kasus desa Bontosunggu, kecamatan Gantarang Kindang (Gangking), Bulukumba, Sulawesi Selatan. Dalam pembahasan terlihat alur proses pemerolehan informasi, pengetahuan, aspirasi, nilai-nilai serta sikap, dan perilaku. Keseluruhan proses itu bermula dari introduksi gagasan dan konsep koperasi pedesaan, adopsi gagasan dan konsep serta kemudian perintisan dan pengembangan gerakan koperasi oleh dan di kalangan komunitas sendiri.

Pada akhir pembahasan ini dapatlah dikatakan bahwa pendidikan luar sekolah untuk pembangunan masyarakat desa telah membawa perubahan sikap dan perilaku pada komunitas pedesaan terhadap koperasi. Perubahan sikap dan perilaku tersebut selanjutnya telah mendorong terjadinya proses transformasi sosial melalui proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan, yang telah mencairkan sikap skeptis masyarakat dan menggeser citra negatif koperasi menjadi sikap partisipatif dan lebih terbuka.

Proses perubahan sikap dan perilaku ke arah terjadinya transformasi sosial itu, telah memungkinkan warga komunitas pedesaan memperoleh pemahaman dan

pengendalian yang lebih baik terhadap kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi yang memungkinkan peningkatan derajat kehidupan mereka. Keadaan dan dinamika perkembangan yang demikian dirumuskan oleh Kindervatter (1979) dengan istilah pendidikan sebagai empowering process.





A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan dari studi ini dikemukakan di bawah ini.

1. Pengembangan gerakan koperasi pedesaan dalam garis besarnya dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, ialah dengan cara menumbuhkan, mendorong, mengembangkan dan menggalang unsur-unsur prakoperasi yang ada di lingkungan pedesaan itu sendiri. Akan tetapi, cara ini disadari akan memakan waktu yang lama. Apa lagi jika mengharapkan unsur-unsur prakoperasi itu tumbuh dan berkembang atas kekuatannya sendiri semata-mata. Sejarah perkoperasian atau gerakan koperasi Indonesia telah membuktikan hal itu. Potensi sumber daya budaya, seperti gotong-royong dan kekeluargaan saja, belum menjamin tumbuhnya lembaga koperasi ekonomi yang tangguh: yang ada barulah koperasi sosial (istilah Bung Hatta). Kedua, ialah dengan menggunakan kekuatan pendorong dari luar dengan cara mengintroduksi gagasan dan konsep untuk diaplikasikan. Strategi pengembangan gerakan koperasi pedesaan di Indonesia dewasa ini, mengutamakan cara yang kedua ini.

2. Studi ini didasarkan atas pengamatan terhadap

kasus pengembangan gerakan koperasi pedesaan di desa Bontosunggu. Seperti halnya di desa lain, upaya pengembangan gerakan koperasi pedesaan didahului dengan mengintroduksi gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola BUUD/KUD. Melalui cara ini, pemimpin puncak lokal diperkenalkan dengan gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola BUUD/KUD yang dimaksudkan untuk diaplikasikan di pedesaan.

3. Peluncuran gagasan dan konsep koperasi pedesaan dilakukan pertama kali oleh aparat birokrasi tingkat-atas desa. Metode peluncuran gagasan dan konsep menggunakan komunikasi formal, dengan teknik ceramah dan/atau pengarahan yang menekankan pendekatan yang bersifat instruktif. Dalam proses komunikasi ini, aparat birokrasi-atas desa sebagai sumber informasi, sedangkan kepala desa sebagai pemimpin puncak lokal sebagai penerima (recipient). Dalam perspektif pendidikan luar sekolah, pihak yang pertama adalah sumber belajar, sedangkan pihak yang kedua adalah peserta belajar, warga belajar atau peserta didik.

4. Pada kasus desa Bontosunggu, peserta belajar (kepala desa) semula tidak menaruh perhatian khusus terhadap informasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan tersebut. Baru setelah beberapa kali ia mendengarkan penjelasan mengenai hal tersebut, ia menaruh perhatian khusus. Loyalitas dan dedikasinya sebagai pemimpin puncak

lokal, serta komitmennya terhadap upaya peningkatan kesejahteraan warga desanya, dikaitkan dengan sifat instruktif peluncuran gagasan dan konsep tersebut, merupakan sebagian faktor penting yang mendorongnya untuk lebih memahami gagasan dan konsep itu.

5. Dialog cenderung tidak berkembang dalam komunikasi formal dengan ceramah pengarahannya yang instruktif itu. Suasana formal dan pola hubungan hierarkhis yang sudah ada sebelumnya, antara sumber belajar dan peserta belajar merupakan hambatan utamanya. Ketika H. Palessei, kepala desa Bontosunggu mulai menaruh perhatian khusus terhadap gagasan dan konsep yang didengarnya beberapa kali itu, ia lebih banyak mencari penjelasan justru dari komunikasi informal interpersonal. Seorang kerabat yang bertugas pada Kandepkop dipilihnya sebagai sumber informasi lain. Melalui tradisi silaturahmi antarkerabat keluarga, dengan percakapan pribadi ia memperluas wawasan dan pemahamannya.

G. Dalam upayanya memperluas wawasan dan pemahamannya, ia juga merekrut dan melibatkan beberapa orang yang dipilihnya dari kalangan elit lokal, dan yang masih tergolong kerabat keluarganya. Berbagai gyent belajar-pembelajaran terjadi kemudian, dengan sumber belajar dari kalangan kerabat sendiri tersebut. Sedangkan, H. Palessei lebih berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan sumber belajar dengan peserta belajar

melalui pertemuan-pertemuan yang lebih bersifat informal.

7. Dari berbagai penjelasan yang didengarnya, pemimpin puncak lokal Bontosunggu itu secara intuitif melihat peluang untuk meningkatkan kesejahteraan warganya melalui aplikasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan itu, jika pengelolaannya dilakukan sungguh-sungguh. Atas dasar itu ia mengambil keputusan adopsi inovasi terhadap gagasan dan konsep tersebut.

8. Menyusul keputusan adopsi inovasi yang dilakukan itu, H. Palessei mengajak orang-orang yang telah dipilih dan direkrutnya ke dalam interaksi belajar-pembelajaran itu, untuk memikirkan bersama pengembangan gerakan koperasi pedesaan, berdasarkan gagasan dan konsep yang diinformasikan (BUUD/KUD). Pada umumnya tanggapan terhadap ajakan tersebut, mengingatkan tentang citra koperasi yang negatif di kalangan warga desa dan sikap skeptis masyarakat umumnya. Terhadap tanggapan itu, ia tidak mengendurkan ajakannya dan berusaha meyakinkan bahwa ia sengaja memilih orang-orang tersebut untuk tugas yang menantang itu. Ia mengingatkan pendirian yang dipilihnya pada masa kekacauan dan pengungsian: iya tealca lao bawang roanre bembe*, elokaha lao ggerei bembe¹e.

9. H. Palessei yang sudah menjabat kepada desa Bontosunggu lebih dari tiga dasawarsa terus-menerus, adalah tokoh yang memiliki citra toriasiri (panutan) di kalangan komunitas desanya. Citra tersebut terbentuk dari

riwayat hidupnya yang senantiasa berorientasi terhadap nilai-nilai kebajikan, keberanian, kejujuran, kesahajaan, sopan santun, dan kerendahhatian. Bagi kerabat dan keluarga etnis Bugis-Makassar turut memelihara reputasi toriasiri dari kalangannya, merupakan suatu kewajiban moral. Aktualisasi kewajiban moral itu di antaranya berupa dukungan dan partisipasi dalam usaha dan aktivitas yang positif dan konstruktif yang diprakarsai oleh toriasiri itu. Kewajiban moral yang demikian pada gilirannya dapat pula menumbuhkan solidaritas primordial kekerabatan, kekeluargaan bahkan komunitas. Semangat solidaritas proiaordlal itu kemudian merupakan penopang utama dibentuknya Kelompok Perintis Pengembangan Gerakan Koperasi Pedesaan di Bontosunggu oleh H. Palessei. Proses recroitaent pendukung pertama gerakan dari kalangan elit lokal dan masih tergolong kerabat keluarga, berlangsung segera dengan cara serta semangat yang sama.

10. Dalam garis besarnya dapat dibedakan proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan dalam studi kasus ini dalam dua tahap. Sebagaimana dikemukakan berikut ini.

(J> Tahap perintisan

a. Kegiatan komunikasi difusi inovasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan, menyusul keputusan adopsi inovasi yang dilakukan oleh pemimpin puncak lokal. Subyek sasaran difusi ialah kalangan elit lokal yang dipilih dari

kalangan kerabat keluarga pemimpin puncak lokal, K. Palessei sendiri.

b. Pembentukan kelompok perintis dan pendukung utama pengembangan gerakan koperasi pedesaan dari kalangan elit lokal dan kerabat keluarga oleh pemimpin puncak lokal. Metode dan teknik yang digunakan ialah komunikasi informal interpersonal dengan menekankan pendekatan persuasif. Suasana interaksi belajar-pembelajaran berlangsung informal. Sumber belajar dipilih dari kalangan kerabat keluarga sedangkan pemimpin puncak lokal berperan sebagai fasilitator. Sarana tradisional silaturahmi digunakan untuk memfasilitasi interaksi belajar-pembelajaran informal.

c. Penggalangan semangat kebersamaan, kerja sama, solidaritas, etos kerja, dan dedikasi anggota kelompok perintis, oleh pemimpin puncak lokal dengan menggunakan referensi konsep nilai budaya lokal siri, sebagai potensi sumber daya budaya wilayah.

Dalam konteks nilai budaya siri, prinsip pola pang polo panni, adalah bersifat imperatif dalam hubungan patron-client. dalam hal patron adalah pemimpin berciri panutan. Secara harfiah istilah pola pang polo panni berarti patah paha patah sayap, yang ekuivalen dengan terminologi Islam, saisi 'na wa-atho'na. Prinsip tersebut merupakan konsep nilai etika moral yang mengatur perilaku pemimpin dan pengikutnya.

Konsep nilai etika moral lokal yang juga direvitalisasikan ialah mali siparappe telleng sipaonang (hanyut saling mendamparkan, tenggelam saling mengapungkan), pada idi pada elo slpatao sipatukong (kita bersama bertekad sama saling menghidupkan saling menegakkan). Kedua ungkapan tersebut mengkonsepsikan nilai etika moral yang mengimperatifkan solidaritas, kebersamaan serta kerja sama yang positif dan konstruktif. Agaknya konsep tersebut dapat diekivalensikan dengan taawanu'alal birr1 wattaawa dalam terminologi Qur'an.

Dalam pada itu untuk maksud memotivasi dan memacu semangat dedikasi serta etos kerja keras dan kebutuhan akan prestasi, pemimpin memvitalisasikan prinsip ala muapakasiri, nasaba sirleaitu rionroang ri llno. Secara harfiah ungkapan tersebut berarti, kalian jangan mencemari martabat harga diri, karena hanya siri yang menjadi taruhan hidup di dunia. Ungkapan itu dikaitkan dengan citra negatif koperasi serta sikap skeptis masyarakat terhadap koperasi, yang ditempatkan sebagai tantangan yang harus dijawab. Dalam konteks nilai budaya siri, suatu tantangan haruslah dihadapi dengan usaha sekeras-kerasnya untuk mengatasinya, bagi seseorang yang dipandang mempunyai siri (to-enoka sirina); lebih lagi bagi seseorang yang menilai martabat atau harga dirinya sangat tinggi (to. matanre siri).

Adalah pantangan keras secara psikologis bagi orang

dari etnis Bugis-Makassar untuk disebut atau disikapi sebagai to degaga sirina (orang tidak mempunyai harga diri atau martabat>. Seringkali mereka berbuat nekat untuk membuktikan keberadaannya sebagai orang bermartabat atau berharga diri. Dalam konteks nilai budaya itu, dimaksudkan bahwa pengembangan gerakan koperasi tidak boleh menemui kegagalan di tengah jalan. Karena kegagalan menghadapi tantangan berupa citra negatif koperasi serta sikap skeptis masyarakat, oleh pemimpin puncak lokal dipersepsi sebagai menurunkan martabat dirinya, serta martabat para perintis, dan pendukung gerakan koperasi pedesaan itu.

d. Kegiatan penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan, yang pada tahap awal diutamakan khusus bagi para perintis dan pendukung gerakan koperasi. Sumber belajar yang digunakan adalah petugas resmi dari Kondepkop. Materi pembelajaran prinsip-prinsip umum perkoperasian, kecakapan berorganisasi serta ketrampilan administrasi umum maupun keuangan. Selanjutnya, target sasaran penyuluhan diperluas secara berangsur-angsur, meliputi khalayak melalui mesjid-mesjid.

Dalam pada itu, upaya memperluas keanggotaan koperasi tetap dilakukan oleh kelompok perintis melalui kegiatan komunikasi informasi interpersonal persuasif. Sasarannya ialah terutama kerabat dan keluarga serta tetangga dekat masing-masing. Selain itu, kegiatan pelayanan dalam setiap transaksi yang terjadi antara

koperasi dengan warga masyarakat diupayakan sebaik mungkin, sebagai upaya promosi.

(2) Tahap pengembangan

Pada tahap pengembangan gerakan koperasi pedesaan pada kasus desa Bontosunggu ini, kegiatan yang dilakukan meliputi, antara lain sebagai berikut.

a. Perluasan kegiatan koperasi pedesaan BUUD/KUD yang sudah dibentuk. Cara yang digunakan ialah pelayanan yang baik terhadap pelanggan dan anggota serta penyuluhan di mesjid-mesjid. Pelayanan yang baik ini tidak dengan sendirinya menarik warga masyarakat menjadi anggota. Bahkan ada anggapan yang berkembang dalam masyarakat bahwa tanpa menjadi anggota pun akan tetap dilayani dengan baik. Oleh karena itu, tidak perlu terburu-buru menjadi anggota. Tanggapan lain dari masyarakat menganggap bahwa pelayanan yang baik itu tidak akan bertahan lama. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa pelayanan yang baik itu memang merupakan himbauan pemimpin puncak lokal, H. Palessei, karena mereka merupakan penganjur utama pengembangan gerakan koperasi itu.

Pada penyuluhannya di mesjid-mesjid, sumber belajarnya adalah petugas dari Kondepkop. H. Palessei selalu mengusahakan diri hadir dengan maksud mendorong motivasi khalayak, dengan menunjukkan secara tidak langsung bahwa ia adalah penganjur utama gerakan koperasi

itu. Citra dirinya sebagai pemimpin panutan diharapkan mempunyai pengaruh secara tidak langsung ke arah pengembangan persepsi positif masyarakat terhadap koperasi.

b. Penyempurnaan kelembagaan koperasi pedesaan yang sudah terbentuk (BUUD/KUD), yang meliputi upaya pemerolehan status badan hukum, penyusunan dan penyempurnaan AD/ART, dan pementapan susunan pengurus.

BUUD/KUD sebagai institusi koperasi pedesaan yang dibentuk menyusul kegiatan pengembangan gerakan koperasi yang dirintis pemimpin puncak lokal desa Botosunggu itu, kelak berkembang menjadi KUD Mattirobulu. Sebagaimana diketahui KUD ini berkembang cukup baik, sehingga selama satu dasawarsa terus-menerus hingga saat penelitian ini usai, mencatat prestasi sebagai KUD teladan tingkat regional dan tingkat nasional.

Pementapan susunan pengurus dilakukan dengan mutasi. Abdullah Karim yang semula bertugas sebagai bendahara bertukar tempat dengan H. Ibnu Hajar yang semula bertugas sebagai manajer. Abdullah Karim sudah sejak beberapa tahun semenjak putus sekolah SMA kelas tiga, telah berusaha sebagai usahawan muda dengan cara magang pada orang tuanya. Hal ini yang merupakan salah satu faktor kebijakan mengalihkannya dari bendahara menjadi manajer koperasi. Selain itu, ia secara resmi berdomisili di kota Bulukumba sehingga tidak layak menjadi pengurus

KUD di Bontosunggu.

Dalam perspektif PLS, Abdullah Karim memiliki kualitas kepribadian sebagai seorang elf-directed learner. Dengan mengamati mekanisme kerja mesin giling beras yang usia kerjanya maksimum lima tahun, ia merancang suku cadang sehingga mesin tersebut tetap bekerja baik dalam usia lebih dari delapan tahun. Atas kehendak sendiri, ia rajin mempelajari perihal pembukuan melalui berbagai sumber belajar. Juga prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan prosedur transaksi perbankan dia pelajari sendiri dari berbagai sumber, di samping melalui proses exsperiential learning.

c. Peningkatan kualitas pengurus dan manajer melalui penataran dan pelatihan, yang pada waktu tertentu diadakan oleh Balai Latihan Koperasi (Balatkop).

d. Pengembangan usaha (bisnis) koperasi melalui peningkatan daya tampung koperasi terhadap produksi petani. Kesempatan untuk memperoleh fasilitas kredit BRI untuk keperluan ini digunakan sebaik-baiknya oleh manajer Abdullah Karim untuk mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan wiraswastanya. Ia tekun dan sungguh-sungguh berusaha mengambil manfaat pembelajaran dari pengalamannya. Oleh karena itu, ia berusaha tidak menunggak pengembalian cicilan kredit itu dengan meminjam uang dari orang tuanya sebelum saat pembayaran angsuran bank itu. Tujuan antara (intermediate goal) yang ingin

dicapainya dengan cara itu ialah membuat kesan citra diri sebagai nasabah yang baik. Dengan cara itu ia menjalin relasi yang baik dengan bank.

Hingga saat penelitian ini berlangsung, KUD Mattirobulu belum pernah mempunyai tunggakan kredit bank, dari berbagai jenis kredit yang digunakannya selama lebih dari satu dasawarsa. Sebagai dampaknya, H. Abdullah Karim menempatkan diri sangat dominan sebagai pengendali utama KUD Mattirobulu. Keberhasilan bisnis KUD ini mengembangkan berbagai unit usahanya, yang mengantarnya menjadi KUD teladan nasional, dalam persepsi masyarakat merupakan hasil kepiawaian manajer, H. Abdullah Karim.

11. Pengembangan gerakan koperasi sebagaimana diungkapkan dari studi kasus ini ditopang oleh peranan kepeloporan pemimpin puncak lokal berciri panutan, revitalisasi secara kreatif konsep nilai budaya lokal sebagai referensi nilai etika moral, dan faktor stratifikasi sosial yang tidak senjang dengan lapisan elit lokal yang tidak bersifat eksklusif.

Pelapisan sosial yang sederhana (elit dan massa) dan tidak senjang serta lapisan elit lokal yang tidak eksklusif merupakan lahan sosio-struktural yang memungkinkan tumbuhnya hubungan a. sense of mutual obligation and dependence antarlapis sosial. Dalam kondisi yang demikian masih ada sikap resiprokal (freciprocal) yang merupakan syarat bagi gotong royong

murni. Semangat kebersamaan dan solidaritas sosial sebagai potensi laten dalam masyarakat cenderung masih lebih mudah diaktualisasikan oleh pemimpin penutan yang berperanan sebagai animateur (Moulton, 1977) dan sebagai dinamisator.

Sedangkan revitalisasi secara kreatif konsep nilai budaya lokal sebagai referensi nilai etika moral yang menyemangati sikap dan perilaku individu, merupakan lahan sosio-kultural yang menopang pengembangan gerakan koperasi.

12. Kegiatan penyuluhan massal di mesjid-mesjid yang dilakukan pada masa pengembangan gerakan koperasi di Bontosunggu merupakan upaya difusi inovasi gagasan dan konsep koperasi pedesaan, dengan subyek sasaran massa pedesaan. Teknik ceramah yang verbalistik sifatnya kurang efektif mencapai tujuan pembelajarannya. Tingkat pendidikan formal yang pernah dialami massa pedesaan kebanyakan rendah, karena itu tingkat perkembangan kognisinya cenderung hanya pada tingkat operasi konkrit (J. Piaget). Untuk menyerap informasi dan bahasan-bahasan verbalistik yang bersifat abstrak, tingkat perkembangan kognitif yang demikian kurang memadai.

Sehubungan dengan hal itu, maka pemahaman mereka tentang koperasi serta mekanisme perkoperasian masih bersifat sangat sederhana. Oleh karena itu, partisipasinya pun barulah pada tahap partisipasi elementer dalam wujud

sebagai penerima layanan belaka.

Dalam hal pengambilan keputusan dan dalam hal pengawasan jalannya organisasi dan usaha koperasi dalam mana mereka menjadi anggota, mereka tidak atau kurang mampu untuk turut berperan. Dalam kenyataan yang demikian, penguruslah yang lebih menentukan proses pengambilan keputusan dan kebijakan, terutama yang menyangkut segi organisasi koperasi. Sedangkan dalam hal kebijakan dan pengambilan keputusan yang menyangkut segi usaha (bisnis) koperasi, manajerlah yang lebih menentukan.

Keadaan yang demikian merupakan kelemahan koperasi pedesaan umumnya. Kemajuan bisnis/usaha KUD Maattirobulu, misalnya, yang cukup mengesankan lebih banyak ditentukan oleh kecakapan dan kejujuran manajer, H. Abdullah Karim ketimbang kecermatan dan kecakapan pengawasan anggota maupun badan pengawas,

Dari segi kolektivitas sebagai salah satu prinsip dasar koperasi, keadaan yang demikian menyebabkan keragaan (performance) koperasi pedesaan lebih merupakan suatu kelompok dengan anggota yang banyak, yang hanya mengikuti suatu kelompok elit yang dominan, yakni pengurus dan manajer. Heru Sujoto (1990) menyebut karakteristik yang demikian mengacu kepada koperasi model birokrasi, yang merupakan gejala umum koperasi di Indonesia, dan juga di beberapa negara di Eropa.

13. Dalam keseluruhan proses pengembangan gerakan

koperasi pedesaan, kasus desa Bontosungu dapat diidentifikasi bentuk-bentuk proses belajar dan pembelajaran. Dari segi setting belajar-pembelajaran dapat dibedakan atas (1) natural societal setting dan (2) formal instructional setting.

Dalam konteks natural societal setting, acapkali proses belajar dan pembelajaran terjadi lebih efektif bagi individu dalam komunitas pedesaan. Beberapa bentuk natural societal learning di pedesaan ialah, misalnya peer dyad learning interaction dan peer group learning interaction. Proses pembelajaran yang demikian acapkali berkaitan dengan aktivitas waktu senggang (leisure time activity). Pada masyarakat desa Bontosunggu, hal yang demikian mudah dijumpai antara lain berupa (1) sekelompok tetangga dekat yang menghabiskan waktu luangnya pada sore hari di beranda (lego-lego) salah satu rumah di antaranya, berbincang-bincang mengenai berbagai hal yang dialami masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Setting seperti itu acapkali berkembang menjadi forum diskusi dan pertukaran informasi berkenaan dengan berbagai masalah kehidupan dan okupasi mereka, termasuk yang berkaitan dengan pengalaman dan masalah yang mereka temui dalam melakukan transaksi dengan koperasi. (2) Sekelompok tetangga menggunakan waktu senggang sambil bersama-sama memirsakan televisi di salah satu rumah di antara mereka. Tidak jarang di antara mereka sama-sama memiliki pesawat

televisi di rumah masing-masing, akan tetapi memilih memirsanya bersama-sama di salah satu rumah tetangga. Dalam setting seperti itu, acapkali berbagai topik menjadi bahan perbincangan dan pertukaran informasi. Tidak jarang suatu mata acara televisi yang berkaitan dengan kehidupan mereka di pedesaan, menjadi pangkal perbincangan analisis dan evaluasi menurut versi masing-masing. Dengan cara itu secara tidak langsung telah terjadi proses belajar dan pembelajaran. Acapkali pula seseorang dengan sengaja membawa masalah yang dihadapinya untuk diketengahkan ke forum sejawat yang demikian. Maksudnya adalah untuk memperoleh masukan f input > yang berguna bagi dirinya dalam memecahkan masalahnya. Bagi warga pedesaan dari lapisan bawah umumnya lebih terbuka untuk mengkomunikasikan masalahnya kepada rekan sejawat, dan dalam setting informal yang demikian, ketimbang kepada petugas atau tokoh formal, dan dalam setting yang formal. (3) Sejumlah jemaah mesjid di pedesaan, semacam di Bontosunggu, acapkali berkumpul berbincang-bincang bersama di beranda masjid, pada saat menanti waktu shalat magrib atau shalat isya. Kesempatan semacam itu pun acapkali berkembang menjadi suatu setting pembelajaran. Dalam kerumunan (crowd) semacam itu, seringkali menjadi tempat bagi orang-orang desa untuk saling bertukar informasi, memperoleh masukan dan atau pengalaman baru yang memperluas wawasan, pengetahuan dan aspirasinya mengenai berbagai hal yang

berkaitan dengan masalah kehidupan sosial dan okupasinya.

(4) Tradisi silaturahmi pun merupakan peristiwa yang dapat berkembang menjadi setting untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang memang berkaitan dengan kebutuhan belajar warga pedesaan. Kesempatan semacam inilah yang justru digunakan secara efektif oleh pemimpin puncak lokal Bontosunggu pada saat mula-mula mendifusikan gagasan dan konsep koperasi pedesaan kepada sejumlah subyek sasaran yang dipilihnya. Pada gilirannya subyek sasaran ini pulalah yang dipilihnya. Pada gilirannya subyek sasaran ini pulalah yang dimotivasi, didinamisasikan, dan dimobilisasikannya sebagai kelompok perintis pengembangan gerakan koperasi pedesaan.

Experiential learning juga termasuk dalam konteks natural societal learning. Proses pembelajaran semacam ini terjadi misalnya, dalam partisipasi seseorang dalam kegiatan koperasi, baik sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan. Sebagai contoh masalah perkreditan dan mekanisme penyaluran dan pelayanannya lebih banyak dapat diketahui anggota koperasi melalui pengalamannya transaksinya dengan koperasi ketimbang melalui penyuluhan massal yang verbalistik. Begitu juga pengurus dan manajer/karyawan lebih banyak mendapat kecakapan dan ketrampilan melalui aktivitasnya, yang dihayatinya sehari-hari.

Formal instructional setting meliputi setting pembelajaran yang dirancang secara sengaja dan

diorganisasikan. Waktu dan durasi (duratior?)_r tujuan serta metode dan tekniknya ditetapkan sebelumnya. Demikian pula sumber belajar dan bahan belajarnya, Dalam proses pengembangan gerakan koperasi pedesaan, berbagai bentuk kegiatan formal instructional learning dapat dikemukakan di bawah ini.

a. Peluncuran gagasan dan konsep koperasi pedesaan pola BUUD/KUD. Kegiatan ini dirancang oleh lembaga-atas desa. Tujuannya agar supaya komunitas pedesaan mampu mengadaptasikan gagasan dan konsep tersebut serta mengaplikasikannya. Metode dan tekniknya berupa komunikasi formal dengan ceramah dan/atau pengarah verbal yang umumnya mengutamakan pendekatan instruktif. Sumber belajarnya umumnya adalah petugas dari lembaga birokrasi-atas desa, sedangkan settingnya berupa pertemuan resmi yang dipersiapkan sebelumnya.

b. Penyebaran gagasan dan konsep koperasi atau kegiatan komunikasi difusi inovasi. Subyek sasarannya ditentukan lebih dahulu, yakni kelompok atau massa. Dalam studi kasus ini, kegiatan difusi inovasi dilakukan pertama kali dengan subyek sasaran berupa orang-orang tertentu dari kalangan elit lokal, yang dipilih oleh pemimpin puncak lokal. Keempatannya dirancang secara sengaja meskipun tidak diorganisasikan secara ketat. Sumber belajar direkrut dari kalangan kerabat, sedangkan pemimpin berperan sebagai fasilitator. Metode dan

tekniknya adalah komunikasi informal sehingga suasana settingnya pun bersifat informal, dengan pendekatan persuasif. Kegiatan difusi inovasi itu kemudian diperluas subyek sasarannya, namun bentuk kegiatannya lebih kurang sama <

c. Berbagai kegiatan penyuluhan, penataran, pelatihan, baik yang diperuntukkan bagi kalangan terbatas, seperti pengurus, manajer, dan karyawan, maupun yang diperuntukkan bagi massa.

Dalam pada itu suatu bentuk kegiatan belajar lain, yang dapat diidentifikasi adalah self-directed learning. Pada kasus ini kegiatan semacam ini terutama dilakukan oleh manajer KUD Mattirobulu, H. Abdullah Karim. Ia banyak bertanya tentang masalah teknis perkoperasian kepada kakaknya yang bertugas pada Kondepkop pada pertemuan tidak resmi. Mengenai kiat bisnis, ia suka bertukar pikiran dengan ayahnya, seorang pengusaha lokal yang cukup berhasil, kepada siapa ia pernah magang.

B- Implikasi

Beberapa implikasi dari hasil penelitian ini, baik yang bersifat teoretik maupun yang bersifat praktik akan dikemukakan di bawah ini.

1. Teoretik

Belajar adalah kebutuhan mutlak manusia dan

masyarakat untuk mempertahankan eksistensinya. Banyak hal yang perlu dipelajari oleh seseorang dalam hidupnya melalui sistem sekolah formal, dan tidak kurang pula yang harus, bahkan hanya dapat dipelajari di luar sistem sekolah formal. Banyak ide-ide baru, fakta-fakta, sikap, nilai-nilai serta ketrampilan baru, yang dibutuhkan orang dewasa untuk lebih memahami dan mengendalikan lingkungan sosial dan okupasinya, yang diperolehnya dari pengalaman interaksi dengan lingkungannya sehari-hari.

Dalam kerangka konsep PLS, keseluruhan peristiwa dan upaya belajar dan pembelajaran di luar sistem sekolah formal berlangsung dalam dua macam setting, yaitu (1) natural societal setting dan (2) formal instructional setting.

Hingga dewasa ini yang lebih banyak mendapatkan perhatian para pakar proses belajar dan pembelajaran dalam konteks formal instructional setting, seperti kursus-kursus, penataran, pelatihan, belajar kelompok, dan lain sebagainya. Sedangkan peristiwa serta upaya belajar dan pembelajaran dalam konteks natural societal setting tidak mendapat perhatian sewajarnya. Bahkan, ada kecenderungan menganggapnya tidak termasuk pendidikan karena sifatnya yang cenderung incidental.

Apps dan Lovell sebenarnya membedakan antara situasi Incidental dengan accidental. Bagi mereka kegiatan belajar luar sekolah yang demikian, meskipun seringkali

tidak direncanakan dan aksidental, akan tetapi dilakukan dengan sengaja dan bertujuan (deliberate and purposeful). Banyak bukti yang ditemukan para peneliti di Amerika, Kanada, dan Inggris bahwa kegiatan belajar orang dewasa dalam lingkungan komunitasnya itu kebanyakan dilakukan secara sengaja dan bertujuan. (Brookfield, 1984, h. 12 13) .

Bagi Kenneth Lawson, filosof pendidikan orang dewasa di Inggris, belajar dalam natural societal setting tidak mempunyai tempat dalam perhatian dan praktek para ' pendidik orang dewasa. Ia menolak ide mengenai suatu situasi pendidikan, yang dipandang sedemikian umum sifatnya, dan sedikit atau tidak ada nilai acuannya, atau tidak mempunyai suatu nilai sebagai indikator, yang menunjukkan bahwa situasi tersebut mempunyai relevansi kependidikan.

Dickinson juga yakin bahwa belajar dalam natural societal setting, adalah suatu kegiatan belajar yang tidak efisien. Bahkan, berbahaya bagi yang belajar karena tidak ada orang yang membimbing kegiatannya. Implikasi dari pernyataan tersebut ialah bahwa warga belajar orang dewasa itu secara sendiri tidak memiliki ketrampilan yang cukup dan judgement untuk melaksanakan kegiatan belajarnya sendiri. Ia harus berkonsultasi dengan seseorang yang dipandang profesional dalam bidang ini (Brookfield, 1984, h. 13) .

Terlepas dari perbedaan pandangan yang dikemukakan di atas, tidak dapat diingkari bahwa proses belajar luar sekolah sangat banyak yang sifatnya incidental. dan dalam konteks natural societal setting. Sifat insidental tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Apps dan Lovell, tidaklah dengan sendirinya berarti bersifat accidental.

Dalam situasi belajar yang demikian seringkali dapat diidentifikasi adanya unsur kesengajaan dan adanya tujuan yang hendak diraih. Tujuan-tujuan tersebut berupa gagasan atau ide-ide baru, fakta, sikap, nilai-nilai, serta kecakapan-kecakapan baru, yang diperlukan individu untuk dapat lebih memahami dan mengontrol lingkungan sosial dan okupasinya.

Berkaitan dengan kasus pengembangan gerakan koperasi pedesaan, dan kemudian pembinaan KUD Mattirobulu, hampir semua pelakunya memperoleh pengalaman yang membawa dampak pengembangan wawasan, aspirasi, pengetahuan, dan kecakapannya, melalui keterlibatannya di dalam kegiatan pembinaan itu.

Mereka telah mengalami manfaat pembelajaran secara sadar dari keterlibatannya, berupa perluasan wawasan, pengembangan sikap, penguasaan fakta-fakta dan kecakapan-kecakapan baru. Berbagai perolehan kualitas yang demikian itu memberikan kepada mereka akses keterlibatan yang lebih bermakna, seperti dalam proses pengambilan keputusan, penentuan kebijakan, dan sebagainya. Melalui proses itu

mereka kemudian mampu menjadi pengendali kegiatan koperasi, dan dengan itu pula mereka mendapatkan kesempatan memperoleh pendidikan tambahan dalam formal instructional setting., seperti pelatihan, penataran, lokakarya dan lain sebagainya.

Bagi kalangan massa pedesaan, mereka kebanyakan mendapatkan wawasan dan sikap baru serta fakta-fakta dan kecakapan-kecakapan baru yang berkaitan dengan perkoperasian, adalah terutama melalui partisipasinya, baik sebagai pelanggan maupun sebagai pemilik koperasi/KUD. Melalui transaksinya dengan koperasi, mereka mendapatkan pemahaman dan penghayatan atas kualitas-kualitas tersebut. Makin banyak seseorang melakukan transaksi dengan koperasi makin luas pemahaman dan makin dalam penghayatannya mengenai berbagai dimensi dan mekanisme perkoperasian. Dengan perkataan lain, bahwa kualitas-kualitas tersebut kebanyakan diperolehnya sebagai experiential learning., yang berlangsung secara insidental, dan dalam natural societal setting.

Sesungguhnya yang penting bukanlah masalah setuju atau tidak setuju, bahwa konsep *PLS* mencakup di dalamnya peristiwa-peristiwa belajar dan pembelajaran dalam konteks natural societal setting itu. Yang lebih penting ialah pertama, bagaimana dalam konteks natural societal setting itu kita dapat mengidentifikasi suatu situasi sebagai situasi interaksi belajar-pembelajaran. Kedua,

bagaimana situasi yang diidentifikasi sebagai situasi belajar-pembelajaran itu dapat dimanipulasikan menjadi lebih sadar tujuan, lebih terarah sehingga menjadi lebih efektif. Dengan demikian, kegiatan belajar itu dapat dikembangkan menjadi semacam experiential learning, self-directed learning dan lain sebagainya, dengan bimbingan secara tut wyrj.. ftandayani oleh petugas PLS dalam masyarakat. Ketiga, bagi seorang petugas PLS masyarakat (community worker). syarat kualifikasi apakah yang dibutuhkan untuk bisa berperanan sebagai fasilitator atau sebagai animateur dalam konteks natural societal setting itu.

2. Praktis

Beberapa implikasi untuk kepentingan praktis dari penelitian ini adalah sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

a. Upaya pengembangan dan pembinaan koperasi termasuk KUD, selama ini lebih banyak dilakukan dengan memakai kerangka wawasan dan pemikiran ekonomi dan manajemen. Hal ini adalah wajar karena koperasi itu adalah organisasi ekonomi. Namun demikian tidak boleh dilupakan bahwa koperasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari gagasan ideologinya yang mengacu kepada prinsip kekeluargaan dan kebersamaan. Yang diidealkan adalah kesejahteraan bersama dan bukannya kesejahteraan orang seorang.

Bertitik tolak dari gagasan ideologis itu, maka adalah relevan pernyataan Herman Soewardi (1984) bahwa membina koperasi dan KUD bukanlah semata-mata berarti membina organisasi dan administrasi, akan tetapi adalah penting pula membina sikap dan perilaku, yakni sikap dan perilaku insan koperasi.

Pengembangan dan pembinaan sikap dan perilaku koperasi merupakan bagian dari upaya pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia. Dalam kaitan ini pendidikan formal maupun PLS dapat ikut berperanserta, Sektor pendidikan formal berusaha memenuhi peran dan fungsinya melalui penyelenggaraan pendidikan bagi calon tenaga pemikir dan pelaksana gerakan koperasi. Sedangkan sektor pendidikan luar sekolah berusaha memenuhi fungsi dan peranannya melalui berbagai bentuk pelatihan, penataran, penyuluhan dan bimbingan, lokakarya, karyawisata, dan sebagainya.

Pelatihan dan penataran biasanya diperuntukkan bagi unsur pengurus dan manajer. Begitu pula halnya dengan lokakarya dan karyawisata. Ini berarti subyek sasarannya bersifat sangat terbatas. Terhadap massa anggota dan khalayak umum, maka yang dapat dilakukan barulah penyuluhan massal atau kelompok, baik yang bersifat tatap muka langsung maupun yang menggunakan media komunikasi cetak atau elektronik.

Upaya pembelajaran pada tingkat massa belumlah sepenuhnya memperhatikan beberapa prinsip PLS, seperti prinsip belajar partisipatif, learner oriented, problem posing, dan lain sebagainya. Beberapa contoh, misalnya kelompok-kelompok untuk kepentingan penyuluhan, seperti kontak tani, kelompok tani, kelompok pencapir, merupakan kelompok-kelompok atau organisasi yang ditanam dari atas desa dan disalurkan melalui gugus birokrasi. Programnya kebanyakan tidak dirancang secara lokal dan temporal dengan melibatkan warga belajarnya, dari awal hingga akhir proses kegiatannya.

Dalam pada itu banyak peristiwa belajar yang lebih murni, terutama yang bersifat individual mode dan dyad yang terjadi atau yang ditimbulkan dan dianimasi, yang tidak mendapat perhatian. Selain itu, disebabkan oleh definisi pendidikan orang dewasa (PLS) yang dianut tidak mencakup kegiatan yang demikian, juga karena tidak adanya atau langkanya tenaga animateur profesional. Tenaga semacam ini kiranya dapat bekerja sebagai community worker.

Penelitian ini diharapkan menguak perhatian yang lebih luas lagi terhadap fungsi dan peranan PLS dalam berbagai bidang. Salah satu diantaranya ialah bidang pengembangan dan pembinaan perkoperasian, yang semula lebih banyak dibicarakan dalam perspektif ekonomi dan manajemen saja. Dalam pengembangan gerakan koperasi di

pedesaan, agaknya sudah saatnya dipikirkan pengadaan tenaga profesional semacam community worker tersebut.

b. Aktifitas penataran dan pelatihan yang dilaksanakan, pada umumnya barulah menyentuh aspek pengetahuan dan ketrampilan organisasi serta kecakapan manajerial, dengan subyek sasaran adalah para penyelenggara koperasi saja. Begitu pula halnya kegiatan penyuluhan yang diperuntukkan bagi kalangan khalayak, masih lebih banyak merupakan pemberian informasi umum tentang perkoperasian.

Upaya yang lebih menekankan pembentukan sikap dan perilaku koperasi dalam kerangka penghayatan serta pengamalan ideologi ekonomi kekeluargaan, terasa belum cukup dilakukan secara intensif, baik bagi kalangan elit maupun bagi kalangan massa rakyat.

Pendidikan luar sekolah, dengan penekanan pengertian sebagai upaya perubahan sikap dan perilaku, sebagai upaya transformasi sosial dan proses empowering, perlu menaruh kepedulian (concern) terhadap perihal dan masalah tersebut. Untuk kepentingan itu, maka diperlukan lebih banyak lagi pengetahuan mengenai pengembangan gerakan koperasi umumnya, dan proses pengadaptasian konsep dan program KUD khususnya.

Dalam kaitan itu dapat ditunjuk salah satu implikasi praktis lainnya dari penelitian ini, yakni menambah pengetahuan kita tentang apa yang telah

dilakukan, dan yang masih harus dilakukan oleh para pemikir, perencana, dan pelaksana pendidikan luar sekolah. Sudah barang tentu hal ini juga berguna bagi perangkat birokrasi yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan politik.

c. Jurusan PLS pada Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP merupakan lembaga akademik yang mempunyai fungsi dan peranan mengembangkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep ilmiah, di samping menyiapkan tenaga-tenaga profesional di bidang pendidikan luar sekolah.

Patut diakui bahwa belum banyak hasil yang diperoleh dan dihasilkan berkaitan dengan fungsi dan peranannya tersebut. Kecenderungan terhadap sentralisasi dan keseragaman kurikulum terasa membawa dampak rendahnya daya tanggap bahan belajar yang disajikan, terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang setiap kali terjadi.

C. Rekomendasi

Berdasarkan kajian yang telah dipaparkan dalam Disertasi ini, maka pada bagian ini dapat direkomendasikan suatu model pengembangan gerakan koperasi pedesaan. Sesuai dengan lingkup studi Disertasi ini, model pengembangan gerakan koperasi pedesaan yang diajukan berikut ini mengacu kepada perspektif pendidikan luar sekolah (PLS).

Suatu model pengembangan gerakan koperasi pedesaan

paling sedikit meliputi hal-hal sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

1. Prakarsa

Prakarsa pengembangan gerakan koperasi pedesaan dapat berasal dari unsur luar atau unsur dalam masyarakat desa itu sendiri. Seorang petugas PLS dalam hal ini dapat mendorong timbulnya dan/atau mendukung adanya prakarsa tersebut.

Unsur luar desa yang biasanya mengambil prakarsa membentuk koperasi pedesaan adalah perangkat birokrasi tingkat atas desa. Hal ini berkaitan dengan suatu kebijaksanaan sentralistik, seperti pada pembentukan BUUD/KUD. Sedangkan prakarsa dari dalam komunitas desa itu sendiri, biasanya berasal dari perorangan atau kelompok dari lapisan elit lokal.

Berkaitan dengan prakarsa pengembangan gerakan koperasi pedesaan, kepedulian (feoncern) PLS ialah pada upaya mempersiapkan, mengembangkan, dan membina masyarakat pedesaan agar dapat menerima dan mendukung gagasan, konsep, serta program koperasi yang diintroduksikan. Upaya yang demikian pada dasarnya adalah upaya pembelajaran.

Bahan belajar utama yang dikembangkan dalam upaya pembelajaran tersebut, berpusat pada pengertian, azas, dasar, landasan, fungsi, dan tujuan koperasi Indonesia. Efektifitas upaya belajar-membelajarkan ini diusahakan

dicapai dengan menggunakan metoda belajar kelompok. Untuk kepentingan ini maka perlu diadakan pembentukan kelompok-kelompok belajar dengan jumlah anggota 5-12 orang. Di dalam dan melalui kelompok-kelompok belajar tersebut dikembangkan kegiatan belajar-membelajarkan dengan menekankan pendekatan belajar partisipatif (participatory learning).

Dalam kelompok-kelompok belajar tersebut, fungsi dan peranan petugas PLS adalah sebagai mitra belajar, baik sebagai sumber belajar maupun sebagai fasilitator. Sebagai mitra belajar ia harus menempatkan diri pada kedudukan sejajar dengan anggota kelompok lainnya, tidak bersikap menggurui atau menghakimi. Sebagai sumber belajar ia harus memiliki wawasan, pengetahuan, aspirasi, serta ketrampilan yang memadai berkenaan dengan perihal perkoperasiaan. Sedangkan sebagai fasilitator ia harus dapat membantu agar peserta belajar dapat mengembangkan kegiatan belajar bersama dan saling membelajarkan.

2- Identifikasi Kepemimpinan Panutan

Keberadaan kepemimpinan panutan dalam komunitas pedesaan di Indonesia masih selalu merupakan unsur strategis bagi setiap upaya mendinamisasi dan memobilisasi kehidupan masyarakat. Seorang pemimpin panutan boleh jadi merupakan seseorang yang memegang jabatan formal di desa, mungkin juga seseorang dari luar struktur birokrasi

kekuasaan formal. Yang terakhir ini boleh **jadi** seorang **pemuka agama atau pemuka** adat. **Adakalanya pemimpin pamitan** di desa mencerminkan kepemimpinan formal dan informal sekaligus pada dirinya.

Pemimpin panutan diperlukan dalam fungsinya sebagai key person. yang dapat mempengaruhi dinamisasi dan mobilisasi masyarakat untuk kepentingan pembangunan. Petugas PLS perlu meraih simpati dan membangun kerjasama dengan pemimpin panutan di desa ke arah pengembangan gerakan koperasi khususnya dan bagi kepentingan pembangunan umumnya.

3. Pembinaan Pemimpin Panutan

Bukan tidak mungkin bahwa pemimpin panutan tidak memiliki apresiasi yang positif terhadap suatu gagasan atau rencana pembangunan, termasuk koperasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pembinaan dalam bentuk berbagai upaya penyuluhan dan pemberian motivasi yang menekankan segi afeksi dan kognisi.

Pemimpin panutan tidak harus memiliki kecakapan dan keterampilan yang tinggi untuk mengelola organisasi koperasi. Akan tetapi, yang lebih penting ialah dimilikinya wawasan dan pemahaman yang benar mengenai perkoperasian serta adanya rangsangan motivasi untuk mendorong pengembangan gerakan koperasi.

Sehubungan dengan itu, maka diperlukan upaya

penyuluhan dan pemberian motivasi. Tujuannya ialah agar pemimpin panutan dapat memiliki wawasan dan pemahaman mengenai koperasi serta rangsangan motivasi untuk mendorong pengembangan gerakan koperasi. Untuk kepentingan itu dapat digunakan sumber-sumber lokal dan sumber-sumber dari luar. Dalam hal ini, petugas PLS dapat membantu mengidentifikasi sumber-sumber yang relevan.

Upaya pembinaan, dalam arti pembelajaran yang dilakukan terhadap pemimpin panutan, haruslah dilakukan sedemikian rupa. Aspek-aspek sosial-psikologis dan kultural yang berkaitan dengan status sosial dan citra dirinya perlu mendapat perhatian penyuluh atau motivator. Perlakuan terhadapnya sebagai subyek dan sikap penyuluh atau motivator sebagai mitra dialog adalah sangat penting. Sikap menggurui harus di jauhi dan perlakuan terhadapnya sebagai warga belajar dewasa yang memiliki pengalaman harus lebih diutamakan. Oleh karena itu, metoda diskusi dan pendekatan non-directive learning adalah lebih sesuai.

Bahan belajar yang dikembangkan terutama berpusat pada pengertian, asas, dasar, landasan, fungsi, dan tujuan koperasi. Selain itu, juga fungsi dan peranan kepemimpinan panutan dalam pengembangan gerakan koperasi pedesaan, faktor-faktor pendukung dan penghambat ' yang mungkin di jumpai.

Pemimpin panutan yang telah memiliki wawasan dan pemahaman mengenai koperasi serta rangsangan motivasi

untuk mendorong gerakan koperasi, akan merupakan salah satu aset penting bagi pengembangan gerakan koperasi pedesaan. Faktor ini yang seringkali diabaikan pada model pengembangan gerakan koperasi pedesaan yang menggunakan pendekatan cetak biru (blue print approach). Hal yang sama juga seringkali terjadi pada model yang menggunakan pendekatan kelembagaan formal (formal institutional approach).

4. Identifikasi Kelompok Elit Lokal Potensial

Perintisan

Pada umumnya masyarakat di negara sedang berkembang, terutama di pedesaan, cenderung berorientasi ke atas dalam menentukan pilihan nilai-nilai dan penerimaan ide atau gagasan. Nilai-nilai, pengetahuan dan teknologi, dan/atau cara-cara baru yang hendak dimasyarakatkan di negara sedang berkembang atau di pedesaan biasanya lebih cepat berhasil, apabila nilai-nilai, teknologi dan pengetahuan baru tersebut telah lebih dahulu diterima dan diacu oleh kalangan elit lokal.

Atas dasar itu maka upaya pemasyarakatan nilai-nilai, gagasan atau ide, serta program pembangunan perlu memperhitungkan faktor respectability pendukung utama nilai-nilai, ide atau gagasan serta program pembaharuan tersebut. Hal ini juga dapat berlaku dalam upaya pemasyarakatan ide atau gagasan koperasi dan dalam upaya

pengembangan gerakan koperasi di pedesaan.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lapisan atas masyarakat desa itu bersifat lebih inovatif dari pada lapisan bawah. Dalam hal-hal tertentu, status sosial ekonomi penduduk pedesaan itu mempengaruhi sikap dan perilaku modern mereka. Masyarakat desa yang tingkatan sosial ekonominya tinggi dan mereka yang menempati status pemimpin, baik formal maupun informal, lebih memungkinkan pembentukan persepsi yang baik, serta sikap dan perilaku pembangunan yang relevan, dibandingkan dengan mereka yang tingkatan sosial ekonominya rendah dan tidak menempati posisi kepemimpinan.

Akan tetapi, tidaklah berarti bahwa semua orang dari kalangan elit lokal adalah potensial bagi upaya perintisan pembaharuan. Demikian pula halnya dalam upaya perintisan gerakan koperasi pedesaan. Faktor lain yang diperlukan adalah adanya apresiasi yang positif, wawasan yang luas serta pengetahuan yang memadai mengenai ide dan konsep koperasi itu. Selain itu, semangat keperintisan memerlukan adanya tingkat kesadaran sosial dan tanggung jawab sosial yang tinggi pada seseorang.

Berkaitan dengan hal yang dikemukakan di atas, maka sebelum suatu kelompok perintis pengembangan gerakan koperasi dibentuk dan diorganisasikan, petugas PLS dapat berperan membantu mengidentifikasi orang-orang yang dipandang potensial bagi upaya perintisan. Dalam memainkan

peranan tersebut, petugas PLS selalu menjalin kerjasama konsultatif dengan pemimpin panutan dalam fungsinya sebagai key person. Hal itu penting karena keserasian kerja sama di antara kedua pihak tersebut, yaitu pemimpin panutan dan kelompok perintis diperlukan bagi keberhasilan pengembangan gerakan koperasi sebagaimana yang diharapkan.

Apabila pemimpin panutan tidak memegang fungsi kepemimpinan formal di desa, maka petugas PLS harus pula selalu menjalin kerja sama konsultatif dengan pemimpin formal. Dengan demikian keserasian kerja sama yang harus dapat digalang ialah antara pemimpin formal, pemimpin panutan dan kelompok perintis.

Untuk melaksanakan tugas seperti dikemukakan di atas, maka seorang petugas PLS, selain harus memiliki syarat profesionalitas yang memadai, juga harus mempunyai integritas kepribadian yang kokoh. Kualifikasi personal - petugas yang demikian memerlukan penelaahan tersendiri. Secara singkat dapat dikatakan bahwa seorang petugas PLS disyaratkan mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas serta memiliki ketrampilan sosial yang tinggi, sehingga ia mampu menempatkan diri secara tepat dan memainkan peranannya.

5. Pembentukan dan Pembinaan Kelompok Perintis Gerakan Koperasi Pedesaan

Membentuk organisasi koperasi mungkin bukanlah

suatu hal yang sulit. Akan tetapi, mengelola suatu organisasi koperasi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Untuk menggerakkan koperasi, lebih-lebih pada tahap awal, diperlukan orang-orang yang memiliki semangat keperintisan dan kepeloporan yang kuat. Kualitas mental psikologis yang demikian tidak dimiliki oleh setiap orang, meskipun ia dapat ditumbuhkan dan dikembangkan melalui proses edukasi dan pelatihan.

Sejumlah orang yang memiliki kualitas mental psikologis yang demikian, yang menghimpun diri sebagai kelompok yang terorganisasikan menjadi kelompok perintis, akan merupakan aset yang sangat berharga bagi upaya pengembangan gerakan koperasi. Sejumlah orang semacam itulah yang diharapkan dapat diidentifikasi sebelumnya oleh petugas PLS.

Jika sejumlah orang yang memiliki semangat keperintisan dan kepeloporan dapat dimotivasi menghimpun diri secara terorganisasikan, maka awal gerak pengembangan gerakan koperasi sudah dapat dimulai. Selanjutnya, semangat keperintisan dan kepeloporan yang kuat itu perlu dipelihara dan ditingkatkan terus-menerus. Hal itu perlu agar pengembangan gerakan koperasi dapat berlangsung terus secara meningkat. Oleh karena itulah, maka diperlukan upaya penyuluhan dan pemberian motivasi kepada kelompok perintis yang telah terbentuk tersebut.

Untuk kepentingan pemberian penyuluhan dan motivasi

tersebut, seorang petugas PLS dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan dan sumber-sumber yang ada. Demikian juga, mengenai jenis dan bentuk kegiatan penyuluhan yang relevan serta bahan-bahan pembelajaran yang berkaitan.

Pengembangan program kegiatan penyuluhan, motivasi dan pelatihan yang dilakukan oleh petugas PLS dapat dilaksanakan secara lintas sektoral, dengan melibatkan berbagai lembaga dan/atau instansi yang ada. Pengembangan program penyuluhan dan pelatihan yang ditujukan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan, serta untuk mempertinggi keterampilan mengelola koperasi, dapat dilakukan oleh petugas PLS dengan bekerja sama dengan Kantor Departemen Koperasi setempat. Misalnya, Program Penyuluhan dan Pelatihan Anggota Inti Koperasi, Program Penyuluhan, dan Pelatihan Perintis Gerakan Koperasi.

Program pelatihan semacam Achievement Motivation Training (AMT) yang sangat penting pula bagi suatu kelompok perintis, dapat dirancang oleh petugas PLS dengan bekerja sama dengan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat. Program PLS berkenaan dengan perluasan wawasan dan pengetahuan anggota kelompok perintis mengenai pembangunan pedesaan, dapat dikembangkan oleh petugas PLS dengan bekerja sama dengan Kantor Direktorat Pembangunan Desa (Bangdes). Sedangkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai kewirausahaan dapat diprogramkan melalui pelatihan yang dirancang bersama oleh petugas PLS dengan

Kantor Departemen Perdagangan setempat, atau dengan lembaga-lembaga swasta yang berkaitan.

Sejalan dengan prinsip partisipatori dalam aktivitas pembelajaran PLS (participatory learning approach), maka seyogianya warga belajar, yaitu anggota kelompok perintis dilibatkan sejak dini, termasuk dalam proses perencanaan kegiatan belajar-membelajarkan. Pelibatan mereka sejak awal kegiatan tersebut merupakan salah satu bentuk pemberian motivasi bagi mereka sebab dengan begitu mereka merasa ikut bertanggungjawab atas jalannya program itu.

6. Pengembangan dan Pembinaan Koperasi. Pedesaan

Pada saat pembentukan kelompok perintis koperasi pedesaan, pada dasarnya telah merupakan tahap awal eksistensi kelembagaan koperasi pedesaan. Koperasi yang semula berupa gagasan telah menjadi suatu kenyataan sosial dalam wujud organisasi. Pada model pengembangan gerakan koperasi pedesaan yang lain, yang tidak menggunakan model yang direkomendasikan ini, biasanya langsung pada tahap pembentukan kelembagaan koperasi. Proses sebelumnya seperti yang diutarakan di atas, dan sebagian proses sesudahnya umumnya tidak dikenal. Model yang disebutkan terakhir itu, yang didasarkan atas pendekatan kelembagaan, justeru lebih banyak dijumpai dalam praktek selama ini. Hal ini dapat diduga sebagai salah satu faktor kelambanan

atau kemacetan gerakan koperasi pedesaan di banyak tempat.

Organisasi koperasi yang telah terbentuk senantiasa memerlukan pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan. Terbentuknya kelembagaan koperasi itu bukanlah tujuan dari gerakan koperasi itu sendiri. Kelembagaan koperasi itu merupakan wahana **bagi** upaya pengembangan gerakan **koperasi** yang diidealkan. Upaya pembinaan dan pengembangan kelembagaan koperasi pada dasarnya bertumpu pada pemberian pelayanan dan motivasi kepada anggota serta masyarakat sekitarnya. Hal ini sejalan dengan prinsip koperasi sebagai organisasi yang berorientasi pelayanan (service oriented), dan bukannya terutama berorientasi laba (profit oriented).

Pelayanan yang baik oleh koperasi terhadap anggotanya merupakan fokus utama kegiatan koperasi. Melalui pelayanan yang baik itu, para anggota dapat memperoleh manfaat sosial-ekonomi yang memberi arti penting bagi keanggotaannya dalam koperasi. Hal itu sesuai dengan prinsip bahwa moral ekonomi koperasi ialah kerja sama dan nilai kegunaan, sedangkan motif ekonomi koperasi adalah manfaat sosial-ekonomi.

Kualitas dan kuantitas pelayanan koperasi kepada para anggotanya merupakan juga pemberian motivasi kepada mereka untuk memperkuat komitmen dan partisipasinya terhadap koperasi.

Upaya penyuluhan dan pelatihan perlu dilakukan bagi

para penyelenggara kegiatan koperasi dan para anggota. Bagi para penyelenggara kegiatan koperasi, upaya penyuluhan dan pelatihan bertujuan untuk mengembangkan wawasan, aspirasi serta pengetahuan, dan ketrampilan untuk mengelola koperasi. Sedangkan bagi anggota, tujuan utamanya adalah untuk memelihara komitmennya yang kuat dan partisipasinya secara aktif dalam kegiatan koperasi, di samping untuk memperluas wawasan, aspirasi, dan pengetahuan.

Pengembangan program penyuluhan dan pelatihan untuk spesifikasi tujuan dan sasaran tersebut perlu diidentifikasi secara cermat, agar diperoleh efektifitas dan efisiensi. Untuk kepentingan ini petugas PLS dapat memberikan bantuan yang berguna. Dalam merancang kegiatan penyuluhan dan pelatihan itu, petugas PLS dapat bekerja sama dengan berbagai lembaga dan instansi yang ada, baik pemerintah maupun swasta.

Bahan-bahan untuk kegiatan belajar-membelajarkan yang diperuntukkan bagi para penyelenggara kegiatan koperasi, terutama berkenaan dengan pengertian, asas, dasar, landasan, fungsi, dan tujuan koperasi. Selain itu, juga hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan serta ketrampilan organisasi dan kepemimpinan. Sedangkan bagi anggota biasa, terutama berkenaan dengan tujuan koperasi serta manfaat menjadi anggota koperasi.

7. Pembinaan Anggota, Calon Anggota, dan Karyawan

Sebagaimana diketahui aset utama koperasi adalah anggota-anggotanya, sesuai dengan hakekatnya sebagai kumpulan orang, dan bukannya kumpulan modal. Oleh karena itu, masalah kualitas anggota di samping kuantitasnya adalah penting bagi stabilitas dan kelangsungan koperasi. Sedangkan bagi karyawan yang mengelola perusahaan koperasi, yang lebih penting adalah dipenuhinya syarat profesionalitas, di samping loyalitas dan dedikasi.

Pembinaan anggota sebagaimana telah juga disinggung di atas, terutama ditujukan untuk memelihara komitmennya yang kuat dan partisipasinya yang aktif dalam kegiatan koperasinya, di samping untuk memperluas wawasan, aspirasi, dan pengetahuannya. Hal yang demikian sesungguhnya juga penting bagi calon anggota.

Kenyataan menunjukkan bahwa pada umumnya perkumpulan koperasi Indonesia selama ini tidak menyelenggarakan secara khusus pembinaan atau pendidikan dan pelatihan bagi calon-calon anggota. Bahkan, seringkali juga dijumpai perkumpulan koperasi yang tidak mempunyai program khusus untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya. Faktor ini merupakan salah satu kendala utama bagi kemajuan dan perkembangan koperasi tersebut.

Anggota dan calon anggota yang mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi akan fungsi dan peranan keanggotaannya adalah sangat penting bagi stabilitas dan

kelangsungan koperasi. Hanya anggota atau calon anggota yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan fungsi dan peranan keanggotaannya, yang dapat diharapkan mempunyai komitmen yang kuat dan partisipasi yang aktif. Sedangkan komitmen yang kuat dan partisipasi yang aktif dari anggota itulah yang mengindikasikan eksistensi dari suatu koperasi.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota dapat dilaksanakan dalam bentuk inservice training sedangkan bagi calon anggota dapat dilaksanakan dalam bentuk preservice training. Bagi karyawan dapat ditempuh kedua-duanya, baik preservice training maupun inservice training••

Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, baik yang sifatnya sebagai preservice training maupun inservice training, perlu mempertimbangkan kepentingan efektifitas dan efisiensinya. Untuk mencapai maksud tersebut, maka petugas PLS dapat membantu mengidentifikasi kebutuhan belajar spesifik disesuaikan dengan karakteristik warga belajar yang bersangkutan, tujuan pelatihan, jenis koperasi, wilayah kerja dan usahanya, dan lain sebagainya. Identifikasi sumber-sumber belajar-pembelajaran lokal juga penting dilakukan agar dapat dicapai hasil pelatihan yang tepatguna dan berhasilguna.

Petugas PLS juga dapat membantu mengidentifikasi dan mengembangkan bahan-bahan belajar-pembelajaran yang

relevan bagi masing-masing jenis kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut.

Bahan belajar bagi calon anggota terutama dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan dasar minimal mengenai perkoperasian. Hal ini menyangkut pengertian koperasi, tujuan koperasi, manfaat menjadi anggota, serta hak dan kewajiban anggota koperasi. Dengan menguasai pengetahuan minimal tersebut diharapkan seorang calon anggota telah lebih dahulu memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab keanggotaan yang memadai pada saat ia kemudian menjadi anggota penuh. Dengan kesadaran dan tanggung jawab yang telah dimilikinya, ia diharapkan mempunyai komitmen yang kuat dan tingkat partisipasi tinggi pada saat ia terdaftar sebagai anggota penuh.

Bahan belajar bagi karyawan disesuaikan dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Pada umumnya meliputi keterampilan administrasi dan organisasi perusahaan. Secara lebih rinci bahan belajar mencakup fungsi-fungsi manajemen, job description, administrasi keuangan, administrasi umum seperti tata laksana perkantoran, pengetahuan mengenai produktifitas, dan efisiensi usaha.

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar-membelajarkan bagi anggota dan calon anggota, kiranya lebih diutamakan penggunaan metoda belajar partisipatori (participatory learning method) dan dengan menggunakan teknik belajar kelompok. Untuk keperluan tersebut, anggota seyogianya di-

kelompokkan menurut kriteria tertentu, misalnya menurut lokasi kediaman (ketetanggan) dan jenis pekerjaan. Dalam hal pembentukan kelompok belajar, maka perlu diperhatikan besarnya kelompok belajar yang ideal, yaitu antara 5-12 orang anggota.

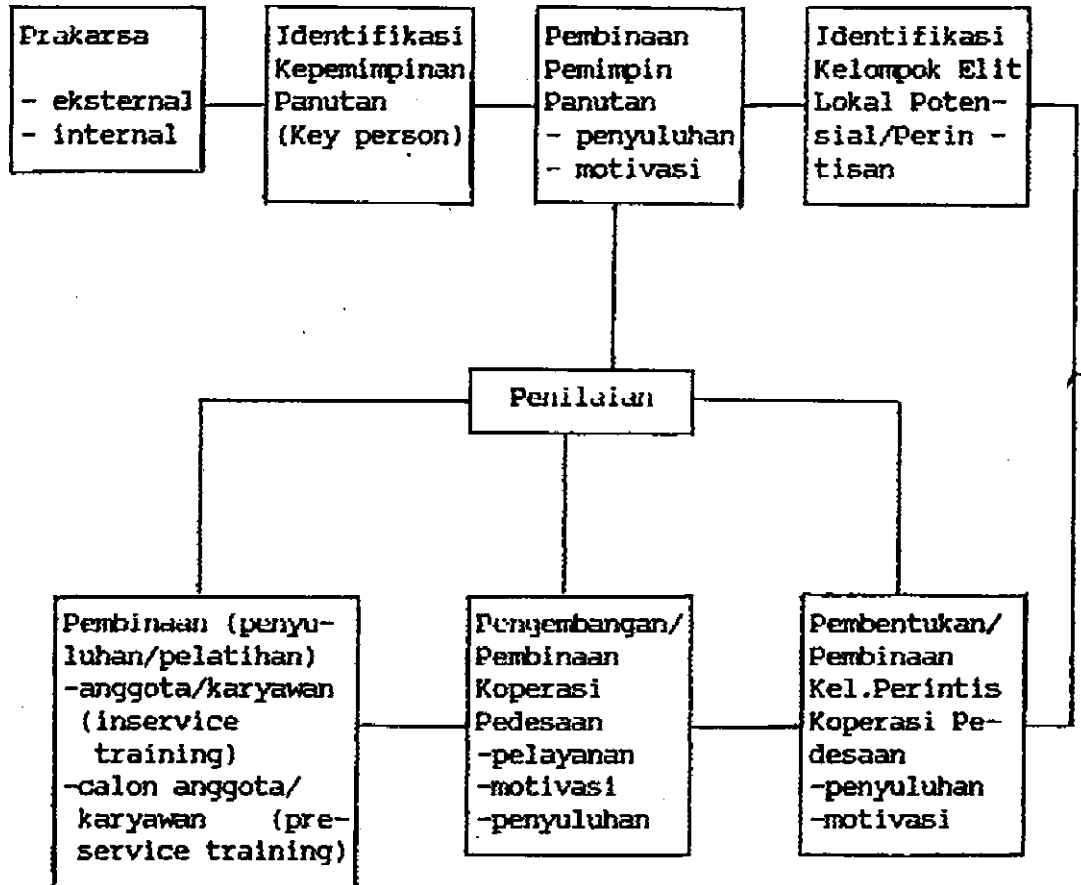
Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) pada tingkat pusat (nasional) dan Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) pada tingkat lokal, sebagai representasi dari gerakan koperasi seharusnya memegang peranan koordinatif penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diutarakan di atas.

Penilaian

Kegiatan penyuluhan, pemberian motivasi dan pelatihan adalah upaya yang berorientasi tujuan. Oleh karena itu, diperlukan penilaian untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan yang diharapkan. Penilaian dilakukan, baik terhadap hasil yang dicapai maupun terhadap pelaksanaan kegiatan itu sendiri.

Model pengembangan gerakan koperasi pedesaan dalam perspektif PL3. sebagaimana telah diutarakan di atas dapat digambarkan berikut ini.

MODEL PENGEMBANGAN
GERAKAN KOPERASI PEDESAAN



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Sanusi, 1383, Kapita Selekta Pembahasan Masaiah-roasaiah Sosial. Fakultas Pasca Sarjana IKIP Bandung.
- Ahmed, Manzoor, 1375, The Economics of Nonformal Education Resources« Costs and Benefits. Preanger Publishers, New York, Washington, London-
- A. Hanan Hardjasasmita, 1983, Sejarah Lahirnya Gerakan Koperasi Indonesia dan Pgrkembangannva Sampai Dengan Awal Periode BO^{tan}. Penerbit C.V. Armico, Bandung.
- Alfian, <ed.>, 1985, Persepsi masaiah Tentang Kebudayaan, kumpulan karangan, Penerbit Gramedia, Jakarta.
- Asnawi Hasan, 1387, Strategy of Cooperative Developroent in Indonesia, The National Centre for Cooperative Training and Development <Puslatpenkop> Pusat Latihan dan Penataran Perkoperasian, Departement of Cooperatives, Indonesia, Jakarta.
- Astrid S. Susanto, 1983, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, Binacipta, Jakarta.
- A. Suhandi SHM., 1373, Masyarakat Bugis Makassar. Fakultas Sastra, UNPAD. Bandung.
- A. Suryadi, 1333, Pembangunan Masyarakat Desa, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Axinn, George H., 137S, Nonformal Education and Rural Development. Michigan State University, East **Lansing**,
- Bennis, Warren G., Benne, Kenneth D., and Chin, Robert, 1372, The PIainning of Changes Readings in The Applied Behavioral Sciences. Holt, Renihart and Winston, New York.
- Bogdan, R.C. & Biklen, S.K., 1382, Qualitative Research for Education. Boston, Allyn & Bacon.
- Borgess, Robert G., 1985, Issues in Educational Research; Qualitative Methods. The Falmer Press, London and Philadelphia.
- , 1385, Strategies of Educational Research Qualita-tive Methods, The Falmer Press. London.

Philadelphia.

- Boshier, Rogers, 1975, Behavior Modification and Contingency Management in a graduate Education Program, Adult Education No» 26.
- Brookfield, Stephen, 1984, Adult Learners in Adult Education and The Community, Teacher College, Columbia University, New York and London.
- ChoiruJ Djamhari, 1984, (penyunting), Memperkokoh Pilar-pilar Kemandirian Koperasi. Ontologi Essei, Balitbang Departemen Koperasi, Jakarta.
- Cohen, Arthur R., 1964, Attitude Change and Social Influence. Basic Books, Inc. Publishers, New York, London>
- Colletta N. J., 1975, The Use of Indigenous Culture as a Medium for Development: The Indonesia Case, BP3K Jakarta.
- ..., dan Umar Kayam, (penyunting), 1987 Kebudayaan dan Pembangunan. Sebuah Pendekatan Terhadap Antropologi Terapan di Indonesia. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Coombs, Philip H., Monzoor Ahmed, 1978, Attacking Rural Poverty. How Nonformal Educational Can Help. The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London.
- Dove, Michael R., (penyunting), 1985, Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- D. Sudjana, 1989, Seri Pendidikan Luar Sekolah. Wawasan Sejarah Perkembangan. Falsafah dan Faktor Pendukung. Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara, Bandung.
- ..., 1989, Seri Pendidikan Luar Sekolah. Analisis Kebutuhan Pendidikan Sepanjang Hayat, Relevansi Dengan Pembangunan Masyarakat dan Wawasan Ke Masa Depan. Yayasan Pendidikan Terpadu Krida Nusantara, Bandung.
- ..., 1981, Pendidikan Luar Sekolah. Wawasan. Sejarah Perkembangan. Falsafah dan Teori Pendukung, Azas, Penerbit Nusantara Press UNINUS, Bandung.

- D. Sudjana, 1992, Pengantar Manajemen Pendidikan Luar Sekolah, Penerbit Nusantra Press, Bandung.
- Dubel 1₁ Folke, 1385, Pembangunan Koperasi Suatu Metode Perintisan dan Pengorganisasian Koperasi Pertanian di Negara Berkembang. Institut lianagemen Koperasi Indonesia.
- Emelianof-f_t Ivan V., 1948, Economic Theory of Cooperation, Dissertation, Faculty of Political Science, Columbia University, Washington D.C.
- Faure, Edgar, et» al., 1972, Learning To Be, The WorId of Education Today and Tomorrow, Unesco, Paris.
- , 1984, Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan. terjemahan Alois A. Nugroho, Gramedia, Jakarta.
- Gede Anggan Suhandsna. 1980, Pengaruh Kepariwisataaan Terhadap Perilaku Kewiraswastaan Pengrajin Ukir Kayu di Bali. Disertasi, SPS-IKIP Bandung.
- Goldman, Harvey, 1966, A Study of Teacher-Administrator Relationships and The Influnce of Need Patterns, Educational Publication Services, Michigan State University, East Lansing.
- Hamid Abdullah, 1985, Manusia Bugis Makassar. Suatu Tjajaan Historis terhadap Pola Tingkah Laku dan Pandangan Hidup Manusia Bugis Makassar, inti Idayu Press, Jakarta.
- Hersey, Paul, and Blanchard, Kenneth H., 1977, Management of Organization Behavior Utilizing Human Resources Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Yersey.
- Hilgard, Ernest R., dan Bowen, Gordon H., 1977, Theory of Learning. Prentice Hall of India Privated Limited, New Delhi.
- J.B. Djarot Siwijatmo, 1982, Koperasi di Indonesia, LPEI Universitas Indonesia, Jakarta.
- Kindervatter, Suzanne, 1979, Nonformal Education AS An Empowering Process. Central for International Education Hills South, University of Massachusetts, Amherst, Mass. 01003 USA.

- Knowles, Malcolm, 1973, The Adult Learner: A Neglected Species. Gulf Publishing Company, Book Publishing Division. Houston.
- , 1375, Self Directed Learning. Association Press Foll ett Publishing Company, Chicago.
- Koentjaraningrat, (penyunting), 1982, Masalah-masalah Pembangunan, Bunga Rampai Antropologi Terapan, LP3ES, Jakarta.
- , Manusia dan Kebudayaan di Indonesia. (redaksi), Penerbitan Djambatan, Jakarta, 1383.
- Korten, D.C. dan Syabrir, (penyunting), terjemahan A. Setiawan Abdu, 1388, Pembangunan Berdimensi Kerakyatan. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Krech, David, et. al., 1382, Individual in Society. McGraw Hill Kogakusha, Ltd., Tokyo.
- Lasswell, Harold D., dan Abraham Kaplan, 1363, Power and Society. a framework of political inquiry. New Haven London,
- Lindzey, Gardner, and Eliot, Aronson, (ed-) 1363, The Handbook of Social Psychology. Vol. I-III American Publishing Co., Pvt., Ltd., New Delhi.
- Lysen, A., 1381, Individu dan Masyarakat (terjemahan Indonesia). cetakan ke-sembilan, Penerbit Sumur Bandung.
- Mattulada dan Narifumi Maeda, (ed.), 138i, Village and Agricultural Landscape in South Sulawesi. Kyoto University.
- 1375, Latoa. tesis Doktor» Universitas Indonesia, Jakarta.
- Mc Anany, Emile G., (ed.), 1380, Communication in the Rural Third Worlds The Role of Information in Development. Preanger Publisher, New York.
- McClelland, David C., 1353, The Achievement Motive. Apleton Century Crofts. Inc., New York.
- Mellor, John W., 136&, The Economics of Agricultural Development, an adoption, CTS Series, New York-Bombay.
- M. Mansyur Amin, dfck., 1388, Kelompok Elit dan Hubungan Sosial di Pedesaan. Pustaka Grafika Kita, Jakarta.

- Mohammad Hatta, 1354, Kumpulan Karangan, III, Penerbit dan Balai Buku Indonesia, Djakarta, Amsterdam, Surabaya.
- Indonesia. Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Morgan, Barton, et.al., 1376, Methods in Adult Education. third edition, The Interstate, Printers & Publishers, Inc., Denville, Illinois.
- Moulton, Daniel, 1380, Principies of Adult Learning: Implications for an Inservice Education Program Development Model. Adult and Extension Education, Texas.
- Moulton Jeanne Marie, 1377, Animation Rurale. Education for Rural Development. Center for International Education Hills South, University of Massachusetts, Amherst, Mass. 01003, USA.
- M. Soedomo, 1330, Aktualisasi. Arah dan Orientasi Serta Struktur Kelerobagan Pendidikan Luar Sekolah; Kini dan Masa Depan. suplemen makalah, IKIP Malang.
- Mubyarto, (penyunting), 1385, Peluang Kerja dan Berusaha di Pedesaan, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi, Yogyakarta.
- Muenkner, Hans-H., 1385, Koperasi Untuk si Kaya atau Untuk si Miskin, alih Bahasa Team Koperasi Pemuda Indonesia, Koperasi Jasa Audit Nasional.
- , 1385, Co-operative Principles and Co-operative Law. Friedrich-Ebert-Stiftung, Godesberger Allee 143, 5300 Bonn 2.
- Noeng Muhadjir, 1383, Kepemimpinan Adopsi Inovasi untuk Pembangunan Masyarakat. Reka Press, Yogyakarta.
- Ogburn, William F., (editor), 1352, A Study of Rural Society, fourth edition, Houghton Mifflin Company, Boston, New York, Chicago, Dallas, Atlanta, San Francisco .
- Pudjiwati Sajogyo, 1385, Sosiologi Pembangunan. FPS-IKIP Jakarta-BKKBN Jakarta.
- Rogers, Everett M., Shoemaker, Floyd F., 1971, Communication of Innovations, The Free Press: A Division of Mc Millan Publishing Co., Inc., New York.

- Rogers, Everett M., 1969, Modernization Among Peasants: The Impact of Communication. Holt Rinehart and Winston, Inc., New York.
- , 1983, Diffusion of Innovations. The Free Press; A Division of McMillan Publishing Co., Inc., New Yorks.
- Rusli Lutan, 1986, Pola Adaptasi. Partisipasi dan Respons Masyarakat Terhadap Inovasi Dalam Kaitannya Dengan Bio-Kultural Pedesaan, disertasi. FPS-IKIP Bandung.
- Saleh Syafradji, (penyunting), 1988, Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Tinjauan Studi Eropiris. Jakarta.
- , 1988, Pemikiran Modernisasi KUD. Pendekatan Lembaga Usaha, Jakarta.
- Sartono Kartodirdjo, 1981, Elite Dalam Perspektif Sejarah. editor, LP3ES, Jakarta.
- Seidenberg, Bernard, and Snadowsky, Alvin, 1976, Social Psychology: An Interoduction. Collier McMillan, Publishers, London.
- Soedjatmoko, 1983, Dimensi Manusia dalam Pembangunan. pilihan karangan, LP3ES, Jakarta.
- Soedjito Sosrodihardjo, 1987. Aspek Sosial Budaya Dalam Pembangunan Pedesaan. PT. Tiara Wacana, Yogya.
- Soepardjo Adikusumo, 1988, Pendidikan, Interpretasi dan Implikasi (Pengantar- Sosio Kultural). FPS-IKIP Bandung,
- , 1988, Faktor Ekologi Dan Implikasi Bagi Pendidikan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, IKIP Bandung.
- S. Nasution, 1988, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Penerbit Tarsito, Bandung.
- Sorokin, Pitirim A., 1954, Social and Cultural Mobility. The Free Press of Glence Collier McMillan Ltd., London.
- Sri-Edi Swasono, (editor) 1987, Mencari Bentuk. Posisi dan Realitas Koperasi Di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, edisi baru, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.

- Sri-Edi Swasono, 1983, "Koperasi Sebagai Sistem Ekonomi Indonesia; Tantangan dan Momentum Daerah Menghadapi Repelita V", Mimbar BP-7 No. 39 Tahun VII.
- , 1990, Bung Hatta Bapak Koperasi Tokoh Demokrasi Ekonomi. DEKOPIN, Jakarta.
- , 1990, Demokrasi Ekonomi. Keterkaitan Usaha Partisipatif vs Konsentrasi Ekonomi. Makalah disampaikan pada Seminar Pancasila sebagai Ideologi dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara, KOPKAR DEKOPIN. Jakarta.
- , 1991, Nilai Tambah Keterkaitan dan Pembangunan Nasional, Pidato Ketua Umum Dekopin pada Resepsi Hari Koperasi ke-44, 29 Juli 1991, DEKOPIN, Jakarta.
- , 1991, Kebudayaan dan Ekonomi; Kedaulatan Rakyat. Demokrasi Ekonomi. dan Kemandirian Nasional (Pendekatan Normatif), Makalah diajukan pada Kongres Kebudayaan 1991, I Nopember 1991, TMII (Anjungan Lampung?) Jakarta.
- Srinivasan, Lira, 1977, Persepektive on Nonformal Adult Learning functional education for individual, community. and national development. The Van Dyck Printing Company, North Haven, Connecticut.
- Sri Wulan Azis, 1984, Aspek-aspek Hukum KUD dalam Gerakan Pelaksanaannya. Penerbit Alumni, Bandung.
- Sutaryat Trisnamansyah, 1984, Pengaruh Motif Berafiliasi. Keterbukaan Berkomunikasi - Persepsi dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Perilaku Modern Petani, di seriasi, FPS- IKIP Bandung.
- Sutherland, Robert E., 1936, Introductory Sociology, Chicago, New York.
- Zaltman, Gerald, et.al., <ed.>, 1972, Creating Social Change. Holt Rinehart & Winston, Inc., New York.



DALIL-DALIL

1. Pembangunan masyarakat dapat dilakukan dengan menumbuhkan dan mengembangkan unsur kekuatan pendorong yang ada dalam masyarakat itu sendiri atau dengan menggunakan kekuatan pendorong dari luar melalui pengenalan ide, konsep atau cara-cara baru kepada masyarakat tersebut.
2. Ide dan konsep pembangunan dapat berasal dari luar, tetapi masyarakat tidak dapat dibangun secara efektif oleh pihak yang datang dari luar, melainkan oleh masyarakat itu sendiri.
3. Upaya pembangunan tidak cukup hanya ditopang dengan sarana dan prasarana fisik yang sifatnya mekanis dan matematis, tetapi memerlukan pula suatu landasan nilai yang dapat menjadi acuan pengembangan wawasan, aspirasi, dan kreativitas untuk memacu etos kerja.
4. Dalam masyarakat di mana pun terdapat perangkat nilai tradisi, yang dapat secara kreatif divitalisasikan menjadi sumber daya budaya sebagai referensi nilai etika moral pembangunan umumnya dan pengembangan gerakan koperasi khususnya.
5. Kesadaran dan pemahaman akan misi kultural gerakan koperasi merupakan prasyarat bagi upaya pengembangan gerakan koperasi dan pembinaan kelembagaan koperasi.
6. Tradisi kekeluargaan serta semangat kebersamaan dan solidaritas yang ada dalam masyarakat, tidak dengan

sendirinya menyebabkan berkembangnya gerakan koperasi dan kuatnya kelembagaan koperasi, melainkan diperlukan kreativitas mentransformasikannya menjadi acuan akhlak dan perilaku oleh seorang pemimpin berciri panutan.

Pendidikan untuk pembangunan masyarakat dan pengembangan gerakan koperasi perlu mendahulukan kalangan elit lokal dan pemimpin, baik formal maupun informal, sebagai subyek pembelajaran yang bertujuan menjadikan mereka agen pembaharu; karena mereka lebih bersifat inovatif dibandingkan mereka yang berasal dari kalangan bawah dan yang tidak menduduki posisi kepemimpinan.

Suasana formal pada kebanyakan kegiatan PLS yang direncanakan dan diorganisasikan lebih ketat (formal instructional setting) cenderung menghambat terjadinya interaksi belajar yang bersifat dialogik, sehingga natural societal setting perlu dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembelajaran.

Pendidikan orang dewasa harus menjadi bagian integral dari kehidupan, apabila ia diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pengembangan gerakan koperasi secara maksimal.

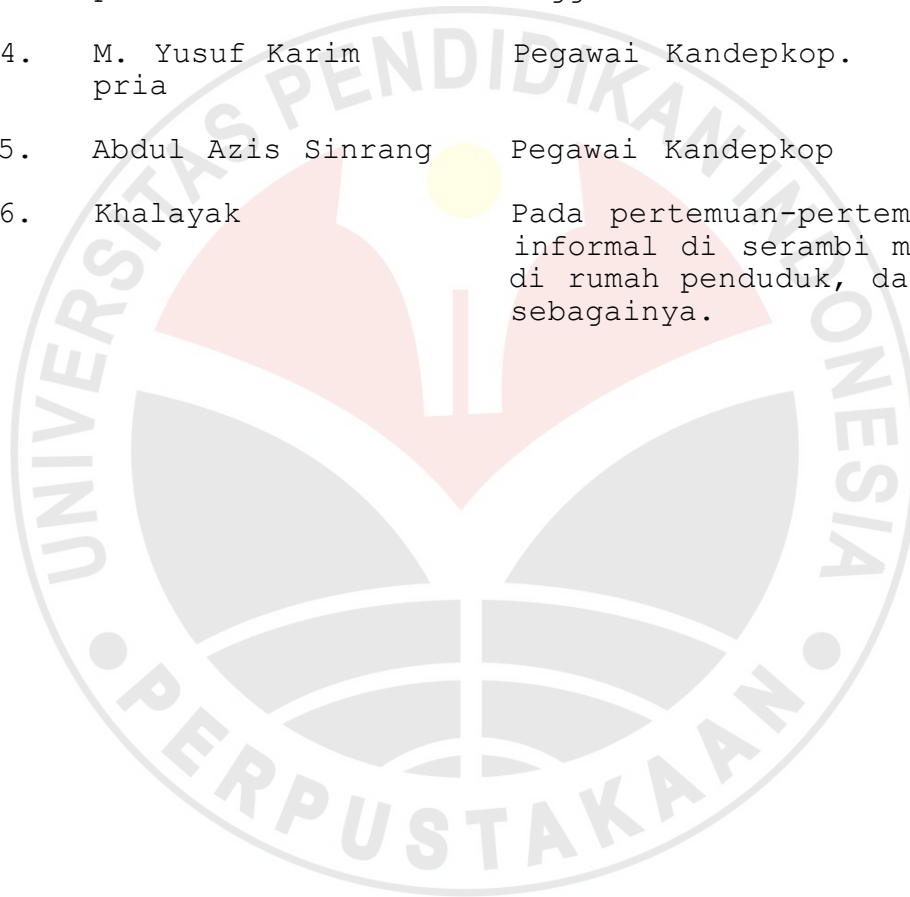
LAMPIRAN 2

DESKRIPSI DATA LAPANGAN
Latar Belakang Responden

No.	Nama Jenis kelamin/Umur	Status/Keterangan
	H. Ince Mansyur pria/66	Pensiunan Kakandep Dikbud Kabupaten Bulukumba/ Ketua GKPN/Ketua Dekopinda
2.	Drs. Ambo Upe Bakar pria/45	Anggota DPRD/Kelahiran Desa Bontosunggu
3.	Drs. Syahrir Ilyas pria/45	Penilik SD/Pelatih Bola voli/ Pengurus KONI/Kelahiran desa Bontosunggu
4.	Drs Andi Ansar pria/46	Dekan IAIN Bulukumba/Dekan STKIP Muhammadiyah Bulukumba/ Kelahiran desa Bialo tetangga desa Bontosunggu
5.	Makkulau pria/27	Guru SD di Bontosunggu/ Anggota KUD
6.	Abdul Hafid pria/49	Pamong Desa/ Ketua pertama KUD/Wakil ketua KUD/Anqgota kelompok perintis.
7.	M. Dahlan B. pria/42	Karyawan KUD/Manajer unit perdagangan KID/Anggota kelompok perintis.
8.	Nurdin S. pria/37	Sekretaris KUD/Guru SD
9.	H. Abdullah Karim pria/42	Manajer Utama KUD/Wiraswasta.
10.	Drs. Ibnu Yatsin	Ketua KUD/Ketua BP Puskud/ Kepala SD
11.	H. Palessei pria/66	Kepala Desa/Pemrakarsa pembentukan BtJUD/KUD desa Bontosunggu/Ketua BP-KUD.

Latar Belakang Responden
(Lanjutan)

No.	Nama Jenis kelamin/Umur	Status/Keterangan
12.	H. Ibnu Hajar pria/38	Bendahara KUD/Anggota kelompok perintis
13.	K. M. Said pria/31	Ketua kelompok tani/Guru SD/ Anggota KUD.
14.	M. Yusuf Karim pria	Pegawai Kandepkop.
15.	Abdul Azis Sinrang	Pegawai Kandepkop
16.	Khalayak	Pada pertemuan-pertemuan informal di serambi mesjid, di rumah penduduk, dan sebagainya.



Reduksi Hasil Wawancara

1. H. Ince Mansyur

Tanggal: 10 Mei 1989

1.1 Persepsi mengenai kenyataan perkembangan KUD Mattirobulu.

Faktor Kepala Desa sebagai pemimpin puncak lokal banyak menentukan. Kebanyakan Kepala Desa memandang pembinaan/pengembangan program yang diluncurkan dari "atas desa" sebagai semata-mata tugas formal. Tetapi Kepala Desa BS memandang pembinaan/pengembangan KUD di desanya sebagai tugas atau kewajiban moral dan sosial, di samping sebagai tugas formal.

Mungkin itu disebabkan karena loyakitanya kepada pemerintah pusat. Pada waktu revolusi fisik, ia ikut berpartisipasi, dan pada waktu terjadi kekacauan akibat pemberontakan Abdul Kahar Muzakar, ia juga dengan tegas memilih memihak kepada pemerintah pusat. Dia ikut memanggul senjata melawan pemberontak dan melindungi penduduk desa agar dapat menggarap sawahnya.

Tanggal: 11 Mei 1989/15 April 1990

Kepala Desa BS (H. Palessei) sebenarnya tidak mempunyai pengalaman pendidikan formal yang berarti. Boleh dikatakan dia tuna aksara. Tetapi dia mempunyai rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Jadi ketika ia berhasil diyakinkan bahwa gagasan, konsep, dan program BUUD/KUD itu baik dan menguntungkan rakyat banyak apabila dijalankan dengan sebaik-baiknya, maka dia menggunakan wibawa dan pengaruhnya mengajak para pamong desa, keluarga, dan kerabat dekatnya membentuk dan mengembangkan BUUD/KUD di desanya.

Pengaruh dan wibawanya memang besar di kalangan orang-orang di sekitarnya karena selain ia dikenal keberaniannya terutama di masa kekacauan, juga karena ia dikenal jujur dan tidak mementingkan diri sendiri. Sepanjang riwayat hidupnya ia seringkali membuktikan keberanian, kejujuran, dan solidaritasnya terhadap orang banyak/masyarakat. Ucapannya sejalan dengan tindakannya.

Tetapi ia juga dikenal dapat bertindak keras secara fisik terhadap orang yang tidak mengindahkan ketentuan umum, seperti misalnya tidak turut kerja

bakti di desanya. Terhadap orang yang demikian, ia tidak segan memukulnya. Atau mengusir orang yang demikian dari desanya.

Tanggal: 1 Juni 1989

Tokoh H. Palessei itu besar jasanya bagi pengembangan BUUD/KUD di desa BS. Tidak seperti beberapa kepala desa yang lain yang umumnya melaksanakan program dari atas-desa semata-mata sebagai kewajiban formal karena kedudukannya sebagai kepala desa, maka H. Palessei memandang upaya pembinaan dan pengembangan KUD di desanya sebagai kewajiban moral. Karena itu upaya ke arah itu harus didukung dan dibantu sepenuhnya dalam kapasitasnya sebagai kepala desan.

Ia selalu memberikan dorongan dan motivasi kepada para penyelenggara dan pelaksana kegiatan para penyelenggara dan pelaksana kegiatan BUUD/KUD supaya mereka bekerja giat dan jujur demi kemajuan dan perkembangan badan tersebut.

Dorongan motivasi yang selalu diberikannya tampaknya efektif, karena para pendukung dan penyelenggara tersebut adalah kerabat dan keluarga serta pamong desa, yang kesemuanya masih berada dalam lingkaran terdekat dari kehidupannya.

Keadaan yang demikian umumnya tidak terdapat di desa lain termasuk di desa-desa tetangga dekatnya.

Tanggal: 2 Juni 198

1.2. Persepsi mengenai karakteristik pribadi H. Palessei.

Sejak masa mudanya ia dikenal sebagai orang yang selalu bersikap sopan santun. Terhadap orang kebanyakan ia bersikap menghargai, terhadap orang yang terpendang; "samanna dita e.lo. nakokkong lasenna mappakalebbe/mabbicara".

Meskipun ia terkesan rendah hati dengan sikap hormatnya terhadap orang lain itu, tetapi ia terkenal seorang pemberani.

Dalam berbagai pertempuran melawan gerombolan pengacau di masa yang lalu, konon ia tidak pernah berlindung atau tiarap, meskipun menghadapi tembakan yang gencar. Konon peluru menghindar mengenai dirinya dan kebal terhadap peluru yang sempat mengenainya.

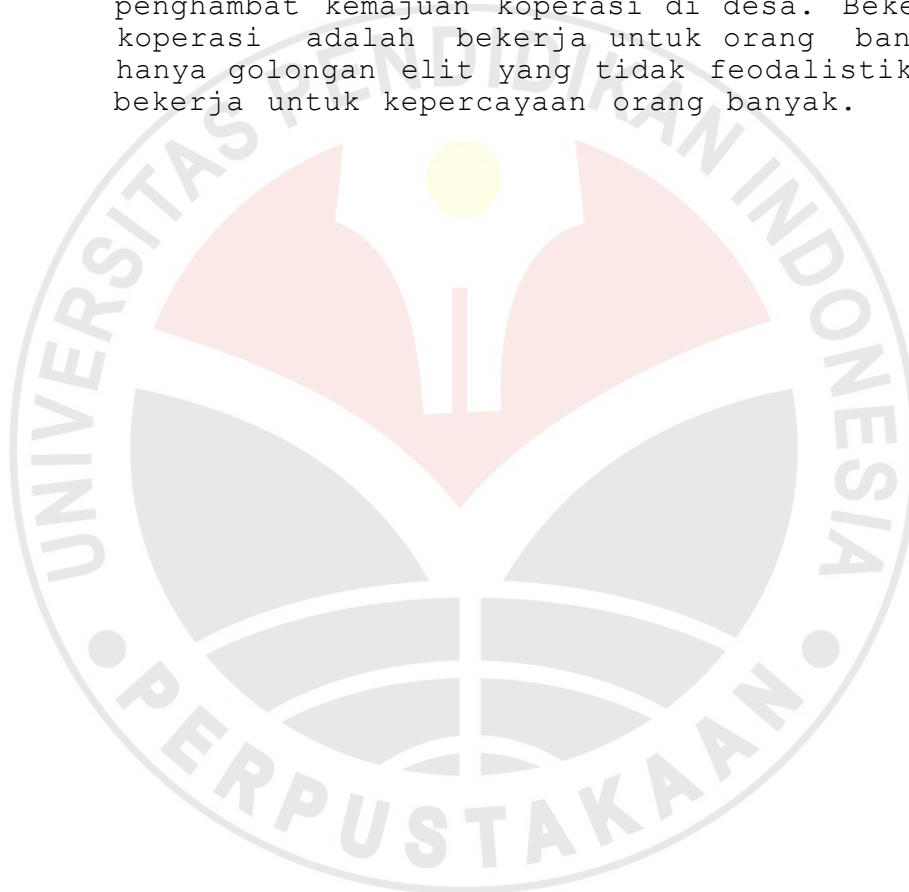
Jika gerombolan penyerang tidak cepat-cepat melarikan diri, dapat dipastikan akan tertangkap oleh H. Palessei.

Di masa sebelumnya, ia pernah menjadi "paiapi baro-bar.o." oleh "karaetta" (raja kita).

Dia juga dikenal sebagai orang yang jujur dalam melaksanakan kekuasaannya di desa.

1.3. Faktor lain yang menunjang kemajuan KUD Mattirobulu.

Tidak adanya lapisan keturunan bangsawan di desa BS. Karena itu tidak ada jiwa feodal di kalangan elitnya. Biasanya semangat dan jiwa feodal di kalangan elit itulah yang seringkali menjadi penghambat kemajuan koperasi di desa. Bekerja untuk koperasi adalah bekerja untuk orang banyak, dan hanya golongan elit yang tidak feodalistik yang mau bekerja untuk kepercayaan orang banyak.



2. Drs. Ambo Upe Bakar

Tanggal: 3 Juni 1989/23 Mei 1990

2.1. Persepsi mengenai pribadi dan kepemimpinan kepala desa BS.

Dia dikenal sebagai seorang pemberani dan berjasa bagi masyarakat desa. Pada waktu desa-desa sekitar kota dikuasai gerombolan pengacau, penduduk tidak berani turun ke sawah yang kebanyakan terletak di kawasan desa tersebut.

Pada waktu dia bersama pleton Hansip yang dipimpinnya dipersenjatai, ia berhasil menghalau gerombolan dari kawasan desa BS. sehingga petani dapat kembali menggarap sawahnya.

Banyak orang yang percaya bahwa dia kebal terhadap senjata dan selalu dapat terhindar dari sasaran peluru. Kepercayaan ini, terutama di kalangan orang-orang yang pernah bersama dia mengalami pertempuran, menyebabkan dia disegani dan dihormati.

Meskipun dia disegani dan dikagumi banyak orang, tetapi dia tidak sombong dan angkuh. Dia bisa bersikap hormat dan menghargai orang secara wajar.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, dia bersikap persuasif. Tidak pernah menunjukkan sikap atau kesan serba kuasa. Tidak pernah sulit berhubungan dengan dia.

Akan tetapi dia juga bisa keras, bahkan memukul, apabila terdapat warga desa yang tidak ikut dalam kegiatan gotong royong/kerja bakti tanpa alasan.

2.2. Peranan kepala desa dalam pengembangan BUUD/KUD di desa BS.

Sebenarnya pada awalnya masyarakat tidak berminat menjadi anggota koperasi. Bahkan sebagian orang tidak percaya bahwa koperasi akan dapat memberikan manfaat. Tetapi karena kepala desa, sebagai tokoh yang dihormati dan dipercaya, yang menjadi pendukung utama koperasi model baru (BUUD/KUD) itu, maka berangsur-angsur warga desa mau berpartisipasi.

Mula-mula para pamong desa serta kerabat dan keluarga dekatnya yang diajak membina dan mengembangkan BUUD/KUD.

Lambat laun setelah orang banyak merasakan layanan dari BUUD/KUD yang baik, misalnya dalam pengelolaan layanan jasa penggilingan gabah dan

dalam transaksi pembelian gabah petani, maka orang semakin banyak yang turut berpartisipasi.

Jasa penggilingan gabah bagi anggota adalah 1 kg/20 kg beras, sedangkan bagi bukan anggota adalah 1,5 kg/20 kg beras.

Keluarga-keluarga yang menjadi penyelenggara kegiatan BUUD/KUD itu selalu diperingatkan oleh Pak Kades, supaya melayani sebaik mungkin para pengguna jasa, baik itu anggota maupun bukan anggota. Sebab orang desa itu hanya dapat dipengaruhi dan diajak berpartisipasi dalam suatu kegiatan, kalau ia melihat kenyataan bahwa kegiatan itu bermanfaat langsung bagi dirinya. Kalau hanya bicara saja yang banyak, mereka tidak mudah diyakinkan.

Dan yang sangat penting selalu diperingatkan oleh Pak Kades, adalah menjaga kepercayaan orang banyak mengenai kesungguh-sungguhan dan kejujuran para penyelenggara kegiatan BUUD/KUD.

Menurut Pak Kades, dia selalu mengajak warganya berpartisipasi dalam kegiatan BUUD/KUD melalui berbagai kesempatan. sehingga kalau para penyelenggara kegiatan BUUD/KUD itu mengecewakan, maka nama bailtnya dapat tercemar (masiri). Keadaan seperti itu harus dicegah/dihindari.

Tanggal : 4 Juni 1989

2.3. Faktor-faktor lain yang mendukung kemajuan BUUD/KUD di desa BS.

Kepercayaan dan kepatuhan warga desa kepada Pak Kades diimbangi dengan kerja keras para penyelenggara kegiatan BUUD/KUD.

Pada musim panas, penggilingan gabah (RMU/Huller) milik BUUD/KUD bekerja sepanjang hari melayani pelanggan, sampai pukul 24.00 sehingga tidak ada permintaan jasa yang ditangguhkan.

Faktor lain ialah tidak adanya sifat-sifat kebangsawanan di kalangan kerabat keluarga Pak Kades, termasuk yang menjadi penyelenggara kegiatan BUUD/KUD. Sifat kebangsawanan di Sul.Sel. biasanya membuat seseorang enggan bersikap dan berbuat sebagai pelayan kepada orang kebanyakan/rakyat jelata. Justru mereka yang mengharapkan sikap dan perilaku pelayanan dari orang lain.

Faktor lain lagi, ialah kelincahan manajer mengelola kegiatan bisnis KUD. Tampaknya ia memiliki bakat sebagai warisan ayahnya yang juga pengusaha yang cukup berhasil. Selain ia lincah, ia juga mempunyai keuntungan/peluang tersendiri,

sebab Pak Kades adalah mertuanya, dan kakak kandungnya juga adalah salah seorang pejabat/petugas pada Kandepkop. Dengan demikian ia memiliki kemudahan dalam berbagai urusan.



3. Drs. Syahrir Ilyas

Tanggal: 17 Mei 1988

3.1. Pandangan mengenai eksistensi dan perkembangan BUUD/KUD di desa BS.

Yang pertama kali mempelopori pembentukan BUUD/KUD di desa BS adalah kepala desa H. Palessei. Yang pertama-tama diajak bekerja sama membina ialah para pamong yang dibawah pengaruh kepemimpinannya serta kerabat keluarganya yang dekat.

Kepala desa BS itu adalah orang yang disegani dan dipatuhi, terutama di kalangan para pamong dan kerabat keluarganya. Bahkan juga di kalangan warga desa umumnya. Dia dipatuhi karena jasa-jasanya di masa kekacauan, sikap dan perilakunya yang selalu menghargai orang lain, kejujuran dan ketegasannya dalam bertindak.

Agaknya kepatuhan dan kewibawaannya itu yang merupakan faktor pendorong dan motivasi, serta komitmen dari para penyelenggara kegiatan BUUD/KUD, untuk bekerja sepenuh hati.

Agaknya hal itu pula yang tidak terdapat pada BUUD/KUD di desa lain, sehingga tidak mengalami kemajuan sebagaimana halnya KUD Mattirobulu.

3.2. Faktor-faktor lain dalam pengembangan dan pembinaan BUUD/KUD di desa BS.

Faktor manajer yang cakap dan trampil banyak menentukan. Meskipun masih tergolong muda, dan berpendidikan formalnya tidak/kurang memadai, tetapi H. Abdullah Karim (manajer KUD Mattirobulu), diakui cakap dalam kegiatan bisnis. Ayahnya adalah juga seorang pengusaha lokal yang cukup berhasil.

Tentu saja faktor fasilitas dan perlindungan pemerintah terhadap KUD, merupakan faktor penting pula. Tetapi ini tidak cukup jika pengelola dan penyelenggara kegiatan koperasi tidak mempunyai sikap dedikatif dan komitmen terhadap misi KUD. Contohnya, banyak KUD lain yang juga menerima fasilitas dan proteksi yang sama tetapi tidak maju-maju.

Jadi faktor manusia yang menjadi penyelenggara dan pengelola kegiatan KUD itu merupakan faktor penting yang pertama di samping faktor lainnya.

- 3.3. Para penyelenggara BUUD/KUD di desa BS, adalah kalangan elit, bagaimana kaitannya dengan semangat dedikasi dan komitmen terhadap program KUD.

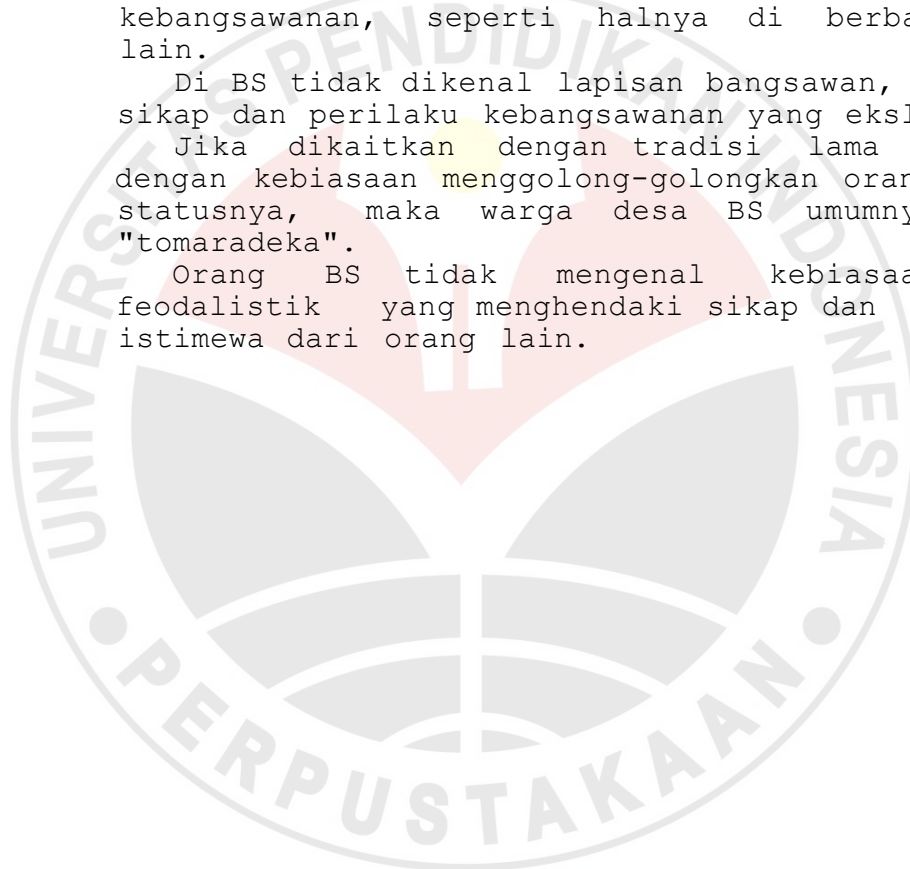
Mereka adalah kerabat, keluarga dan orang yang dekat dengan Pak Kades. Sewajarnya mereka mempunyai komitmen terhadap misi yang diemban Pak Kades. Komitmen tersebut menjadi faktor motivasi yang memperkuat semangat dedikasi mereka agar misi tersebut berhasil.

Bahwa mereka dari kalangan elit lokal, tidak berarti mereka memiliki latar belakang kebangsawanan, seperti halnya di berbagai desa lain.

Di BS tidak dikenal lapisan bangsawan, tidak ada sikap dan perilaku kebangsawanan yang eksklusif.

Jika dikaitkan dengan tradisi lama berkenaan dengan kebiasaan menggolong-golongkan orang menurut statusnya, maka warga desa BS umumnya adalah "tomaradeka".

Orang BS tidak mengenal kebiasaan/tradisi feodalistik yang menghendaki sikap dan perlakuan istimewa dari orang lain.



4. Drs. Andi Ansar

Tanggal : 18 Mei 1989

4.1. Eksistensi dan perkembangan BUUD/KUD di desa Bialo.

Desa tetangga paling dekat dengan desa BS di antaranya ialah desa Bialo. Jika dari desa BS hendak ke ibukota kabupaten Bulukumba melalui jalan utama, akan melalui desa Bialo.

BUUD/KUD di desa Bialo tidak berkembang baik, sehingga akhirnya dilebur ke dalam KUD Mattirobulu yang merupakan perkembangan dari BUUD/KUD desa BS.

Seperti halnya desa BS, desa Bialo juga memiliki areal persawahan yang luas, sehingga komoditi beras juga merupakan andalan utama, di samping hasil bumi yang lain.

Dalam kondisi yang demikian seharusnya BUUD/KUD desa ini dapat juga berkembang seperti halnya di BS

Faktor lingkungan fisik dapat dikatakan sama di antara ke dua desa, prosedur pembentukan BUUD/KUD juga sama-sama dalam rangka program nasional. Komoditi andalan juga dapat dikatakan sama. Namun pertumbuhan dan perkembangan KUD-nya berbeda.

Mungkin faktor manusia penyelenggaranya yang berbeda.

Tanggal : 19 Mei 1989

4.2. Faktor-faktor perkembangan BUUD/KUD desa Bialo.

Penyelenggara/pengelola kegiatan BUUD/KUD di desa Bialo terutama dari kalangan elit desa. Sewajarnya hal yang demikian, karena mereka itulah yang lebih mempunyai peluang. Kalau penduduk petani-penggarap pada umumnya, lebih banyak waktu dan tenaganya digunakan untuk pekerjaan fisik.

Semangat kebersamaan dan kerja sama di antara kelompok penyelenggara kegiatan BUUD/KUD di desa Bialo, tampaknya tidak begitu baik.

Selain itu keterlibatan yang intensif dari kepemimpinan lokal desa, juga kurang memadai. Mungkin karena BUUD/KUD tidak dipimpin langsung oleh kepala desa, karena demikian ketentuannya, sehingga program tersebut dipandang sebagai program luar desa, yang dilaksanakan di dalam desa.

Sebagaimana diketahui, banyak program dari atas-desa yang dilaksanakan di desa. Pada program yang demikian, koordinasi, pengendalian dan pengawasannya semuanya dilakukan dari atas-desa.

Mekanisme penanganan program yang demikian, memang mudah menyebabkan ketidakterlibatan langsung pimpinan lokal. Dalam keadaan yang demikian keefektifan pelaksanaan program tentu tidak optimal.

4.3. Persepsi mengenai perkembangan KUD Hattirobulu.

Perbedaan utama perkembangan BUUD/KUD di desa Bialo dengan di desa BS ialah bahwa di BS, Kades BS menjadikan program BUUD/KUD tersebut sebagai program desanya. Bahkan seolah-olah itu adalah program pribadinya yang menyangkut gengsi dirinya.

Dengan cara itu ia memacu semangat para penyelenggara kegiatan BUUD/KUD dengan menggunakan wibawa kharismaniknya.

Ada semacam kebanggaan tersendiri baginya membayangkan kemajuan KUD di desanya. Karena itu dalam kapasitasnya sebagai kepala desa senantiasa berupaya mendukung dan mendorong setiap usaha yang dipandang dapat memajukan KUD di desanya.

Mungkin hal ini yang membedakannya dengan pemegang kepemimpinan lokal di desa lain.

4.4. Pengaruh konsep nilai budaya dan agama.

Penduduk desa BS, dan juga desa tetangga lainnya termasuk Bialo merupakan penganut Islam yang relatif taat. Ketaatan itu sifatnya tradisional dan sudah turun temurun.

Jika konsep nilai agama dipandang ada pengaruhnya terhadap upaya pengembangan koperasi di BS, maka hal yang sama tentu berlaku juga bagi desa lainnya.

Demikian juga halnya dengan konsep nilai budaya lokal. Memang konsep nilai budaya dan agama dapat menjadi sumber motivasi bagi kegiatan semacam koperasi. Namun hal itu tergantung juga kepada mereka yang memegang peranan kepemimpinan, baik formal maupun informal.

Konon di BS, H. Palessei mengaitkan pengembangan BUUD/KUD dengan konsep nilai budaya "airi". Kegagalan membesarkan KUD dipersepsi sebagai keadaan yang menjatuhkan martabat diri, kerabat dan keluarganya. Sebaliknya keberhasilan membesarkan KUD dipersepsi sebagai keadaan yang menaikkan martabat diri, kerabat dan keluarganya.

Hal yang demikian tidaklah mengherankan, oleh karena citra koperasi umumnya negatif, sementara dialah sebagai penganjur pertama program KUD di

desanya.

Sementara itu menantunya sendiri yang memegang peranan manajer dan beberapa pengurus, anggota BP dan karyawan KUD adalah kerabat dan keluarga dekatnya.

Jika dihubungkan dengan riwayat hidup Kades BS yang dikenal sebagai orang yang selalu berpedoman kepada nilai-nilai kejujuran, senantiasa memelihara nama baiknya, maka hal tersebut di atas dapat dimengerti.

Bagi orang yang demikian, berbuat sesuatu yang dapat dipandang menyimpang dari nilai kebenaran, adalah sesuatu yang mendatangkan malu (masiri).

4.5. Peranan manajer dan pengurus.

Tanggal : 20 Mei 1989

Pengurus yang cakap dan terampil dalam hal mengelola organisasi adalah penting. Tetapi keserasian kerja sama di antara mereka, juga sangat penting.

Dalam hal inilah barangkali peranan kewibawaan kharismatik Kades dan kearifannya mengaitkan konsep nilai budaya lokal dalam pembinaan KUD.

Namun demikian manajer yang cakap dan trampil dalam kegiatan bisnis adalah mutlak bagi kemajuan KUD. Tampaknya faktor ini juga terdapat pada KUD Mattirobulu.

Kecakapan dan ketrampilan manajerial, serta naluri bisnis dari manajer KUD Mattirobulu, sepanjang informasi yang diketahui memang menonjol. Dia tidak pernah sulit mendapatkan dana/kredit bank, untuk keperluan pembiayaan bisnis KUD-nya.

Sementara itu pengurus yang mampu mengelola kegiatan pelayanan kepada anggota merupakan faktor penting pula. Selama ini tampaknya faktor-faktor tersebut ada pada KUD Mattirobulu.

5. Hakkulau

Tanggal : 25 Mei 1989

5.1. Perihal keanggotaan KUD Mattirobulu,

Keanggotaan ini dapat dikatakan merata meliputi seluruh KK di BS, baik dalam status sebagai anggota penuh maupun sebagai anggota yang dilayani.

Coba saja diamati rumah-rumah kediaman penduduk, mungkin tidak akan ditemukan, atau sulit sekali menemukan rumah yang tidak terdapat gambar/lambang koperasi pada tembok pagar atau pada dinding depannya. Gambar atau lambang tersebut menunjukkan bahwa KK penghuni rumah tersebut adalah anggota KUD.

Saya sendiri sudah menjadi anggota sejak lima tahun lalu.

5.2. Prosedur menjadi anggota KUD.

Ada bermacam-macam cara seseorang menjadi anggota KUD di BS. Sebagian diajak pertama kali oleh tetangga, atau kerabat/keluarganya, mungkin tanpa mengetahui secara luas dan mendalam mengenai hakekat koperasi/KUD itu sendiri, atau tahu sedikit-sedikit.

Sebagian tertarik setelah mendengarkan penjelasan melalui penyuluhan perkoperasian, diberbagai kesempatan, seperti pada pertemuan kelompok tani, pada ceramah di mesjid. Sebagian juga tertarik menjadi anggota, mungkin karena melihat "insentif" gula pasir yang dibagikan kepada anggota KUD setiap menjelang Iedul Fitri, Iedul Adha dan pada RAT. Bermacam-macam lagi cara seseorang menjadi anggota.

Saya sendiri tertarik menjadi anggota, karena beberapa pertimbangan. Pertama, saya adalah kerabat dekat kepala desa, di mana dapat dikatakan semua kerabat-keluarganya merupakan pendukung dan anggota KUD, sebab beliaulah penganjur pertama program KUD tersebut.

Kedua, dari pendapatan yang saya peroleh meskipun tidak banyak, namun sudah mampu membayar SP dan SW. Simpanan Sukarela, kadang-kadang saya bayarkan dari SHU yang saya terima.

Ketiga, dengan menjadi anggota KUD tersebut, saya anggap sebagai suatu cara penghematan dari kemungkinan pengeluaran yang tidak perlu.

Keempat, dengan menjadi anggota KUD, saya dapat

memperoleh uang tunai untuk pembayaran SPP/biaya kuliah setiap kali saya perlukan, melalui pinjaman dengan pembayaran angsuran ringan.

Mengenai insentif (gula), memang ada juga daya penariknya tersendiri.

Tanggal : 27 Mei 1989

5.3. Masalah kepengurusan, prosedur pemilihan, persepsi mengenai pengurus dan minat menjadi pengurus.

Ketua KUD Mattirobulu yang pertama ialah H. Abdul Hafid yang saat ini menjadi wakil ketua. Dia adalah seorang pamong desa dan masih kerabat dari kepala desa.

Ketua yang sekarang adalah Ibnu Yatsin BA, seorang kepala SD. Ia pernah mengikuti kuliah pada STKIP Muhammadiyah Bulukumba sampai tingkat Sarjana Muda. Saat ini mengikuti lagi kuliah pada salah satu PTS untuk tingkat Sarjana Lengkap. Selain itu juga pernah setahun menjabat ketua PUSKUD Hasanuddin di Ujungpandang, kemudian setahun sesudahnya sampai sekarang menjadi BP pada badan yang sama.

Pengurus dipilih melalui RAT oleh perwakilan anggota, yaitu para pimpinan TPK dan kelompok tadi.

Pengurus yang sekarang telah terpilih untuk kedua kalinya, hanya satu perubahan dalam pemilihan terakhir, yaitu anggota BP, yang semula Kaharuddin digantikan oleh Drs. M.Katsir.

Pengurus yang sekarang ini sudah baik, memenuhi syarat " mengenai kemampuannya. Syarat mental kepribadiannya juga tidak ada masalah. Belum pernah terdengar mereka melakukan penyimpangan dalam mengelola KUD.

Mengenai minat menjadi pengurus, terus terang belum ada pada diri saya saat ini. Entahlah, di masa-masa yang akan datang.

Menjadi pengurus mungkin memang ada senangnya, misalnya menjadi orang terpandang dan ada honorarium, ada kesempatan sekali-sekali berkunjung ke daerah lain misalnya ke pulau Jawa.

Tetapi rasa-rasanya saya belum mampu melaksanakan fungsi kepengurusan pada saat ini.

5.4. Masalah pelayanan KUD terhadap anggota.

Menurut pengalaman saya sebagai anggota selama lima tahun, pelayanan KUD baik-baik saja. Pencatatan transaksi anggota dengan KUD cukup

baik/teratur. Permohonan pinjaman setiap kali saya perlukan selalu mendapat pelayanan yang cepat. Pencatatan pembayaran angsuran juga tidak pernah menimbulkan persoalan.

Saya juga tidak pernah mendengar ada anggota lain menemui kesulitan dalam berurusan dengan KUD.

Justru yang biasanya mengalami kesulitan, ialah pengurus berkaitan dengan penagihan angsuran kredit dari para petani. Hal ini biasanya terungkap pada saat RAT.

Menurut ketentuan petani harus mengembalikan kreditnya pada saat panen. Kenyataannya, jika tidak ditagih sebagian anggota tidak segera melunasi.

5.5. Masalah SHU.

Biasanya SHU dibagikan kepada masing-masing anggota sesuai dengan jasanya. Saya biasanya menerima SHU dalam jumlah sekitar/antara Rp 20.000,00 dan Rp 30.000,00.

Dua tahun terakhir ini SHU tidak dibagikan kepada anggota. Ketentuan itu sebelumnya telah diberitahukan kepada anggota. Alasannya ialah untuk keperluan pengembangan modal mengingat semakin meningkatnya kegiatan bisnis dari KUD.

Pemberitahuan itu disampaikan pada RAT. Diberitahukan kepada anggota, bahwa uang dari SHU tersebut dicatat dalam simpanan sukarela (SS) masing-masing anggota.

Bagi saya hal itu tidak menjadi masalah benar. Saya tidak tahu persis bagaimana tanggapan anggota lainnya. Namun demikian saya juga tidak pernah mendengar ada anggota yang merasa keberatan mengenai hal itu.

Tanggal : 31 Mei 1989

5.6. Persepsi mengenai perkembangan KUD.

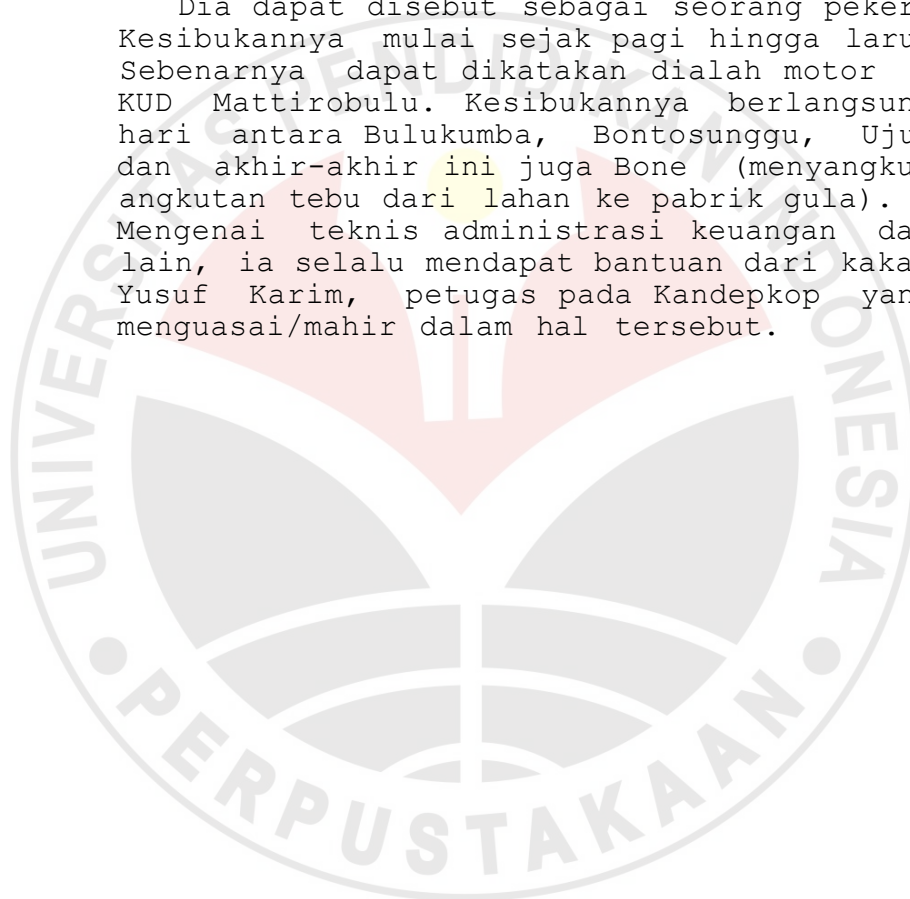
Setahu saya KUD Mattiobulu selalu mencatat prestasi sebagai KUD terbaik mulai di tingkat lokal, regional, dan selanjutnya pada tingkat nasional.

Kalau dari segi kepemimpinan, ada dua orang yang besar peranan dan jasanya. Pertama, H. Palessei, yang pertama kali menjadi pelopor pembentukan dan pembinaan BUUD/KUD di desa BS. Kewibawaannya yang bersifat kharismatik menyebabkan orang-orang yang mengelola kegiatan BUUD/KUD berusaha keras memajukan BUUD/KUD tersebut, dan tidak berani

melakukan penyimpangan-penyimpangan yang bisa merugikan. Beliau sering mengingatkan para pengelola tersebut agar berusaha maksimal untuk kemajuan usaha koperasi dan menghindari perbuatan yang bisa merugikan supaya tidak sampai menyebabkan beliau "masiri".

Kedua, H. Abdullah Karim, manajer utama KUD, yang sudah aktif sejak dari permulaan dibentuknya BUUD/KUD hingga saat ini sebagai pengelola kegiatan.

Dia dapat disebut sebagai seorang pekerja keras. Kesibukannya mulai sejak pagi hingga larut malam. Sebenarnya dapat dikatakan dialah motor penggerak KUD Mattirobulu. Kesibukannya berlangsung setiap hari antara Bulukumba, Bontosunggu, Ujungpandang dan akhir-akhir ini juga Bone (menyangkut proyek angkutan tebu dari lahan ke pabrik gula). Mengenai teknis administrasi keuangan dan lain-lain, ia selalu mendapat bantuan dari kakaknya, M. Yusuf Karim, petugas pada Kandepkop yang banyak menguasai/mahir dalam hal tersebut.



6. H. Abdul Hafid

Tanggal: 1 Juni 1989

6.1 Riwayat pembentukan BUUD/KUD - KUD Mattirobulu

Prakarsa pembentukan BUUD/KUD pertama kali adalah dari kepala desa H. Palessei setelah mendapatkan pengarahannya dari Pak Bupati dan Pak Kakandepkop. Mula-mula yang diajak ialah para pamong di lingkungan desa BS, kerabat dan keluarga dekat, sampai kurang lebih 25 orang.

Caranya ialah dengan mendatangi/mengunjungi secara silaturahmi mengajak bersama-sama membentuk BIID/KUD desa BS. Dalam kunjungan silaturahmi itu beliau mengemukakan tujuan BUUD/KUD tersebut, serta kegiatan yang akan dilaksanakan.

Waktu itu kalau tidak salah sekitar bulan April 1975. Sekitar rainggu ketiga bulan April '73 oleh beliau diadakanlah pertemuan dengan semua orang yang telah diajak membentuk BIID/KUUD itu, di mana kemudian disepakati terbentuknya BUUD/KUD desa BS.

Pada bulan Mei 1973 terbitlah SK Gubernur yang mengesahkan terbentuknya BUUD/KUD tersebut.

Mula-mula pimpinan dipegang sendiri oleh kepala desa, tetapi kemudian diketahui adanya ketentuan yang tidak memperkenankan hal itu. Beliau kemudian meminta kepada saya untuk bersedia menjadi ketua, yang disepakati pula oleh para pendiri lainnya.

Simpanan pokok (SP) mula-mula sebesar Rp 1000,00 sedangkan simpanan wajib (SIO sebesar Rp 50,00 perbulan.

Sesuai dengan perkembangan keadaan, SP dan SW tersebut kemudian dinaikkan menjadi Rp 2500,00 dan Rp 100,00. Selanjutnya ditingkatkan lagi menjadi Rp 5000,00 serta Rp 500,00.

Kegiatan pertama BUUD/KUD ialah mengelola unit penggilibgab gabah (RMU/Huller) dan unit pengadaan pangan. RMU/Huller merupakan bantuan dari pemerintah, sedangkan bangunannya adalah hasil swadaya.

Modal pertama untuk pengadaan/pembelian gabah/beras berasal dari bantuan/pinjaman pemerintah. Setelah berjalan selama lebih setahun, BUUD/KUD Desa Bontosunggu diubah menjadi KUD Mattirobulu.

Tanggal: 2 Juni 1989

6.2 Hambatan-hambatan yang dialami

Pada masa-masa awal pembentukan BUUD/KUD

sebenarnya eitra koperasi sudah sangat jelek di mata masyarakat. Banyak istilah-istilah yang berkembang dalam masyarakat yang sifatnya sinis atau melecehkan kemungkinan berkembangnya KUD. Sebagai contoh, ialah misalnya ungkapan "asennamupa koperasi . . . kuperra'si". Selain itu juga ada ungkapan "bara ikopa . . .". Ungkapan yang sifatnya mencemooh itu timbul dari rasa tidak percaya masyarakat terhadap kemungkinan berkembangnya BUUD/Kud yang baru dibentuk itu.

Adanya sikap negatif masyarakat menyambut didirikannya BUUD/KUD tersebut, di satu sisi terasa mengecilkan hati. Atau bahkan terasa akan mematahkan semangat untuk melangkah lebih lanjut.

Di sisi yang lain, sikap sinis dan melecehkan itu sebagai tantangan yang harus dijawab, maka pada hakekatnya H. Palessei mengatakan bahwa kita tidak boleh gagal membina BUUD/KUD itu. Kegagalan akan membuat kita "masiri" sebab ungkapan-ungkapan melecehkan tersebut akan menjadi kenyataan yang tidak bisa ditolak.

Dalam kaitan itu, H> Palessei selalu mengingatkan dalam setiap pertemuan kelompok perintis agar bekerja dengan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani rakyat yang menggunakan jasa KUD atau yang melakukan suatu transaksi dengan KUD khususnya, dan dalam mengelola organisasi dan administrasi KUD. Ungkapan yang seringkali diucapkannya ialah "padecengi jockkana usaha, ajak muappakasiri". "Ajak nubellei rakyat, nasaba narekko purai nasedding alena ribelle, mau agamupoadangngi detona natepperiko".

Tampaknya memang rekan-rekan mencamkan petuah-petuan Pak H. Palessei tersebut. Pada saat itu kita memang merasa terpacu bekerja keras dan bekerja sebaik mungkin melayani rakyat dan mengelola kegiatan BUUD/KUD.

Tanggal: 5 Juni 1090

- 6.3 Masalah kepengurusan; prosedur pemilihan, persyaratan, semangat kebersamaan dan kerja sama, serta solidaritas.

Pengurus dipilih dan ditetapkan secara musyawarah dalam suatu rapat yang dipimpin langsung oleh Kades.

Mengenai syarat pengeetahuan perkoperasian, baik yang menyangkut sedi organisasi, maupun segi usaha/bisnis, pada awalnya dapat dikatakan kita

semua belum mempunyainya. Mungkin ada pengetahuan dalam hal itu tetapi masing-masing serba sedikit. Akan tetapi kita sepakat bahwa kecakapan dan keterampilan itu dapat dipelajari. Yang lebih penting ialah kita sepakat mempunyai tekad dahulu untuk berusaha keras memajukan BUUD/KUD yang telah dibentuk.

Keputusan membentuk BUUD/KUD telah dilakukan dan masyarakat telah mendengarnya. Tidak ada jalan lagi untuk mundur. Kalau di kalangan pelaut, sekali telah ditetapkan untuk membentangkan layar, pantang surut sebelum mencapai pulau tujuan. Tenggelam adalah pilihan yang lebih terhormat bagi mereka dari pada surut sebelum mencapai pulau tujuan.

Karena keputusan itu adalah keputusan bersama juga, maka ada semacam rasa kebersamaan dan solidaritas dalam usaha mengembangkan BUUD/KUD tersebut. Dan semangat kebersamaan serta solidaritas itu menyebabkan adanya saling pengertian dan kerja sama.

Kami tidak pernah merasa ada kepentingan yang berbeda yang tidak dapat dipertemukan. Perasaan kebersamaan dan solidaritas itu memang mempunyai kaitan dengan konsep nilai budaya "siri" yang seringkali ditonjolkan oleh H. Palessei.

Tidak dapat disangkal bahwa kami semua adalah orang-orang yang terpandang dalam masyarakat. Keputusan mendirikan BUUD/KUD juga telah diketahui masyarakat. Bahkan sudah terdengar suara-suara yang melecehkan dan sinis. Karena itu kami semua sama-sama akan "masiri" kalau sampai gagal. Kami tidak ingin "mappakasiri-siri".

6.4 Rintangan-rintangan yang dialami dalam upaya pengembangan BUUD/KUD dan usaha mengatasi rintangan itu.

Jika ada rintangan yang dirasakan sebenarnya hanyalah sikap skeptis dari masyarakat dan sikap melecehkan dari sebagian lainnya.

Untuk mengatasi rintangan itu, ialah dengan berusaha membuktikan bahwa BUUD/KUD ada manfaatnya bagi masyarakat banyak dengan memberikan pelayanan sebaik mungkin dan berusaha membuktikan bahwa BUUD/KUD itu bisa berkembang maju/

Kembali lagi seperti telah dikemukakan ialah pentingnya solidaritas dan kebersamaan, serta kerja sama di antara para penyelenggara kegiatan BUUD/KUD.

Tanggal: 6 Juni 1989

6.4 Masalah pelayanan Oleh BUUD/KUD

Seperti telah dikemukakan, masalah pelayanan yang baik kepada pelanggan di pandang sangat penting. Tujuan pertama yang hendak dicapai dengan menekankan pelayanan yang baik, ialah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa BUUD/KUD itu bermanfaat bagi mereka.

Sebagaimana diketahui pada awalnya jumlah anggota, termasuk penyelenggara kegiatan BUUD/KUD hanya 25 orang. Karena itu justru yang banyak dilayani adalah masyarakat yang bukan anggota. Namun dalam kegiatan pelayanan itu selalu diupayakan menunjukkan bahwa bagi anggota ada keuntungan tersendiri di dalam pemberian pelayanan itu.

Dalam pelayanan penggilingan gabah/beras dipungut jasa 1 kg untuk setiap 20 kg gabah milik anggota, sedangkan bagi yang bukan anggota, 1 1/2 kg untuk setiap 20 kg gabah.

Selain itu, anggota mendapat insentif gula pasir 1 kg pada saat menjelang Idul Fitri yang harus diambil sendiri di kantor KUD. Maksudnya, ia;ah agar masyarakat umum mengetahui hal itu.

Ketika dirasakan telah ada kemajuan/kemampuan BUUD/KUD, insentif gula pasir itu ditingkatkan, yakni diberikan juga pada setiap menjelang Idul Adha dan , pada saat ini, bahkan diberikan kepada semua anggota yang menghadiri RAT.

Dalam -keadaan seperti sekarang ini di mana kemajuan KUD Mattirobulu cukup membanggakan dan kemampuan pemberian pelayanan juga makin luan, prinsip pemberian pelayanan yang sebaik mungkin tetap menjadi pegangan. Sebagai contoh, misalnya, KUD dapat memberikan bantuan biaya hidup bagi anggota tertentu yang memerlukan sebelum tanamannya belum dipanen.

Pembelian gabah petani dapat dilakukan sedekat mungkin pada lokasi petani dengan memperbanyak (secara tersebar) Pool pembelian gabah di samping TPK (tempat pelayanan koperasi).

Kebanyakan pelaksana Pool pembelian gabah tersebut memperoleh pinjaman tanpa bunga. Pengembalian pinjaman dilakukan pada saat gabahnya disetorkan ke KUD, dalam mana pelaksana Pool pembelian gabah memperoleh premi Rp 2,- perkg gabah yang disetorkan.

Selain itu unit Peternakan milik KUD memberikan

bantuan sepasang lembu kepada petani yang sangat memerlukan tenaga hewan untuk menggarap sawah. Lembu tersebut mereka gunakan secara cuma-cuma, dengan ketentuan mereka harus memeliharanya dengan baik. Jika lembu yang dipeliharanya telah melahirkan 3 anak, maka petani yang bersangkutan berhak memiliki satu dari tiga anak sapi tersebut.

Unit simpan pinjam juga memberikan kemudahan bagi warga yang memerlukan pinjaman untuk keperluan-keperluan yang mendesak

Hasil angkutan "pete-pete" desa-kota telah memudahkan mobilitas warga pada umumnya dan memudahkan pemenuhan berbagai kebutuhan hidup yang hanya dapat diperoleh di kota. Sementara itu angkutan antar kota (Bulukumba-Ujungpandang) memberikan bonus pemakai jasa yang memiliki sejumlah 10 tiket, yakni 1 tiket gratis.

Tanggal : 10 Juni 1989

6.5. Masalah perluasan keanggotaan.

Upaya perluasan keanggotaan dilakukan dengan berbagai macam cara. Pertama, dengan menggunakan komunikasi lisan antar personal. Dalam hal ini masing-masing anggota kelompok perintis berusaha menarik orang-orang yang dekat hubungannya, seperti tetangga, kerabat dan keluarganya. Kedua, menawarkan keanggotaan kepada pelanggan pada saat melakukan transaksi dengan KUD, atau pada saat menerima layanan dari KUD. Dalam hal ini ajakan dilakukan secara persuasif. Ketiga, mempromosikan KUD kepada khalayak melalui percakapan-percakapan waktu senggang secara informal di serambi mesjid, kala khalayak menunggu waktu shalat tiba. Mengadakan penyuluhan perkoperasian kepada khalayak secara formal, di mesjid-mesjid dengan mengundang petugas penyuluhan dari Kandepkop.

6.6. Tokoh-tokoh yang dipandang berjasa memajukan KUD.

Pada tahap perintisan, sewajarnya H. Palessei dipandang berjasa besar. Kewibawaan dan karismanyalah yang menyebabkan kami mau mengikuti ajakannya membentuk dan mengembangkan KUD, pada saat mana citra koperasi adalah negatif. Motivasi yang diberikannya kepada penyelenggara kegiatan BUUD/KUD, dengan ungkapan yang sederhana; "padeoengi iokksnn knoerasie. ala muappakasiri", juga menyebabkan kami terpacu untuk meraih

keberhasilan.

Peringatan-peringatan yang selalu diberikannya untuk tidak mengecewakan masyarakat. ketika berhubungan dengan BUUD/KUD secara tidak langsung telah mempertinggi sikap kehati-hatian para penyelenggara kegiatan.

Tokoh lain yang dipandang berjasa, terutama pada tahap pengembangan, ialah H. Abdullah Karim, manajer KUD. Pada tahun pertama terbentuknya BUUD/KUD, jabatan yang diberikan kepadanya. ialah bendahara, sedangkan sebagai manajer adalah H. Ibnu Hajar.

Pada tahun kedua terjadi pertukaran posisi/fungsi, yakni H. Ibnu Hajar menjadi bendahara, sedangkan sebagai manajer adalah H. Ibnu Hajar.

Pada tahun kedua terjadi pertukaran posisi/fungsi, yakni H. Ibnu Hajar menjadi bendahara, sedangkan fungsi manajer dijabat oleh H. Abdullah Karim.

Nampaknya H. Abdullah Karim sangat sesuai dengan jabatannya sebagai manajer. Berangsur-angsur KUD berkembang maju. Kegiatan bisnis KUD Kattirobulu semakin maju.

Tampaknya ia memiliki bakat usahawan. yang mungkin diwarisi dari ayahnya, seorang pengusaha lokal yang cukup berhasil.

Di antara kelebihan yang dimilikinya, ialah misalnya kecepatannya mengambil keputusan dan keberaniannya menanggung resiko.

Ia tidak pernah ragu memutuskan mengambil kredit Bank untuk keperluan perluasan usaha, baik pada waktu skala usaha KUD masih kecil, maupun pada saat telah berkembang.

Alhamdulillah, selama ini setiap kali ia mengalami kesulitan berurusan dengan Bank setiap kali ia memerlukan dana tambahan usaha.

Sesungguhnya dalam masa-masa pengembangan KUD ini, faktor kecakapan dan ketrampilan manajerlah yang lebih menentukan.

Peranan H. Abdullah Karim sebagai manajer, sesungguhnya harus diakui sebagai faktor sangat menentukan perkembangan dan kemajuan KUD.

Dia turut dalam proses pembentukan BUUD/KUD (anggota kelompok perintis), selanjutnya dia pula yang memimpin pengelolaan usaha/bisnis hingga KUD mencapai keadaan seperti sekarang ini.

Sedangkan kami dari pengurus, sifatnya hanya mengikuti saja sambil mengawasi.

Tanggal : 11 Juni 1989/21 Oktober 1989

6.7. Persepsi mengenai sistem kemasyarakatan di desa BS.

Stratifikasi sosial di BS lebih sederhana dibandingkan di desa lain. Seperti misalnya di Gattareng dan di Rindang atau di Tanete, Tiro dan lain-lain, masih terdapat golongan bangsawan, yakni kerabat/keluarga raja yang pernah berkuasa di desa-desa tersebut.

Biasanya orang-orang bangsawan itu cenderung menghendaki diperlakukan istimewa, tidak rela bila diperlakukan sama dengan orang kebanyakan.

Orang yang merasa diri bangsawan itu cenderung menghendaki diperlakukan istimewa, tidak rela bila diperlakukan sama dengan orang kebanyakan.

Orang yang merasa diri bangsawan itu, lebih cenderung menghendaki pelayanan dari orang lain ketimbang ia yang melayani.

Di BS kecenderungan semacam ini dapat dikatakan tidak ada. Tidak ada "karaeng". jadi tidak ada pula orang yang merasa diri keturunan bangsawan.

Barangkali dapat dikatakan, bahwa kami orang BS adalah "tomaradeka". Bagi kami penghargaan atau penghormatan bukan diperoleh karena keturunan, melainkan dari sifat-sifat kepribadian yang mencerminkan kebaikan dan kebajikan.

Karena tidak ada "karaeng", maka tidak ada pula "ata". Jadi bentuk feodalisme seperti di daerah Bugis-Makassar lainnya tidak tampak adanya di BS.

Kalau ada yang dikatakan golongan atas dan golongan bawah, itu mungkin hanya karena perbedaan status sosial /ekonomi saja. Itupun juga tidak terlalu menonjol karena dapat dikatakan tidak ada orang yang terlalu kaya dan terlalu miskin.

6.8 Masalah tradisi, nilai budaya dan nilai agama

Kalau masalah tradisi mungkin tidak berbeda jauh dengan keadaan di daerah tanah Bugis (tana ugi) lainnya. Tradisi gotong royong juga masih ada.

Dalam hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan, kematian, perbaikan pekarangan dan rumah, serta beberapa pekerjaan di sawah masih ada semacam kerja sama atau gotong royong.

Tetapi pekerja upahan memang juga sudah dikenal, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang berat-berat atau yang memerlukan keterampilan khusus.

Adanya pekerja upahan dari kalangan penduduk pendatang. Mengenai hubungan kekerabatan dan kekeluargaan, sama seperti di desa lain masih ada keakraban. Ini dimungkinkan karena masih adanya kebiasaan saling mengunjungi atau tradisi "**silaturrahmi**", terutama pada hari-hari sesudah lebaran Idul Fitri. Juga pada saat upacara perkawinan, kematian dan sebagainya.

Mengenai nilai budaya, barangkali tidak berbeda dengan apa yang berlaku di daerah bugis lainnya. Martabat atau harga diri (siri) selalu dipelihara oleh orang Bugis. Orang yang tahu adat tentu selalu berusaha memelihara hubungan baik dengan orang lain supaya terpelihara "siri"-nya dan "siri" orang lain.

Dalam pengertian "siri" itu sebenarnya terkandung pengertian bahwa orang harus saling menghargai. Kalau hal itu dilakukan oleh semua orang, maka dengan sendirinya masyarakat itu aman dan tenteram.

Keadaan demikian bisa terjadi karena masing-masing orang menghindari keadaan yang memungkinkan orang lain terhina "»asiri".

Kehidupan keagamaan juga masih cukup baik di BS. Penduduk pada umumnya masih taat menjalankan syariat, seperti salat lima waktu, puasa, dan naik haji bagi yang mampu. Di BS ini cukup menonjol banyaknya orang yang telah menunaikan ibadah haji.

Barangkali karena orang masih berpegang kuat pada nilai budaya dan agama, maka selama bertahun-tahun masyarakat senantiasa hidup tenteram. Tidak ada pencurian, penganiayaan, perkelahian, dan perbuatan kriminal lainnya. Juga tidak ada warga desa yang terlibat partai terlarang PKI.

6.9 Pendapat mengenai partisipasi dan manfaat partisipasi rakyat dalam KUD

Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa seluruh warga desa BS telah berpartisipasi dalam KUD. Bahkan kalau penjualan gabah oleh petani kepada LID sudah dipandang sebagai bentuk partisipasi, maka warga dari desa-desa lain pun juga sudah berpartisipasi dalam KID Mattirotulu.

Pembelian gabah oleh KID ini sudah sejak beberapa tahun menjangkau desa-desa lain, bahkan kecamatan lain di luar wilayah kerjanya.

Pembelian gabah dan beras petani di BS sudah semenjak beberapa tahun dimonopoki KID. Para pedagang yang semula membeli beras/gabah petani dan

selanjutnya memasarkannya sendiri, umumnya. kini direkrut menjadi TPK atau Pook pembelian gabah yang secara struktural merupakan bagian dari KUD.

Mereka masih tetap membeli beras/gabah petani kemudian menjualnya lagi ke KUD dengan premi Rp 2,- perkg. Bahkan jika mereka memerlukan tambahan modal untuk kegiatan itu, mereka dapat diberi pinjaman oleh KUD. Untuk kepentingan pengelolaan produksi (penggilingan gabah/beras), petani umumnya menggunakan jasa RMU/Huller milik KUD. Itu juga semacam partisipasi.

Pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian (semprotan) atau sarana produksi padi (saprodi) seperti pupuk, obat-obatan, bibit, juga menjadi monopoli KUD sehingga, untuk keperluan itu, petani akan berhubungan dengan KUD. Itu juga suatu jenis partisipasi, yaitu sebagai pelanggan KUD. Harga yang dibayar petani untuk bahan kebutuhan tersebut tidak berbeda dengan harga umum yang berlaku di pasaran. KUD dapat menyediakannya pada waktu dan tempat yang tepat. Ini dimungkinkan karena KUD mempunyai unit angkutan.

Untuk keperluan biaya hidup sebelum panen atau untuk keperluan-keperluan lainnya, KUD dapat memberi pinjaman melalui pelayanan oleh unit simpan pinjam.

Sudah barang tentu keterlibatan atau partisipasi rakyat tersebut bermanfaat bagi perbaikan kesejahteraannya sebab mereka telah menikmati berbagai kemudahan hidup.

Memang partisipasi pada umumnya penduduk petani dalam KUD, terutama sebagai penerima pelayanan atau penguasaan jasa KUD.

Namun melalui transaksi dengan KUD itu, sebenarnya rakyat juga sudah belajar banyak mengenai koperasi/KUD sehingga tingkat kesadarannya berangsur-angsur bertambah. Kalau hanya sekedar penyuluhan/ceramah mengenai perkoperasian mungkin pengetahuan mereka tidak banyak berubah sebab tidak dialaminya secara praktis.

7. M. Dahlan B.

Tanggal: 14 Juni 1989

7.1 Pengalaman masa perintisan pembentukan BUUD/KUD desa BS

Saat pembentuka BUUD/KUD masih sangat muda, sekitar usia 22 tahun. Diajak oleh H. Palessei, kepala desa, untuk turut mendukung pembentukan BUUD/KUD.

Awalnya, beliau berkunjung "silaturahmi", menceritakan gagasan dan konsep BUUD/KUD. Mula-mula saya tidak terlalu faham gagasan dan konsep tersebut, tetapi karena beliau yang mengajak, maka serta-merta setuju. Tidak banyak orang yang diajak oleh beliau, dibatasi pada kerabat/keluarga tertentu yang sanggup bekerja keras, pendidikan memadai dan dari segi ekonomi ada kecukupan.

Masa awal pembentukan tersebut ada terdengar suara-suara mencemooh (sinis) di masyarakat. Agaknya orang tidak percaya yang namanya koperasi bisa berkembang.

Mereka mengatakan "asenna nupa koperasi, kuperra'si". saya juga tidak/belum membayangkan bagaimana kemungkinan BUUD/KUD kelak.

Dalam melaksanakan BUUD/KUD sampai KUD sekarang ini belum pernah absen. Selalu ikut membina. Ketua yang pertama, H. Abdul Hafid, tetapi yang memprakarsai pembentukannya, mengajak orang-orang mendukungnya adalah H. Palessei.

Memang barangkali jika bukan beliau yang memprakarsai dan giat mencari pendukung pada masa permulaan, mungkin tidak ada yang bersedia. Sebab mendengar nama koperasi itu, pada waktu itu, tidak menarik minat orang. Saya pun begitu juga mulanya.

Setelah terbentuk dan mulai menjalankan kegiatan, mengelola penggilingan gabah/beras (RMU/Huller) dan melakukan pembelian gabah petani, H. Palessei tetap rajin menasehati para penyelenggara kegiatan supaya bekerja sungguh-sungguh.

Selalu diingatkan untuk melayani penduduk secara ramah-tamah supaya mereka senang berhubungan dengan BUUD/.KUD. Juga selalu diigatkan untuk mengelola organisasi administrasi secara hati-hati, cermat, dan jujur. Nasihat yang sering dikemukakan, misalnya, ialah "padecengi jamanmu, padecengi jukkana koperasie, aja muappakasiri" Maksud beliau,

agar jangan sampai kita gagal sebab jika itu terjadi beliau akan malu (masiri). Dan sebagai kerabat/keluarga tentu kita pun ikut "masiri".

Untuk melayani penduduk, baik dalam pembelian gabah/beras, maupun penggilingan gabah kamu sering bekerja sampai larut malam (pk. 24.00). H. Palessei juga rajin menjenguk kami bekerja dalam keadaan yang demikian. Pokoknya, tidak boleh ada penundaan pemberian pelayanan.

Beliau juga sering memberi nasehat bahwa rakyat harus diambil/dipikat hatinya (dialai atinna rakyae), sebab dengan cara itu kepercayaan rakyat terhadap koperasi dapat dibangkitkan.

Juga sering beliau mengatakan "aja mupeddiri atinna rakyae"; "aja nubellei rakyae". Artinya, jangan menyakiti hati rakyat; jangan membohongi rakyat.

Tanggal: 15 Juni 1989

7.2 Kendala yang dihadapi dalam pengembangan BUUD/KUD

Sekitar dua tahun pertama berdirinya BUUD/KUD, kendala yang dirasakan ialah sikap kurang percaya masyarakat terhadap BUUD/KUD. Masih jarang orang yang mau menjadi anggota sehingga pengembangan modal sukar dilakukan. Kebanyakan yang direkrut menjadi anggota adalah kerabat/keluarga H. Palessei saja.

Meskipun pelayanan sudah diberikan sebaik-baiknya, tidak segera banyak orang yang mau menjadi anggota. Modal utama yang selalu digunakan berasal dari kredit BRI Bantaeng karena waktu itu belum ada BRI di Bulukumba. Jarak bulukumba-Bantaeng ada 30 Km. Masalah pengembalian kredit merupakan juga salah satu persoalan saat itu. Namun masalah ini selalu dapat ditanggulangi pada waktunya.

Persoalan lain ialah kecakapan atau keterampilan administrasi pembukuan masih dirasakan kurang. Untunglah kemudia ada orang yang mau membantu secara sukarela, yaitu Pak M. Yusuf Karim, petugas Kandepkop dan kakak kandung Pak Abdullah Karim, bendahara BUUD dan yang sekarang menjadi manajer KUD Mattirobulu.

Mengenai kerja sama dan solidaritas para pengelola atau penyelenggara kegiatan BUUD/KUD, tidak ada hal yang dirasakan sebagai masalah. Soalnya, kami selalu menyadari ucapan "aja nuappakasiri, pakessingi jamanmu, padecengilaloi jokkana koperasie", yang seringkali dinasehatkan

Pak H. Palessei.

7.3 Persepsi mengenai prosedur kepengurusan dan kebijakan pengurus

Pengurus ditetapkan dengan cara musyawarah. Pada mulanya kepemimpinan langsung dipegang Pak H. Palessei. Tetapi karena ada ketentuan bahwa kepala desa tidak boleh menjabat sebagai ketua BUUD/KUD, maka disepakati, H. Abdul Hafid memegang jabatan ketua pada periode pertama.

Bendahara pada periode pertama adalah H. Abdullah Karim, sedangkan manajer adalah H. Ibnu Hajar.

Pada periode berikutnya, kedudukan H. Abdullah Karim dipertukarkan dengan H. Ibnu Hajar. Pertimbangannya waktu itu ialah bahwa H. Abdullah Karim berdomisili di luar desa (di kota Bulukumba). Walaupun jarak Bontosunggu-Bulukumba hanya 7 km, namun terdapat ketentuan bahwa anggota KUD seharusnya adalah penduduk desa pada tempat KUD berdiri.

Sekaligus peralihan status H. Abdullah Karim menjadi manajer, maka dibuka pula kantor cabang KUD di Bulukumba yang menggunakan rumah kediaman pribadinya.

Proses musyawarah pembentukan pengurus tidak pernah mengalami kesulitan, mungkin karena adanya kewibawaan yang bersifat karismatik dari H. Palessei yang mengikat yang selalu mengingatkan "aja nuappakasiri".

Pada masa sekarang di mana KUD Hattirobuku sudah berkembang dengan jumlah anggota yang ribuan, prosedur kepengurusan juga ditetapkan secara musyawarah. Yang duduk dalam sidang musyawarah itu adalah para ketua TPK dan ketua kelompok tani.

Agaknya pengurus yang sekarang masih terpilih kembali di masa-masa yang akan datang karena jalannya kegiatan sudah dipandang cukup baik.

Kecuali kalau ada keadaan yang luar biasa yang terjadi dalam kepengurusan yang sekarang ini, baru kemungkinan ada pergantian.

Tanggal : 16 Juni 1989/ 20 Oktober 1989

7.4 Persepsi mengenai sikap dan perilaku koperasi di kalangan anggota

Barangkali dapat dikatakan bahwa hampir semua penduduk dewasa BS sudah menjadi anggota KUD

Mattirobulu. Keadaan itu mungkin dapat dikatakan bahwa mereka sudah menyadari manfaat menjadi anggota KUD.

Partisipasi penduduk pada kegiatan yang dilaksanakan KUD juga tampak cukup baik dan menggembirakan. Misalnya, jika diadakan RAT, hampir semua anggota yang jumlahnya ribuan itu hadir. Apakah itu yang dinamakan kesadaran atau karena adanya insentif gula pasir bagi yang hadir, kurang jelas bagi saya.

Kalau soal pengembalian kredit KUD oleh petani kepada KUD, memang bisa seret kalau pengurus kurang perhatian. Harus cepat menagihnya pada saat panen. Kalau terlambat menagihnya, seringkali tertunggak oleh petani.

Penjualan gabah oleh petani kepada pihak lain di luar KUD belum pernah terjadi. Ini disebabkan karena para pedagang beras/gabah di desa BS telah difungsikan sebagai Tempat Pelayanan Koperasi (TPK) atau pol pembelian gabah dengan modal kerja pinjaman dari KUD, yang selanjutnya menyalurkan ke KUD.

Lagipula kegiatan pembelian gabah atau beras, baik oleh KUD maupun oleh TPK dan pol pembelian gabah, sanggup menjangkau lokasi yang paling dekat dengan petani.

Jadi dari segi itu tampak adanya partisipasi yang baik dari anggota terhadap KUD.

Apakah itu dikatakan partisipasi aktif atau partisipasi pasif, begitulah keadaannya.

Dalam unit dikatakan kegiatan simpan pinjam, proses pengambilan dan pembayaran kembali pinjaman oleh anggota terdapat keadaan yang cukup lancar. Memang ada juga satu dua orang yang seret mengembalikan pinjaman, tetapi tidak berarti jumlahnya.

Memang kepada setiap peminjam seringkali diingatkan pada saat terjadi transaksi, bahwa kelancaran pengembalian pinjamannya berarti akan memudahkan pula baginya untuk memperoleh pinjaman berikutnya, pada saat ia memerlukan lagi.

Pada unit kegiatan angkutan penumpang antar kota (Bulukumba-Ujungpandang), juga tampak adanya komitmen anggota yang berkepentingan untuk menggunakan jasa unit kegiatan tersebut. Ini mungkin disebabkan karena adanya bonus berupa satu tiket gratis bagi mereka yang menggunakan jasa sebanyak 10 kali, atau memiliki 10 tiket atas namanya.

Dalam hal pembelian sarana produksi pertanian

(saprotan) oleh petani, semuanya juga dilakukan melalui KUD. Sektor ini memang dapat dikatakan didominasi oleh KUD. Dan KUD dapat melayani kebutuhan petani pada waktu dan tempat yang sesuai.

Jadi sewajarnya pula di sektor ini terdapat partisipasi yang baik dari petani anggota terhadap kegiatan KUD.

Dalam hal pemenuhan kewajiban finansial seperti SP, SW, juga semua anggota dapat memenuhinya. Hanya saja SS tidak seluruhnya memenuhi, tetapi yang sudah memenuhinya adalah sebagian besar anggota, meskipun jumlahnya bervariasi sesuai kesanggupan masing-masing.

Ada sejumlah anggota yang menyimpan uang beberapa juta rupiah untuk persiapan Ongkos Naik Haji (ONH). Jika pada saat ia mau naik haji, sementara uang simpanannya baru mencapai 2/3 ONH, maka KUD dapat membayar sebagian sisanya sebagai pinjaman, yang kelak dapat dibayar secara berangsur-angsur. Biasanya pembayaran angsuran tersebut dilakukan yang bersangkutan setelah panen.

Pelayanan demikian tampaknya cukup menarik bagi kalangan petani yang mampu, karena mereka dapat berangkat ke tanah suci tanpa harus lebih dulu menunggu uangnya mencukupi jumlah ONH yang ditetapkan pemerintah.

Jadi pelayanan KUD dan partisipasi anggota berlangsung atau terjadi secara timbal balik.

Barangkali tanpa pelayanan KUD maka tidak ada pula partisipasi anggota.

Mengenai sikap negatif warga desa terhadap KUD, pada saat ini dapat dikatakan tidak lagi terdengar adanya.

7.5. Tokoh yang dipandang paling berperan dalam perkembangan KUD Hattirobulu.

Pada tahun-tahun permulaan, yang paling berperan adalah H. Palessei, kepala desa, yang berani mengambil prakarsa membentuk BUUD/KUD, pada saat mana citra koperasi jelek di mata penduduk.

Beliau yang membentuk, mendorong dan memotivasi atau membujuk orang-orang untuk bekerja sebaik-baiknya untuk kemajuan koperasi.

Beliau juga yang pada mulanya merelaka sebagian tanah miliknya menjadi agunan kredit BRI, yang digunakan bagi kepentingan koperasi.

Pada masa-masa selanjutnya, kiranya H. Abdullah Karim, manajer KUD, yang sangat besar peranannya.

Kegiatan usaha/bisnis KUD Hattirobulu

maju/berkembang pesat karena kecakapan dan keberaniannya dalam mengelola KUD.

Pendidikan formalnya semula tidak selesai/tamat SMA karena menikah dengan teman sekolahnya, putri kepala desa, H. Palessei. Baru beberapa tahun kemudian, pada saat dia telah menjalankan tugasnya sebagai manajer KUD, ia mengikuti ujian persamaan SMA dan memperoleh ijazah.

Tampaknya ia memiliki bakat alamiah dalam hal kewirausahaan. Mungkin bakat tersebut merupakan warisan orang tuanya, yang juga seorang pengusaha lokal yang cukup berhasil.

Konon ayahnya memiliki 3 buah perahu layar yang selalu mengangkut barang antara Bulukumba Surabaya - Ujungpandang. Selain memiliki perahu layar untuk mengangkut barang tersebut, beliau dikenal sebagai pengusaha/pedagang hasil-hasil bumi, yang memperdagangkan komoditi tersebut antar pulau.

H. Abdullah Karim berani mengambil resiko, dan cepat dalam mengambil keputusan. Selain itu ia rajin dan selalu bekerja keras sampai larut malam.

Di kalangan teman sekerja, dia juga dikenal disiplin, sehingga pernah memecat adiknya sendiri karena membuat pelanggaran.

Kecepatannya mengambil keputusan dan keberaniannya mengambil risiko kadang-kadang membuat rekan sekerjanya was-was. Misalnya, ketika ia memutuskan mengirim beras ke Semarang sebanyak 300 ton, kepada seorang pengusaha yang menghubunginya melalui tilpon. Meskipun dia diberi catatan mengenai nomor rekening BRI, namun dia tidak banyak mengenal pengusaha tersebut, sementara beras yang dikirimkan, adalah beras yang disiapkan untuk stock pengadaan pangan nasional, yang akan disetorkan ke Dolog.

Mungkin naluri bisnisnya yang mendasari keputusan berani tersebut, setelah memperhitungkan laba yang akan diraihnya.

Memang ternyata kemudian bahwa keputusannya tersebut memberi keuntungan ganda bagi KUD. Penyelesaian pembayaran dari Semarang berjalan lancar, sementara penyediaan cadangan pangan nasional dapat dipenuhi dengan pembelian beras dari lain kecamatan di luar wilayah kerja KUD Mattirobulu.

Beberapa tender berhasil dimenangkan KUD Mattirobulu, adalah karena kecepatan mengambil keputusan dan keberaniannya mengambil resiko, seperti proyek rehabilitasi gudang Dolog di

Kalamassang, Kirasa dan Bulukumba kota, serta beberapa proyek yang macet diambil alih pengelolaannya dari perusahaan lain, seperti misalnya, proyek KPR BTN di Bole Cipee.

Bekerja dari pagi sampai larut malam sudah menjadi acara rutin baginya. Setiap malam antara pukul 23.00-24.00 ia baru menerima laporan sopir angkutan antar kota dan truck angkutan barang.

Seperti diketahui, pada saat ini KUD Hattirobulu memiliki armada angkutan, yang terdiri dari; 4 buah bis angkutan penumpang antar kota (Bulukumba Ujungpandang), 27 buah truck angkutan barang dan 7 buah "pete-pete" untuk angkutan kota; jumlah seluruhnya ada 38 buah.

Demikianlah dapat digambarkan, bahwa H. Palessei berjasa dalam membina semangat kebersamaan, solidaritas dan kerja sama serta tekad untuk bekerja keras pada masa-masa perintisan, sedangkan H. Abdullah Karim berjasa dalam mengembangkan perusahaan bisnis KUD Mattirobulu pada masa-masa pengembangan sekarang ini. Karena itu kedua orang tokoh tersebut (mertua-menantu) tidak dapat dipisahkan dari riwayat perkembangan KUD Mattirobulu.

8. Nurdin S.

Tanggal : 19 Juni 1989

8.1. Riwayat keterlibatan dalam KUD Mattiobulu.

Berasal dari Bulukumba Timur, yakni Herlang (Hero/Lange-Lange) dan mulai bertempat tinggal di desa Bontosunggu sejak tahun 1980. Pada saat itu ia diangkat menjadi guru SD. Pendidikan formal yang terakhir diperolehnya ialah SPG.

Sebagai pemuda, ia melibatkan diri dalam kegiatan kepemudaan di desa, seperti Karang Taruna, Keolahragaan, klompencapir, dan lain-lain.

Mendaftarkandiri menjadi anggota KUD setelah melihat suasana RAT, dalam mana sebagai aktivis pemuda terlibat dalam kegiatan mempersiapkan acara RAT tersebut, misalnya mempersiapkan gedung, dekorasi, spanduk, dan sebagainya.

Tercatat sebagai anggota pada tahun itu juga (1981) sehingga ia tidak tergolong anggota perintis. Pada periode kepengurusan 1987-1989 terpilih sebagai sekretaris.

8.2 Persepsi mengenai mekanisme kepengurusan

Pengurus ditetapkan secara musyawarah mufakat melalui RAT. Di dalam RAT anggota diwakili oleh para ketua kelompok Tani dan TKP. Mereka itulah yang memilih dan menentukan/ menetapkan pengurus.

Saya mungkin terpilih sebagai calon dan kemudian ditetapkan sebagai sekretaris adalah karena saya sering kelihatan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan semenjak pertama kali menjadi warga desa BS. Selain itu juga, saya sudah terdaftar sebagai anggota sejak tahun 1981 dan beberapa waktu kemudian berkesempatan pula bekerja sebagai karyawan KUD Mattiobulu dengan tugas sebagai Juru Buku.

Pengurus yang sekarang ini, kecuali Pak H. A. Hafid, semuanya juga pernah bekerja sebagai karyawan KUD Mattiobulu. Ketua, Pak Ibnu Yatsin, misalnya pernah bekerja juga sebagai Ketua Unit Kredit (KCK).

Di dalam menetapkan kebijakan-kebijakan menyangkut pengelolaan KUD, selalu ditempuh musyawarah mufakat.

Musyawarah dilaksanakan setiap bulan sekali (minimal), di mana hadir semua unsur pengurus, badan pemeriksa, manajer dan karyawan. Akhir-akhir

ini para ketua dan sekretaris TPK serta para ketua kelompok tani juga diundang menghadiri rapat bulanan.

Di dalam rapat bulanan lengkap semacam itu semua persoalan dikemukakan oleh masing-masing unsur. Persoalan tersebut dibahas, dievaluasi dan dicari jalan pemecahannya.

Melalui rapat bulanan lengkap tersebut dapat diperoleh masukan mengenai semua persoalan yang dihadapi. Dengan demikian juga dapat diperoleh gambaran umum mengenai kondisi dan situasi organisasi dan usaha yang ada pada KUD.

Misalnya, unit usaha apa yang rugi dan mana yang laba. Mengapa terjadi yang demikian, serta bagaimana jalan keluar yang dapat ditempuh.

Di antara pengurus dibuat deskripsi tugas yang jelas yang mengatur, antara lain tugas pokok ketua dan wakil ketua, tugas pokok sekretaris, bendahara dan pembantu.

Deskripsi tugas dan mekanisme kerja tersebut dapat dilihat dalam Surat Keputusan Pengurus KUD Mattirobulu No. 031/KUD.MTB/XI/1988 Tentang Peraturan Khusus Pembagian Tugas dan Mekanisme Kerja Pengurus, yang diterbitkan pada tanggal 10 Nopember 1988.

Di antara pengurus dan manajer/karyawan terdapat pembedaan kerja/tugas pula.

Pengurus menangani masalah-masalah organisasi KUD, sedangkan kegiatan bisnis sepenuhnya dipercayakan kepada manajer, setelah berkonsultasi dengan pengurus.

Dengan demikian manajer beserta stafnya dapat bekerja secara leluasa tanpa tersendat-sendat oleh campur tangan yang tidak perlu dari pengurus.

Yang penting ialah adanya laporan rutin manajer pada setiap rapat rutin bulanan, untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan kegiatan bisnis selama bulan yang telah berjalan.

Melalui sistem pelaporan bertingkat, karyawan kepada manajer dan manajer kepada pengurus dan badan pemeriksa, pengurus dapat mengontrol jalannya organisasi dan usaha/bisnis KUD setiap waktu.

Selain itu hasil pemeriksaan BP dan juga oleh KJA (Koperasi Jasa Audit), merupakan pula masukan yang penting bagi pengurus dalam mengendalikan jalannya organisasi dan usaha KUD.

KJA mengadakan pemeriksaan terhadap KUD Mattiru[^]bulu pada tahun 1988 yang lalu. Dari hasil pemeriksaan oleh badan atau lembaga luar tersebut, pemerintah dapat memutuskan menetapkan suatu KUD seba-

gai KUD Mandiri. Dalam hal ini KUD Mattirobulu tergolong salah satu KUD Mandiri.

Tanggal : 20 Juni 1989/11 Oktober 1989/16 Juni 1990

8.3. Persepsi mengenai aspirasi dan dedikasi pengurus.

Sampai dengan kepengurusan yang sekarang masih terdapat fungsionaris yang tergolong angkatan perintis, yaitu H. Abdul Hafid, H. Abdullah Karim dan M. Dahlan.

Ketua Badan Pemeriksa juga masih H. Palessei, yang memprakarsai berdirinya BUUD/KUD desa Bontosunggu, yang merupakan peralihan ke KUD Mattirobulu sekarang ini.

Terutama Pak H. Palessei itulah merupakan sesepuh desa ini yang merupakan panutan para pengurus. Beliau menggunakan nilai budaya lokal sebagai acuan yang harus melandasi kebijakan, keputusan dan tindakan dari para pengurus, yaitu : "pada idik pada eloj sipatuo sipatokkont?", tekad yang sama diantara kita untuk saling menghidupkan dan saling menegakkan.

Tujuan yang diharapkan melalui kegiatan koperasi ini, bukanlah untuk dapat hidup dan tegak sendiri meskipun orang lain mati dan roboh karena itu, melainkan untuk hidup dan tegak bersama dan dalam kebersamaan.

Acuan nilai budaya lokal tersebut sekali-sekali terlupa dan terabaikan, akan tetapi kehadiran pribadi H. Palessei seringkali sudah cukup untuk mengingatkan-kembali kepada nilai budaya tersebut.

Wewenang dan karisma beliau masih kuat membekas pada hati sanubari para pengelola KUD.

Suatu ketika saya kembali dari mengikuti sebuah penataran perkoperasian. Sementara saya mengerjakan sesuatu di ruangan kantor KUD, beliau datang dan menghampiri (mengambil kursi di sebelah saya).

Beliau memperhatikan sejenak pekerjaan saya, kemudian dengan suara lemah lembut penuh nada kebakapan bertanya perihal pelajaran yang diberikan di penataran yang saya ikuti.

Selanjutnya dengan nada yang tetap sama, beliau melanjutkan bertanya, apakah pekerjaan yang saya lakukan saat itu sudah sejalan dengan kecakapan dan pengetahuan yang saya dapatkan dalam penataran. Ataupun pekerjaan saya justru menyimpang dari prinsip-prinsip pengetahuan yang telah saya pelajari dalam penataran. Dan akhirnya beliau bertanya : "detoga mnpwkasiri 'ka niatll". Maksudnya

apakah tidak akan membuat beliau "masiri" (malu). Dengan berbagai cara-cara persuasif informal seperti itulah beliau mengarahkan kami agar supaya senantiasa bekerja ke arah yang dipandang baik dan dengan sungguh-sungguh bekerja dengan cara yang baik.

- 8.4. Pemahaman terhadap konsep nilai budaya lokal yang menjadi acuan semangat kebersamaan, kerjasama, solidaritas.

Dari sesepuh H. Palessei juga saya memperoleh petuah-petuah mengenai esensi yang mendasari kehidupan bersama solidaritas dan kerja sama.

Mengenai hal ini beliau sering mengemukakan ungkapan bahasa bugis ; "mali siparappe. telleng sioaonang. malilu sioakainge". (Jika hanyut, saling mendamparkan, jika tenggelam saling mengapungkan, jika lalai saling mengingatkan).

Rasanya memang sangat masuk akal, bahwa jika apabila masing-masing orang hanya mementingkan dirinya sendiri saja, maka semangat kebersamaan tidak akan ada. Kerjasama juga tidak akan jalan dan tidak ada pula solidadritas di antara sesama.

Bayangkan jika kita masing-masing berprinsip, biarkan orang lain hanyut, biarkan orang lain tenggelam atau biarkan saja orang lain terlupa atau lalai.

Jika yang demikian itu berlaku, kiranya memang tidak mungkin ada apa yang disebut koperasi. Sebab koperasi jelas-jelas menghendaki kerjasama, solidaritas dan kebersamaan di antara sejumlah orang untuk saling membantu mencapai kehidupan yang lebih baik.

- 8.5. Pandangan mengenai adanya tokoh-tokoh yang dianggap sangat besar peranannya dalam pengembangan KUD Mattirobulu.

Kemajuan suatu perkumpulan semacam koperasi yang sifatnya menghendaki keuntungan ekonomi, tidak dapat disangkal ditentukan terutama oleh kecakapan dan kejujuran manajer.

Keadaan yang demikian juga dialami oleh KUD ini. Manajer H. Abdullah Karim, adalah seorang usahawan yang lincah, cepat bergerak dan suka/mau bekerja keras.

Peluang-peluang bisnis yang telah menguntungkan KUD ini merupakan hasil dari kecakapan dan kelincahannya mencari dan menemukan peluang-peluang

tersebut.

Peluang tidak datang sendiri, dan tidak semua orang tahu menemukan peluang itu. Hanya orang-orang tertentu saja yang dikaruniai ketajaman melihat adanya peluang itu. Pendidikan hanya mungkin membantu mempertajam kemampuan/kejelian melihat adanya peluang.

Dia itu semula tidak sempat menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SMA, karena menikah dengan puteri Pak Kepala Desa H. Palessei.

Setelah beberapa waktu lamanya aktif mengelola KUD Mattiobulu, barulah dia mengikuti ujian persamaan SMA melalui SMA Muhammadiyah. Itupun terpaksa ditempuhnya, karena adanya persyaratan, bahwa seorang manajer KUD harus mempunyai pendidikan formal paling sedikit setingkat SMA (berijazah). Seandainya syarat itu tidak ada mungkin dia tidak merasa perlu mengikuti ujian persamaan SMA.

Beberapa kelebihan yang dimilikinya yang menunjang kecakapannya dalam kegiatan bisnis, ialah misalnya, keuletannya berusaha, tidak gampang menyerah jika ada sesuatu yang diusahakannya, berani mengambil resiko, cepat bertindak, disiplin dirinya dalam bekerja.

Dia selalu berusaha menepati waktu yang telah ditetapkannya, termasuk dalam berjanji kepada orang lain.

Dalam hal pelanggaran disiplin oleh karyawan, ia dapat mengambil tindakan tegas dan keras. Misalnya, penyimpangan yang dilakukan oleh seorang sopir dalam penggunaan/pembelian bahan bakar, dia akan langsung memecatnya jika sebelumnya telah memberikan peringatan lebih dahulu.

Bahkan adik kandungnya yang bekerja sebagai asistennya diberhentikan, ketika yang bersangkutan tidak dapat mempertanggungjawabkan sejumlah uang.

KUD Mattiobulu sebagai suatu badan usaha pada saat ini termasuk paling maju di Kabupaten Bulukumba.

Beberapa tender proyek berhasil dimenangkan, seperti proyek rehabilitasi gudang Dolog di Kalamassang, kira-kira, Bulukumba Kota. Sedangkan proyek KPR/BTN yang semula dikelola oleh PT Balinda, kini diambil alih pengelolaannya oleh KUD Mattiobulu.

KPR/BTN tersebut meliputi pengadaan 50 unit rumah. Kini sebanyak 29 unit telah ditempati oleh karyawan KUD Mattiobulu dan dalam waktu dekat 9

unit lainnya juga akan dibeli oleh karyawan KUD ini.

Pembelian oleh karyawan KUD tersebut, dilakukan dengan bantuan KUD, kemudian karyawan yang bersangkutan membayar kembali sejumlah uang muka tersebut kepada KUD melalui pemotongan honorarium kelebihan jam kerja (lembur) dari karyawan yang bersangkutan.

Adapun pembayaran angsuran bulanan, juga akan dibayar oleh karyawan yang bersangkutan melalui pemotongan gaji setiap bulan.

Dengan cara itu berarti sebanyak 38 unit rumah dari sejumlah 50 unit yang ada telah dijual.

Keputusan pengambil-alihan pengelolaan KPR/BTN yang tidak dapat diteruskan oleh PT Balinda itu oleh KUD ini juga merupakan keputusan yang berani yang dilakukan oleh H. Abdullah Karim.

Sebelumnya proyek tersebut telah ditawarkan ke beberapa perusahaan swasta lain di Bulukumba, namun tidak ada yang bersedia.

Penagihan tunggakan pembayaran tarif listrik di kota Bulukumba, juga dialihkan oleh PLN ke KUD Mattirobulu.

Sedangkan pemasangan instalasi listrik ke pedesaan di desa Bialo dan Paenre Lompoe juga ditangani KUD ini.

Peluang-peluang seperti itu semua merupakan kejelian manajer, H. Abdullah Karim untuk mendapatkan dan memanfaatkannya.

Di antara pengurus mungkin tidak ada yang sempat melihat berbagai peluang yang demikian.

Jelas dari berbagai kenyataan itu, bahwa manajerlah, d.h.i. H. Abdullah Karim, menurut saya sebagai tokoh yang paling besar perannya dalam pengembangan KUD ini.

Tentu tokoh lain juga punya peranan yang tidak kecil. Akan tetapi pada tahap permulaan pembentukannya (masa perintisan), kiranya H. Palessei merupakan tokoh yang paling besar perannya.

Pada masa tersebut dapat dikatakan tidak ada orang yang berminat membentuk koperasi, atau mau bekerja untuk koperasi.

Pandangan masyarakat tentang koperasi juga tidak baik. Hanya karena kewibawaan dan karisma H. Palessei sajalah, sehingga masih ada orang yang bersedia diajak untuk membentuk dan mengembangkan BUUD/KUD.

8.6. Pendapat mengenai komitmen dan partisipasi

masyarakat terhadap KUD.

Pada saat ini di desa BS, mungkin sukar diketemukan warga desa yang tidak menjadi anggota KUD Mattiobulu. Di desa Bialo dan Paenre Lompoe, karena merupakan wilayah kerja baru sejak tahun 1986, masih sedikit warga yang menjadi anggota.

Sebagaimana diketahui KUD di desa/wilayah kerja baru itu dilebur ke KUD Mattiobulu pada tahun itu.

Mungkin karena pengalaman warga desa di desa-desa tersebut kurang menggembirakan dengan KUD di desa mereka yang sudah dilebur itu, maka mereka masih melihat-lihat dulu keadaan untuk mau menjadi anggota KUD Mattiobulu.

Akan tetapi berkenaan dengan adanya proyek pemasangan instalasi listrik di desa-desa tersebut yang ditangani oleh KUD Mattiobulu, dan salah satu persyaratan untuk menjadi anggota, maka secara berangsur-angsur telah mulai meluas keanggotaan di desa-desa tersebut.

Kesediaan menjadi anggota KUD, sudah dapat dikatakan ada komitmen warga desa terhadap kegiatan KUD. Karena hal itu dapat berarti sikap menolak atau sikap negatif terhadap KUD sudah berubah menjadi terbuka dan menerima.

Mengenai partisipasi masyarakat desa BS khususnya terhadap kegiatan KUD, juga dapat dipandang cukup baik saat ini.

RAT selalu dihadiri oleh hampir semua anggota yang ada di desa BS. "Jika ada yang tidak hadir, mungkin hanya karena adanya halangan yang tidak dapat dihindarkan.

Memang kehadiran pada RAT mempunyai keuntungan tersendiri, yaitu adanya insentif gula pasir 1 Kg perorang serta adanya acara pesta makan.

KUD Mattiobulu saat ini mempunyai sejumlah ternak sapi yang cukup berkembang biak, dan dapat diambil untuk kepentingan pesta pada setiap RAT. Saat ini jumlah sapi milik KUD kurang lebih 40 ekor.

Partisipasi anggota juga dapat dilihat pada penjualan gabah kepada KUD, pembelian saprodi/saprotan kepada KUD, penggunaan berbagai jasa KUD seperti penggilingan gabah/beras, lantai penjemuran gabah, jasa pergudangan, pembelian komoditi yang disediakan KUD seperti BBM dsb.

Jasa simpan pinjam juga cukup baik perkembangannya. Hanya dalam hal pengambilan keputusan dan pengawasan jalannya KUD, mungkin partisipasi itu dapat dikatakan kurang.

Tetapi hal itu mungkin ada kaitannya dengan sistem pemilihan pengurus yang dilakukan secara bertingkat dimana anggota diwakili oleh pimpinan-pimpinan kelompok dan TPK.

Sedangkan pengambilan keputusan lainnya yang menyangkut organisasi, dipandang cukup dilakukan oleh pengurus dan dalam bidang usaha oleh manajer dan pengurus. Lagi pula tingkat pendidikan kebanyakan anggota masih rendah, sehingga kurang memungkinkan mereka mengetahui bagaimana mengawasi jalannya suatu organisasi dan usaha.

Sebenarnya menurut saya, adanya kepercayaan masyarakat terhadap KUD, sudah merupakan partisipasi terhadap pengelolaan dan kegiatan KUD itu. Sebab kalau mereka tidak menaruh kepercayaan, mustahil mereka mau menyerahkan uangnya, misalnya untuk melunasi SP dan SW maupun SS.

8.7. Pendapat mengenai peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai perkoperasian.

Penyuluhan mengenai perkoperasian memang juga seringkali dilakukan. Dalam berbagai penyuluhan itu dikemukakan pengertian mengenai koperasi, azas-azas, sendi dasar dan tujuan koperasi, hak dan kewajiban anggota dan pengurus, serta manfaat menjadi anggota koperasi. Tetapi menurut hemat saya, banyak juga pengertian mereka bertambah karena mereka berhubungan langsung, dengan KUD. Misalnya mengenai prosedur perkreditan, simpan pinjam, SHU dan pelayanan jasa lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan KUD itu bagi rakyat lebih jelas dan mantap. Sebab hal itu diperoleh secara praktis, sedangkan pada umumnya rakyat hanya dapat berpikir praktis.

Tetapi walaupun demikian, kegiatan penyuluhan tetap juga diadakan pada waktu-waktu tertentu, misalnya di mesjid saat menunggu waktu shalat isya (sesudah shalat magrib), terutama di wilayah kerja yang baru, di desa Bialo dan Paenre Lompoe.

9. H. Abdullah Karim

Tanggal : 26 Juni 1987/7 Oktober 1989

9.1. Pengalaman masa pembentukan/masa perintisan BUUD/KUD di desa BS.

Pertama kali pembentukan BUUD/KUD diprakarsai oleh Kepala desa, H. Palessei.

Mula-mula beliau mengadakan pendekatan fpersuasi > terhadap beberapa orang kerabat keluarga, serta kepala dukun yang beliau bawahi.

Dalam pendekatan itu dikemukakan mengenai rencana membentuk BUUD/KUD, serta tujuan yang diharapkan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kebetulan ada kakak kandung yang bekerja pada Kandepkop Bulukumba (iL. Yusuf Karim"). Masalah itu saya tanyakan kepadanya, sekaligus meminta penjelasan mengenai fungsi peranan serta tujuan BUUD/KUD itu.

Penjelasan dari kakak tersebut memperkuat dugaan saya untuk membantu Pak Desa membentuk dan mengembangkan BUUD/KUD di BS.

Sebenarnya masyarakat waktu itu tidak berminat terhadap apa yang namanya koperasi, rasanya tidak ada orang yang mau pada saat itu.

Akan tetapi karena Pak Desa, merupakan orang yang sangat disegani, karena wibawanya yang tinggi, maka mereka yang diajak itu tidak menolak, meskipun mungkin merasa enggan.

Pak Desa itu disegani warga desa disebabkan karena sekian puluh tahun memegang kepemimpinan desa, tidak pernah terkesan mementingkan diri dan keluarganya dan mengabaikan kepentingan umum.

Lagi pula pada masa kekacauan, yang menyebabkan hampir seluruh penduduk BS terpaksa mengungsi, meninggalkan sawah ladangnya, Pak Desa telah tampil membela dan melindungi rakyat dari keganasan gerombolan pengacau.

Pada masa itu, saya masih kecil, nama beliau terkenal sebagai orang yang berani melawan dan menghalau serangan gerombolan. Pada saat itu beliau bersama sejumlah anak buahnya dari kesatuan Hansip/wanra (waktu itu dikenal dengan istilah "kombe") > dipersenjatai oleh ABRI untuk mengamankan desanya.

Meskipun semula kesatuannya dipersenjatai untuk menjaga keamanan desanya, tetapi karena terbukti keberanian dan keberhasilannya menghalau

gerombolan, maka akhirnya justru banyak diikuti sertakan dalam berbagai operasi penumpasan gerombolan pengacau di kawasan lain di Kabupaten Bulukumba.

Keberhasilannya dalam berbagai pertempuran melawan gerombolan pengacau itu antara lain menyebabkan disegani.

Banyak cerita yang berkembang dalam masyarakat mengenai kehebatannya di medan tempur, seperti misalnya, bahwa beliau kebal atau peluru tidak pernah dapat menyasar ke tubuhnya, melainkan ke arah yang lain, meskipun dirinya yang dibidik dengan sengaja.

Dalam pada itu beberapa sifat-sifat kepribadiannya yang lain, seperti sikap hormat dan menghargai orang lain, rendah hati, jujur, tanggung jawab sosial dan moral menyebabkan beliau semakin disegani.

Demikianlah ketika beliau mengajak membentuk dan mengembangkan BUUD/KUD, saya seperti juga orang lain yang diajaknya tidak menolak.

Berkenaan dengan dibentuknya BUUD/KUD tersebut ada suara-suara sumbang dalam masyarakat, yang seolah-olah mengejek.

uara-suara yang bersifat melecehkan itu, ialah misalnya yang mengatakan: "asennamupa koperasi, kuperra'si".

9.2. Pengalaman masa pengembangan KUD Mattirobulu

Pada masa perintisan pengembangan BUUD/KUD, kegiatan yang ada terutama pembelian gabah dan beras dari petani untuk kepentingan proyek pengadaan pangan nasional.

BUUD/KUD membeli gabah dan beras dari rakyat/petani kemudian dijual ke Dolog dan ke pasaran umum.

Modal pertama diperoleh dengan kredit dari BRI Bantaeng sebesar Rp 600.000,-

Kegiatan lain, ialah penggilingan gabah/beras (RMU/Huller). Modal pertama juga diperoleh dengan kredit dari BRI Bantaeng sebesar Rp 500.000,-

Tahun 1974 kegiatan bertambah dengan unit pergudangan atau istilahnya Gudang Lantai Jemur (GLJ) dengan modal pertama sebesar Rp 3.000.000,- pinjaman pemerintah.

Dengan usaha yang penuh perhitungan yang secermat mungkin semua kegiatan itu berjalan baik. Modal pinjaman semua dapat dikembalikan pada waktunya.

Sebenarnya untuk pengembalian modal tersebut kepada BRI kadang-kadang menggunakan sebagian uang pribadi, yang dipinjam dari orang tua.

Karena agak sering melakukan cara tersebut, orang tua sering menggerutu, tetapi kakak (tL. Yusuf Karim) biasanya dapat memberikan pengertian kepada orang tua.

Tujuan yang ingin saya capai dengan berusaha selalu melunasi kredit Bank itu pada waktunya, sekalipun terpaksa harus menggunakan sebagian uang dari orang tua, ialah untuk memberi kesan kepada Bank, bahwa kami adalah nasabah yang baik, yang dapat dipercaya.

Dengan pertimbangan itu diharapkan pada masa-masa yang akan datang kami selalu dapat memperoleh dana pinjaman dari Bank untuk memperluas usaha.

Masa perintisan itu merupakan masa-masa prihatin bagi para pengelola atau penyelenggara kegiatan BUUD/KUD.

Semua orang bekerja sungguh-sungguh, hati-hati dan tanpa imbalan.

Ada semacam kekhawatiran kalau-kalau kami gagal mengembangkan usaha BUUD/KUD itu, mengingat adanya cemooah dalam masyarakat.

Pak Desa, H. Palessei, juga sering mengingatkan bahwa usaha BUUD/KUD tidak boleh gagal, sebab hal yang demikian akan berarti "mappakasjrj" (membuat malu).

Pelayanan diusahakan sebaik mungkin, sedapat mungkin dapat memberi kepuasan kepada masyarakat/pelanggan yang menggunakan jasa (penggilingan dan pergudangan). Para penyelenggara tidak segan-segan bekerja sampai tengah malam, agar pesanan jasa penggilingan tidak tertunda.

Dalam hal menimbang gabah dan beras pada saat terjadi transaksi, diusahakan secermat mungkin agar BUUD/KUD tidak sampai rugi, tetapi petani menjual beras/gabah juga puas. Sedangkan pembayaran harus selalu dilakukan secara tunai.

Setiap bulan dilakukan perhitungan secara menyeluruh keadaan usaha (laba-rugi) dalam hal pertemuan semua unsur penyelenggara kegiatan.

Dalam pertemuan-pertemuan semacam itu, seringkali Pak Desa, H. Palessei mengingatkan kami semua, agar tetap bekerja sungguh-sungguh dan cermat. Ungkapan yang sering dikemukakannya; "padecengi iamammu. ala muappakasiri".

Pada tahun 1975, unit kegiatan bertambah, yaitu dengan membuka unit pengadaan palawija.

Pada tahun sebelumnya saya sudah bertukar

kedudukan dengan Pak Ibnu Hajar. Dia menjadi bendahara menggantikan saya, sedangkan saya menggantikan dia sebagai manajer. Modal pertama unit kegiatan ini, juga berasal dari kredit BRI sebesar Rp 2.000.000,- sedangkan modal sendiri sebesar Rp 500.000,-

Pada tahun 1976 skala kegiatan bertambah lagi dengan membuka unit pertokoan dan unit BBM (bahan bakar minyak). Modal pertama unit pertokoan sebesar Rp 600.000,- berasal dari modal sendiri. Sedangkan modal unit BBM sebesar Rp.100.000,- juga berasal dari modal sendiri. Unit pertokoan ini pada tahun 1986, jadi sepuluh tahun kemudian diperluas kapasitasnya dengan bantuan dana kredit Bukopin sebesar Rp 12.000.000,-

Juga pada tahun 1976 diusahakan penjualan bibit padi dan palawija. Unit kegiatan ini menggunakan modal yang berasal dari kredit dana pangan atau kredit usaha tani <KUX) sebesar Rp. 10.000.000,-

Hingga kini semua persoalan kredit sebagaimana disebutkan dapat diselesaikan pada waktunya.

Jika dalam media massa banyak diberitakan mengenai tunggakan kredit KUT oleh sebagian besar KUD, dan Sulawesi Selatan termasuk daerah yang besar nilai tunggakannya, maka KUD Mattirobulu tidak termasuk yang menunggak itu.

Tanggal: 29 Juni 1989/4 Oktober 1989

9.3 Pandangan mengenai kiat pengembangan usaha/bisnis KUD

Berusaha dalam bidang bisnis KUD sebenarnya tidak beda dengan jenis perusahaan lainnya.

Seorang manajer KUD, sama seperti pengusaha atau wiraswasta lainnya. Harus cepat berpikir dan berbuat, tidak membuang-buang waktu.

"Waktu adalah uang, kata orang, dan menurut saya waktu adalah juga modal".

Kita juga harus mempunyai keberanian, kadang-kadang harus sepereti menyerempet bahaya, jika diperlukan demi mendapatkan peluang keuntungan. Jika takut atau ragu-ragu, lebih banyak gagalnya dari pada berhasil.

Karena waktu itu adalah modal, maka harus siap bekerja sepanjang waktu. Kalau mau enak-enakkan, bersantai-santai lebih baik jangan bekerja sebagai manajer KUD atau wiraswasta. Nanti akan ketinggalan mendapatkan peluang keuntungan. Lebih baik jadi yang lain-lain saja atau bekerja pada bidang lain.

Tidak membuang-buang waktu itu berarti juga kita harus disiplin waktu.

Modal lain yang harus dipelihara adalah kejujuran dan menepati janji (kepercayaan).

Kejujuran dan tepat janji menjadi jaminan bagi pihak lain yang menjadi relasi kita, bahwa kita dapat dipercaya. Kepercayaan dari relasi itu juga modal untuk meraih peluang bisnis.

Tanpa kepercayaan masyarakat dan lembaga-lembaga lain seperti bank, dan pemerintah daerah sangat baik terhadap KUD Mattirobulu.

Relasi dengan bank memang sudah kita bina sejak awal. Setiap jenis kredit diusahakan dapat dibayar lunas pada waktunya. Dulu, sering minta uang orang tua untuk membayar cicilan kredit BRI, maksudnya juga untuk merebut kepercayaan dari BRI. Begitu juga dengan kredit dari sumber lain seperti Bukopin, pemerintah dan sebagainya.

Mulanya, memang orang tua mempertanyakan mengapa selalu minta uang untuk bayar cicilan kredit, kan BUUD/KUD (waktu itu) yang utang. Mestinya pembayaran cicilan kredit dibayar dari penghasilan dari usaha BUUD/KUD. Tetapi karena uang dari orang tua yang saya pinjam selalu juga dapat dikembalikan, yaitu dengan pembayaran dari penghasilan/laba BUUD/KUD, jadi sebenarnya uang itu berputar, maka lama-kelamaan, beliau memahami. Dan yang penting tujuan saya menarik simpati dan kepercayaan bank tercapai.

Kehormatan atau martabat diri (airi) memang merupakan hal yang penting dalam hidup. Apa artinya hidup kalau tidak ada kehormatan atau harga diri.

Tetapi seringkali orang yang kurang faham menyalahartikan "siri" atau "degaga siri'na".

Itu sebabnya orang harus pergi dari kampungnya, jika di kampung tidak ada peluang untuk membuktikan kemampuan membuat prestasi.

Kakek saya sebenarnya buka orang asli Herlang, tetapi berasal dari Wajo. Konon beliau meninggalkan Wajo karena merasa kurang mendapat peluang untuk mencapai prestasi dalam bidang usaha di sana.

Dengan merantau ke Herlang dan menetap di sana, beliau dapat mencapai hasil yang diharapkannya.

Kegigihan berusaha itu agaknya dididikkannya kepada keturunannya, yang diteruskan lagi oleh orang tua saya kepada anak-anaknya.

Saya banyak belajar dan mencontoh orang tua dalam hidup dan berusaha.

Meskipun saya tidak berpendidikan tinggi, tetapi

saya bersyukur sudah mampu menyekolahkan anak pertama di perguruan tinggi, dan dalam waktu yang tidak lama, Insya Allah adiknya akan menyusul.

Kepada mereka saya didikkan, bahwa kalau hanya menyamai saya, maka mereka belum cukup terhormat dalam kehidupannya kelak. Sebab dimasa yang akan datang Standard kehormatan atau martabat dalam kehidupan lebih tinggi dari pada sekarang.

H. Palessei, yang mempelopori pembentukan BUUD/KUD dengan Bontosunggu, yang kemudian menjadi KLID Mattirobulu mungkin bermaksud mendorong kami, para pelaksana kegiatan BUUD/KUD dulu itu, untuk bekerja keras dan jujur dengan seringkali bernasihat "aja muappakasiri bela". Sebab hanya dengan kerja keras dan kejujuran kegiatan BUUD/KUD itu bisa maju, dan keberhasilan itu akan menaikkan derajat kehormatan kami dan tentunya derajat kehormatan beliau juga.

KUD akan sama saja dengan badan usaha yang lain. Keadaan ini sebenarnya merupakan titik lemah dari kebanyakan koperasi atau KUD, termasuk KUD ini.

Pada KUD atau koperasi yang sudah besar usahanya, mudah sekali manajer atau pengurus memanipulasi keadaan itu untuk kepentingan diri sendiri.

Itu yang terjadi seperti yang biasa diberitakan di media massa, seperti pengurus yang menyalahgunakan keuangan koperasi atau manajer yang melarikan diri setelah menguasai sejumlah besar uang milik koperasi.

Kalau Badan Pemeriksa juga lemah, tidak cukup menguasai masalah administrasi keuangan (neraca dll), maka keadaan lebih rawan lagi.

Dalam keadaan yang demikian hanya faktor iman saja yang masih bisa menjadi jaminan.

Tetapi masalah iman tidak ada yang bisa menjamin, kecuali diri sendiri dan Tuhan.

Seringkali kita dengar mengenai pengawasan melekat atau waskat dibicarakan di media massa. Waskat sebenarnya hanya bisa jalan kalau ada iman yang kuat. Tetapi iman harus juga selalu dipelihara, sebab yang kuat hari ini, bisa lemah besok atau sebaliknya.

Barangkali di situ pentingnya pendidikan agama. Tetapi pendidikan agama yang paling menentukan adalah di rumah oleh contoh teladan dari orang tua. Di sekolah lebih banyak hanya menghafal saja.

Alhamdulillah, saya mempunyai orang tua yang bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam beragama.

Pendapat mengenai faktor sosial dan nilai-nilai budaya

Saya buka orang Bontosunggu asli, tetapi dari Herlang. Hanya kebetulan beristri orang BS.

Orang BS kebanyakan adalah petani yang ulet bekerja. Kalau tanahnya di kampung/desa sendiri tidak memadai mereka mengusahakan di desa lain di sekitarnya.

Di BS tidak tampak sikap membeda-bedakan orang menurut keturunannya, seperti di tempat-tempat lain, termasuk misalnya di Herlang sendiri.

Orang BS tampak lebih patuh kepada pemimpinnya. Mungkin karena kebetulan yang menjadi pimpinan desa sekian lamanya memang bisa diteladani, seperti kejujuran, kesederhanaannya, tanggung jawab sosialnya, perhatiannya kepada kepentingan orang banyak dll.

Kerja sama gotong royong di desa BS tampak lebih mudah digerakkan di dibandingkan dengan di Herlang, menurut hemat saya. Buktinya KUD di BS bisa berjalan baik dibandingkan dengan di tempat lain termasuk di Herlang.

Tetapi boleh jadi juga hal itu karena faktor kepemimpinan desa masing-masing.

Soal faktor nilai budaya lokal (airi), agaknya sama saja dengan di tempat lain. Tergantung bagaimana menerapkannya saja.

Dalam menyelenggarakan kegiatan manajerial, disiplin penting sekali. Pertama-tama disiplin diri sendiri, dan kemudian disiplin orang lain (siaf. karyawan). Tanpa disiplin diri, orang lain tidak mungkin didisiplinkan.

Saya bekerja dari pagi-pagi sekali sampai larut malam jika pekerjaan sedang banyak.

Untuk menegakkan disiplin, maka pelanggaran harus ditindak dengan tegas. Sekali tidak tegas, maka selanjutnya menjadi susah menerapkan aturan.

Sopir, biasanya adalah orang yang paling suka membuat kecurangan dan pelanggaran aturan. Karena itu sebelum menerima sopir, lebih dahulu dijelaskan dan ditegaskan, bahwa pelanggaran disiplin dan kecurangan, tidak dapat dimaafkan, dan resikonya adalah PHK, tanpa tawar menawar.

Pernah terjadi sopir tidak memasukkan ke tangki mobil semua jatah BBM yang disediakan, kelebihan uangnya di gunakan untuk keperluan pribadi. Esoknya saya suruh parkir mobil dan kuncinya saya ambil. Akibatnya sopir lain menjadi lebih hati-hati

bekerja.

Adik kandung sendiri, juga saya skorsing ketika ketahuan membuat pelanggaran.

Akibatnya orang tua menegur saya, tetapi saya berpendapat cara saya itu lebih mendidik dari pada jika menasihati atau sekedar memarahi.

9.4 Persepsi mengenai partisipasi anggota dalam kegiatan KUD

Kebanyak anggota adalah orang desa, tingkat pendidikannya masih rendah, kebanyakan petani yang pikirannya sederhana saja.

Bagi mereka yang penting kebutuhan bibit, pupuk, obat-obatan, produksi dibeli KUD dengan harga semestinya, masalahnya sudah selesai.

Sebagian lagi, asal kebutuhan kredit di samping hal-hal tersebut di atas, mereka sudah puas.

Sebagian lagi, di samping itu semua, juga melihat bagaimana pembagian SHU dilakukan.

Jadi lingkup kepentingan yang dirasakannya pokok, menentukan lingkup perhatiannya. Selanjutnya lingkup perhatiannya menentukan sejauh mana keterlibatannya. Masalah pengambilan keputusan, baik organisasi maupun usaha serta penentuan kebijaksanaan, jarang sekali ada anggota yang memperhatikan. Begitu juga mengenai pengawasan jalannya kegiatan usaha.

Jadi partisipasi anggota kebanyakan hanya dalam hubungan pelayanan oleh KUD terhadap mereka.

Karena itu masalah pelayanan anggota itu penting sekali dalam membina KUD.

10. Ibnu Yatsin BA

Tanggal: 14 Juli 1989/2 Oktober 1989

10.1. Pengalaman partisipasi dalam kegiatan KUD

Mulai menjadi anggota pada tahun 1978. Memulai karir di KUD Mattiobulu sebagai karyawan, yakni sebagai ketua unit kredit candak kulak (&&), kemudian menjadi pengurus (pembantu), selanjutnya menjadi sekretaris, lalu menjadi ketua.

Pada saat ini sudah memegang fungsi ketua untuk periode yang kedua kali. Setiap periode kepengurusan lamanya 3 tahun, dan selalu dapat dipilih kembali menurut atau terserah RAT.

10.2. Prosedur dan mekanisme kepengurusan dan kepemimpinan

Pengurus dan badan pemeriksa dipilih melalui RAT. Pemilihan dilakukan dengan sistem perwakilan anggota. Ini dilakukan karena jumlah anggota sebanyak 2000 orang lebih, jika semuanya diharapkan ikut mencalonkan dan memilih, keadaannya tidak praktis.

Yang dipandang merupakan perwakilan anggota itu ialah ketua-ketua kelompok tani dan ketua-ketua TPK. Jumlah kelompok tani ada 32 sedangkan jumlah TPK ada 14.

Pemilihan pengurus dilakukan secara musyawarah mufakat daripada wakil-wakil tersebut. Pihak luar KUD yang biasanya menghadiri musyawarah pemilihan pengurus ialah Dekopinda. Di masa-masa yang lalu, musyawarah juga seringkali dihadiri pejabat dari Kandepkop Kabupaten Bulukumba, namun pada tahun-tahun terakhir ini, mungkin karena dipandang sudah mampu mengurus diri sendiri, pejabat dari instansi tersebut tidak merasa perlu hadir pada musyawarah yang demikian.

Hanya laporan hasil akhirnya saja yang diminta kemudian.

Dalam proses pengambilan keputusan dan kebijaksanaan pengurus, selalu diadakan musyawarah mufakat. Memang demikian pedoman mengenai perkoperasian, karena demokrasi yang sudah mengabaikan musyawarah mufakat, tentunya tidak bisa lagi disebut sebagai koperasi.

Kami dari pengurus KUD Mattiobulu berusaha selalu mematuhi ketentuan musyawarah tersebut hingga saat ini. Siapa saja yang terlibat di dalam

musyawarah berhak mengemukakan gagasan dan pertimbangan mengenai sesuatu hal yang dipermasalahkan.

Kepemimpinan yang diterapkan adalah kepemimpinan demokratis. Proses pengambilan keputusan dan ketentuan kebijaksanaan melibatkan semua unsur kepemimpinan/kepengurusan serta manajer dan BP. Karena itu untuk penerapan kebijakan-kebijakan tersebut, pimpinan cukup mengingatkan saja. Tidak perlu dengan cara-cara yang bersifat perintah, seperti halnya militer atau pegawai negeri. Dengan cara yang tidak terkesan memberi instruksi kepada rekan sekerja, dalam hal penerapan kebijakan serta mekanisme kepengurusan dan kepemimpinan lainnya, sifat atau suasana kekeluargaan malah lebih terpelihara.

10.3. Persepsi, motivasi, aspirasi dan ekspektasi

Persepsi; KUD adalah organisasi ekonomi yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama warga masyarakat pedesaan. Pengurus KUD adalah orang yang mendapat kepercayaan untuk mengatur jalannya organisasi sehingga tujuan itu dapat dicapai, yaitu kesejahteraan bersama para anggota.

Ada ungkapan dalam masyarakat yang mengatakan KUD adalah singkatan dari Ketua Untung Du;u. Itu memang bisa terjadi. Tetapi keadaan yang begitu bukan hanya di KUD bisa terjadi. Di organisasi apa saja hal itu bisa terjadi tergantung orangnya.

Alhamdulillah di KUD ini belum terjadi yang begitu, dan mudah-mudahan^ seterusnya demikian, sehingga betul-betul tujuan didirikannya KUD dapat tercapai.

Motivasi; menjadi pengurus atau ketua organisasi apa saja termasuk KUD, tentu ada suka dukanya.

Ada orang melihat lebih banyak dukanya, sehingga tidak mau menjadi pengurus atau ketua. Ada juga orang melihat banyak sukanya, sehingga berusaha keras, dengan berbagai cara untuk terpilih menjadi pengurus atau ketua.

Saya semula tidak pernah memikirkan untuk menjadi pengurus. Tetapi memang saya mempunyai kegemaran bergaul dan bekerja sama dengan orang lain.

Maka ketika melihat BUUD/KUD desa Bialo itu dipelopori pembentukan dan pembinaannya pada awalnya oleh Pak Desa H. Palessei, dan melihat bahwa penyelenggaraan kegiatan benar-benar diarahkan oleh beliau ke arah tujuan yang

sesungguhnya (kesejahteraan bersama warga pedesaan) saya tertarik menjadi anggota.

Sejak menjadi anggota pertama kali tahun 1978 itu, saya selalu mengikuti kegiatan-kegiatan seperti RAT secara aktif. Waktu ada proyek KCK, saya sudah menjadi karyawan KUD ini, dan dipercaya mengelola pelaksanaan KCK. Karena memang kegemaran saya bergaul dengan orang dan bekerja sama, jadi saya selalu berusaha melaksanakan tugas dengan baik, supaya tetap bisa diajak orang untuk bekerja sama.

Barangkali karena orang-orang menganggap saya mampu bekerja dengan baik dan bisa bekerja sama dengan baik dengan orang lain, maka berikutnya dipercaya menjadi sekretaris, kemudian menjadi ketua pada periode berikutnya sampai hari ini (sudah dua periode).

Jadi yang sering ada dalam pikiran saya, kalau saya bekerja dengan baik tentu orang senang bekerja sama dengan saya, dan itu berarti menyenangkan hati juga hati saya. Sebaliknya kalau saya bekerja secara tidak baik, misalnya mau untung sendiri/untung dulu, tentu orang lambat laun tidak mau lagi bekerja sama, dan keadaan itu tidak menyenangkan hati.

Aspirasi; dalam hati saya, kalau KUD Mattirobulu dapat berkembang terus, berarti kesejahteraan warga desa BS juga ikut berkembang.

Di BS ini banyak keluarga dan kerabat saya juga, jadi tentu mereka juga turut meningkat kesejahteraannya. Kalau warga desa BS serta kerabat dan keluarga saya bertambah baik, dan saya berperanan walaupun kecil dalam hal itu, tentu saya akan dipandang terhormat dalam masyarakat dan dikalangan kerabat dan keluarga. Berarti martabat atau harga diri turut meningkat.

Ekspektasi; supaya martabat diri yang tinggi tercapai dan terjaga, maka saya sepantasnya bekerja secara baik mengurus KUD ini.

Mungkin karena saya guru/pendidik maka martabat atau harga diri itu penting, dan itu tidak selalu tergantung pada harta benda. Kehormatan diri seringkali timbul karena pengabdian kita kepada masyarakat. Seperti halnya bagi guru/pendidik, kehormatan dirinya terutama timbul kalau anak didiknya berhasil dalam studi maupun dalam kehidupan.

Harapan saya di samping yang lain-lain, ialah kehormatan diri yang terpelihara, tidak tercemar sehingga sampai tua dan pensiun, kalau panjang

umur, masih tetap dihargai orang. Maka berusaha mengurus KUD sebaik mungkin yang bisa dilakukan, berkaitan dengan harapan tersebut.

10.4 Persepsi mengenai keadaan, komitmen dan partisipasi anggota.

Kebanyakan anggota KUD ini masih berpikiran sederhana. Kalau kepentingannya yang langsung berkaitan dengan kehidupannya sehari-hari, misalnya bibit, pupuk, obat-obatan bagi petani sudah terpenuhi oleh KUD, dan mereka sudah membayar simpanan pokok (SE.) maka kewajibannya sebagai anggota sudah selesai. Juga kalau hasil produksinya dibeli dengan harga yang pantas oleh KUD.

Selama ini memang semuanya itu dapat dipenuhi oleh KUD. Tetapi lebih dari itu barangkali masih harus dipikir-pikir dulu. Terbukti misalnya, simpanan suka rela masih susah dipenuhi oleh kebanyakan anggota. Jadi komitmen mereka terhadap KUD barulah sebatas pelayanan yang diperoleh mereka dari KUD.

Keadaan yang demikian tentu saja kurang menguntungkan usaha pemupukan modal intern KUD. Dalam kaitan usaha pemupukan modal sendiri inilah, maka dalam dua tahun terakhir, SHU tidak dibagikan seperti biasanya. Kepada anggota diberitahukan tujuan daripada kebijakan tersebut.

Kebijakan tidak membagikan SHU kepada anggota itu sebenarnya terasa kurang menyenangkan juga bagi para pengurus, namun diharapkan pula dengan kebijakan itu agar supaya ada dampak pendidikannya bagi para anggota, bahwa pemupukan modal sendiri adalah kewajiban bersama semua pendukung KUD termasuk mereka.

Tentang simpanan sukarela ini memang ada beberapa anggota yang melakukannya, terutama mereka yang merencanakan untuk naik ke tanah suci. Mereka ini jika sudah memiliki uang sebanyak hampir separuh ONH, mereka menyimpan sejumlah uang tersebut pada KUD sebagai sistim simpanan suka rela. Tetapi ini pun ada kaitannya dengan pelayanan KUD kepada mereka. Jika Berdasarkan pengamatan KUD, mereka layak dibantu, dalam arti kemampuan membayarnya tidak diragukan, maka KUD dapat membantu mereka untuk berangkat ke tanah suci tanpa harus menunggu simpanan mereka mencukupi.

Terdapat beberapa orang di BS yang telah menikmati bantuan semacam itu dari KUD.

Jadi dapat dikatakan bahwa komitmen dan